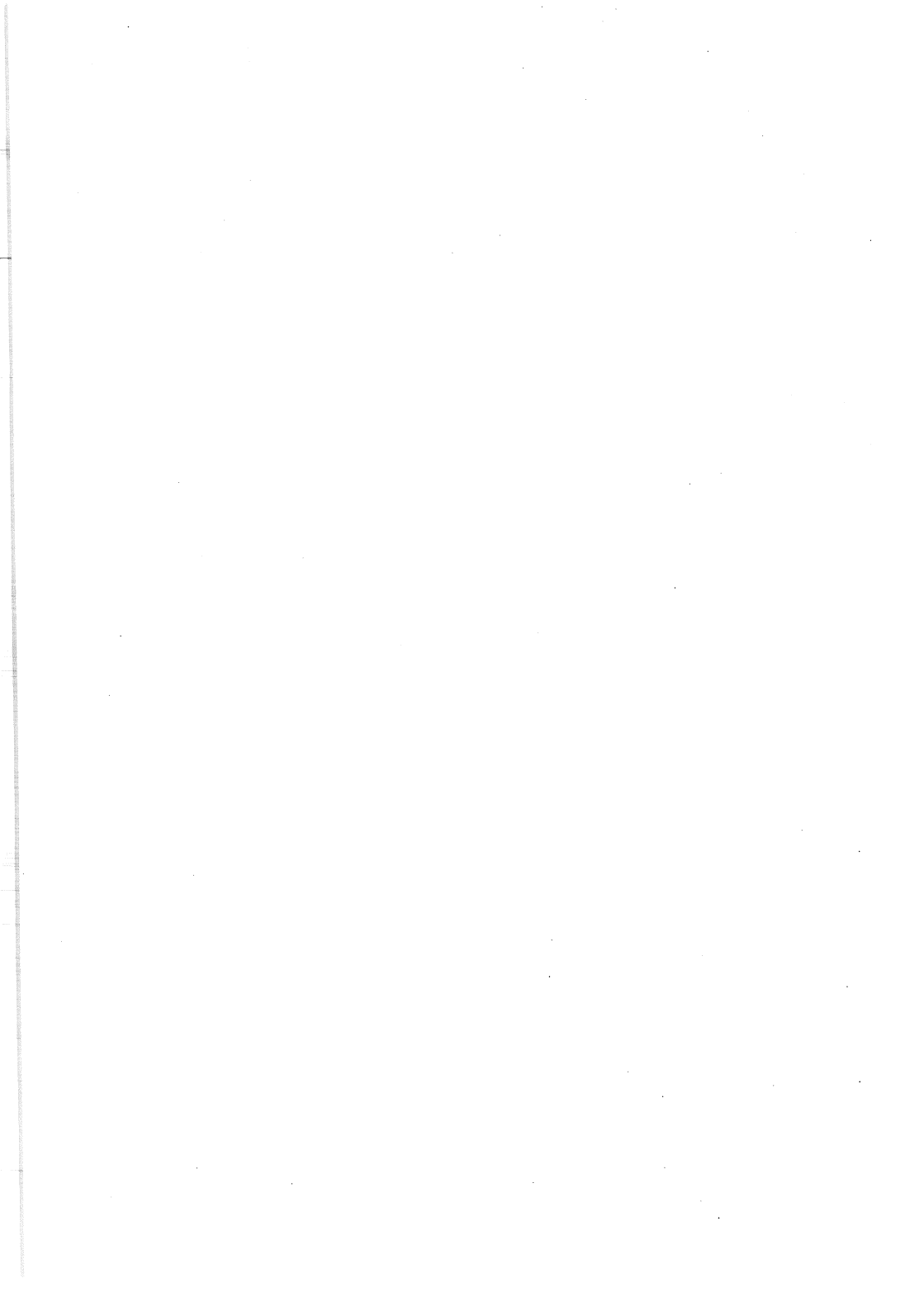


Strategi Bertahan Hidup :
STUDI ETNOGRAFI BUDAYA
MASYARAKAT PULAU BAWEAN



Strategi Bertahan Hidup :
STUDI ETNOGRAFI BUDAYA
MASYARAKAT PULAU BAWEAN

Oleh :
Abdul Rachman Patji
M. Alie Humaedi
Muhammad Asfar Marzuki
Surmiati Ali



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Strategi Bertahan Hidup pada Masyarakat Pulau Kecil dan
Terpencil/ Abdul Rachman Patji, Alie Humaedi, M. Asfar
Marzuki, Surmiati Ali – Jakarta: LIPI Press, 2010.

vi hlm + 129 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-596-6

1. Human Ecologi

304.2

Penerbit: **LIPI Press, Anggota Ikapi**



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

PRAKATA

Penelitian mengenai strategi bertahan hidup pada masyarakat pulau kecil dan terpencil, yaitu Pulau Bawean, ternyata sangat menarik karena beberapa hal. *Pertama*, meskipun pulau ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan struktur pemerintahan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, namun karakter masyarakatnya sebagai perantau (*migrant*) lebih dominan dari kelompok masyarakat lainnya di Gresik, juga di Jawa Timur. Para perantau Bawean, dilihat dari segi destinasi perantauan, lebih menyukai merantau ke luar negeri (Singapura, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Pulau Christmast – Australia, dan lainnya) daripada merantau ke daerah lain di Indonesia.

Kedua, oleh karena merantau sebagai strategi bertahan hidup yang utama bagi hampir semua keluarga atau rumah tangga di pulau ini dan hasilnya yang cukup memberikan peningkatan terhadap kehidupan dan kesejahteraan ekonomi, menyebabkan kegiatan-kegiatan lainnya seakan-akan hanya menempati “penyanggah” atau strategi sekunder terhadap kehidupan mereka. Kegiatan nelayan dan pertanian, misalnya, dilakukan karena lebih didorong oleh adanya lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan daripada melakukannya secara intensif untuk menjadikannya sebagai sumber modal dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam pengertian, merantau tetap menjadi yang pertama dan utama dalam upaya orang Bawean memenuhi kehidupan ekonominya. Demikian pula, etos kerja merantau ke luar negeri yang tinggi dianggap sebagai sesuatu yang sangat sinkron dengan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada ajaran Islam, agama yang dianut oleh semua orang Bawean. Ada pepatah Bawean menyatakan bahwa:

“Dimana ada orang Bawean, di situ aman;
karena mereka pergi [merantau] dengan agamanya (Islam)”

Ketiga, tampaknya merantau pada saat ini bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga-keluarga Bawean, tetapi juga sudah meliputi upaya guna peningkatan pembangunan masyarakat dan Bawean sebagai pulau kampung halaman. Hal ini khususnya berkaitan pembangunan di bidang sarana dan pendidikan agama. Di semua desa, kampung yang ada di pulau Bawean semua masjid dan sekolah agama, termasuk pesantren, dibangun secara sangat memadai, indah dan kokoh. Dalam perkataan lain, pada saat ini merantau adalah untuk keluarga, masyarakat dan pulau kampung halaman.

Selain soal rantau, penelitian ini semakin menarik karena beberapa persoalan yang juga diteliti. Di dalamnya ada persoalan etos Islam masyarakat Bawean yang diimbangkan dengan tradisi merantau; persoalan nelayan Bawean yang mendapatkan tentangan berat dari masuknya para nelayan andon dari Jawa; dan persoalan budaya ketahanan pangan di tengah keterbatasan tenaga kerja dan merebaknya pasokan makanan dari Jawa.

Sebagai penutup, penelitian ini tidak akan terwujud bila tidak mendapatkan dana dari program Insentif Peneliti dan Perekayasa kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi. Atasnya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Laporan ini juga tidak dapat terwujud sebagaimana yang bisa ditampilkan sekarang sekiranya para penulis/peneliti tidak mendapat bantuan dan dukungan berbagai pihak.

Pertama-tama kami menghargai saran, kritik, yang disampaikan oleh Dr. Jazuni, S.H, M.H, seorang tokoh Bawean di Jakarta dalam acara seminar riset desain. Juga kami telah mendapatkan banyak bantuan informasi dari segenap lapisan masyarakat di dua kecamatan di Pulau Bawean (Sangkapura dan Tambak) pada dua acara seminar, tepatnya FGD (*Focussed Group Discussion*) sebagai salah satu metoda dalam penelitian, selain wawancara mendalam yang dilakukan secara intensif. FGD diadakan

di masing-masing ibukota kecamatan. Selain, itu kami telah diterima dengan sangat baik dalam berbagai momen wawancara yang intensif dengan beberapa narasumber: tokoh masyarakat, ulama, guru sekolah dan pesantren, pimpinan dan aparat pemerintahan di dua kecamatan, serta warga masyarakat yang sengaja kami wawancarai di kapal penyeberangan, pasar, kedai atau warung makan, bengkel motor, dan lain sebagainya. Kepada semuanya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Agustus 2011

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I STRATEGI BERTAHAN HIDUP: SUATU ETNOGRAFI MASYARAKAT PULAU BAWEAN1 <i>M. Alie Humaedi</i>	
1.1 Masyarakat di Negeri Penuh Pulau: Antara Kelebihan dan Keterbatasan	1
1.2 Mempersoalkan Kemampuan Bertahan Hidup.....	5
1.3 Kapasitas Bertahan Hidup: Kerangka Pemikiran.....	6
1.4 Pentingnya Pengungkapan Strategi Bertahan Hidup	12
1.5 Cara Pengungkapan Strategi Bertahan Hidup: Metode	12
1.5.1 Pendekatan	12
1.5.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	13
1.5.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	14
1.6 Susunan Hasil Penelitian	15
Pustaka Acuan	17
BAB II MIGRASI ORANG BAWEAN	19
<i>Abdul Rachman Patji</i>	
2.1 Sebuah Tradisi Kebudayaan dan Keberlangsungan Hidup Ekonomi.....	19
2.2 Ekonomi Bawean, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar.....	22
2.3 Sejarah Migrasi Orang Bawean	25
2.4 Proses, Prosedur dan Pengawal Migrasi	30
2.5 Destinasi dan Keadaan di Rantau (Luar Negeri) Orang Bawean	37
2.6 Penutup	39
Pustaka Acuan	39

BAB III ETOS KERJA (ISLAM) ORANG BAWEAN..... 41

Muhammad Asfar Marzuki

3.1 Pengantar	41
3.2 Agama dan Etos Kerja.....	43
3.3 Islam dan Etos Kerja.....	44
3.4 Kewajiban Bekerja	45
3.5 Bekerja Sebagai Ibadah	48
3.6 Etos Kerja Orang Bawean	59
3.7 Penutup.....	66
Pustaka Acuan	67

BAB IV NELAYAN BAWEAN..... 69

Surmiati Ali

4.1 Pengantar	69
4.2 Keadaan Penduduk dan Pendidikan.....	71
4.3 Mata Pencaharian dan Kondisi Perekonomian	72
4.4 Pencurian Ikan dan Kondisi Perairan.....	77
4.5 Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Persoalan.....	84
4.6 Penutup.....	85
Pustaka Acuan	86

BAB V BUDAYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PULAU BAWEAN

M. Alie Humaedi

5.1 Mempersoalkan Keterbatasan: Pengantar.....	87
5.2 Pola Ketahanan Pangan: Suatu Kerangka Pemikiran	89
5.3 Bawean: Suatu Amatan Keterpencilan	93
5.4 Kebanyakan Migrasi: Susahnya Menilai Demografi	97
5.5 Kebudayaan Material yang Terlihat: Kegamangan atau Berlebihan Melangkah.....	101
5.6 Mencari Celah Ketahanan Pangan.....	105
5.7 Tiga Desa Tiga Wajah Strategi Ketahanan Pangan	114
5.8 Fungsi Sosial Ekonomi <i>Durung</i>	119
5.9 Penutup: Etos Kreatif dalam Budaya Ketahanan Pangan	126
Pustaka Acuan	127

BAB I

STRATEGI BERTAHAN HIDUP SUATU ETNOGRAFI MASYARAKAT PULAU BAWEAN

M. Alie Humaedi

1.1 Masyarakat di Negeri Penuh Pulau: Antara Kelebihan dan Keterbatasan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Sedikitnya terdapat 13.677 pulau besar dan kecil (PNPL 1977:454), bahkan ada yang menaksir jumlahnya mencapai 17 ribu pulau (Muhammad 2007). Pulau ini membentang dari Sabang sampai Merauke, dan membujur dari Miangas ke Rote. Dari sekian banyak pulau, secara geografis setidaknya ada pulau yang dikategorikan sebagai pulau kecil dan terpencil, pulau perbatasan (daerah dalam negara; tetapi berbatasan dengan wilayah negara lain); dan pulau yang dikategorikan sebagai pulau sengketa, baik dalam soal fakta (*de facto*) maupun hukum (*de jure*) kepemilikan, tapal batas dan pengelolaan yang di atasnamakan oleh negara ataupun pihak non-negara.

Tiga kategori pulau tersebut sengaja menyampingkan kategori pulau-pulau besar yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dan pengembangan kawasan, juga kategori pulau yang telah menjadi *pilot project* pembangunan akibat sentuhan negara dan perusahaan, seperti beberapa pulau di Kepulauan Riau (Kepri), yaitu Batam, Rempang, Galang, Bintan, dan sebagainya. Dalam kesejarahannya, pulau seperti ini kebanyakan berada dalam lalu lintas perniagaan internasional. Pada abad silam, kapal-kapal dagang dari berbagai negara yang melayari kawasan itu mengincar Kepulauan Riau yang kaya bauxit, timah serta minyak. Beberapa saat kemudian, pulau-pulau ini menjadi mega proyek pengembangan kawasan. Dengan dalih wilayah strategis di bidang ekonomi dan pertahanan keamanan,

konsentrasi pemerintah dalam soal pengembangan wilayah kepulauan selalu berorientasi dan memprioritaskan pulau-pulau seperti ini saja.

Implementasi teori balon yang diusulkan Habibie tahun 1997 untuk pengembangan kawasan Bareleng (Batam-Rempang-Galang) yang dibangun jadi satu kesatuan ekonomi,¹ mirip Benelux (Belgia-Netherlands-Luxemburg) misalnya, adalah salah satu contoh dari konsentrasi pemerintah saat itu.² Selanjutnya, untuk mendukung dan mengamankan implementasi itu, sektor ketahanan dan keamanan ditingkatkan.³ Ketika konsentrasi dan prioritas pembangunan nasional hanya berada pada pulau-pulau yang dianggap strategis secara ekonomi dan memiliki fungsi strategis di bidang ketahanan keamanan, maka pulau kecil terpencil dan beberapa pulau berkategori lain yang tidak memiliki kedua fungsi seolah dilupakan.

¹BJ. Habibie memperkenalkan 'Teori Balon' untuk mengembangkan perekonomian di kawasan Bareleng. Konsep ini pertama kali dikemukakan di hadapan Menteri Senior Lee Kuan Yew. Habibie mengatakan, perekonomian Singapura dan kawasan sekitar diibaratkan 'suatu sistem balon' yang dihubungkan satu sama lain dengan katup. Alasan penggunaan katup yakni apabila salah satu balon terus menerus memuai, maka suatu saat tekanannya akan melebihi titik kritis sehingga bisa pecah.

²Sebagai persiapan, Habibie membangun 6 Jembatan Bareleng untuk menghubungkan Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Pulau Tonton, Pula Nipah, Pulau Setoko, dan Pulau Galang Baru.

³Revitalisasi institusi koordinasi keamanan laut yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 81 Tahun 2005 misalnya diarahkan dan diprioritaskan kepada wilayah-wilayah laut yang berada di pulau-pulau perbatasan. Dalam Peraturan Pemerintah itu, Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas pokok: mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu; perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, serta koordinasi kegiatan keamanan laut yang meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia, terlebih di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah strategis lainnya.

Dari tiga kategori pulau berbeda di atas, setidaknya terdapat satu titik kesamaan, yaitu pembangunan nasional belum begitu dirasakan oleh masyarakatnya. Hal ini tentu membuat masyarakat pulau jauh tertinggal dari kemajuan bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya dibandingkan daerah lain. Aksesibilitas masyarakat untuk keluar dan masuk juga masih sangat sulit dan terbatas. Dalam perkembangan terakhir, masyarakat di beberapa pulau mulai mengadopsi tatanan sosial politik dan budaya dari negara lain yang berbatasan, berdekatan, atau memiliki hubungan langsung secara ekonomi dan sosial dengan pulau-pulau ini.

Kenyataan sosial yang serba sederhana dan terbatas di atas semakin diperkuat dengan hadirnya “memori lama” kebanyakan orang, sehingga pulau dengan tiga kategori yang disebutkan itu, terlebih pada pulau kecil dan terpencil yang ada di Nusantara akan selalu dinarasikan sebagai wilayah sosial tradisional, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Apapun persepsinya, kesan tradisional ini menunjuk pada satu kualitas kultural yang jumud, tidak maju, dan seolah tidak memiliki “peradaban”. Label ini seakan menemukan konteks faktualnya jika dikomparasikan dengan realitas sosial yang tercermin dari infra dan supra pembangunan masyarakat yang berada di luar pulau-pulau ini.

Di pulau-pulau kecil dan terpencil sekalipun merupakan pulau perbatasan antar negara, tidak memperlihatkan satu progresifitas pembangunan yang memadai. Semua berjalan secara natural, tidak lahir dari suatu proyeksi sosial yang matang dan terencana. Pada saat kemudian, pulau seperti ini tidak jarang menjadi pulau sengketa yang “hendak diakui” dalam soal pemilikan dan pengolahan oleh berbagai pihak. Kenyataan seperti ini akan berbeda jauh dengan pulau lain, terlebih yang berada di pusat-pusat “peradaban Indonesia”. Jika tidak segera dibenahi, pulau kecil dan terpencil akan tampil dalam bentuknya yang tradisional untuk selamanya.

Dengan melihat kondisi di atas, sepertinya secara politik, masyarakat kepulauan rata-rata tidak tumbuh dengan skema perencanaan pembangunan nasional yang digariskan oleh pemerintah

Indonesia. Secara ekonomis, masyarakat pulau, semisal pulau Bawean justru akan dan mampu berkembang tanpa campur tangan negara. Melalui sistem *rantau* yang tidak bertumpu pada bentuk formalisasi ketenagakerjaan dari negara, mereka telah mampu membiayai kebutuhan sosial ekonomi. Mereka kemudian tampil sebagai masyarakat mandiri yang tidak tergantung kepada negara. Inilah salah satu aspek terpenting strategi bertahan hidup dalam karakter khasnya.

Keadaan semacam ini berjalan dalam tempo yang sangat lama. Ironisnya, negara malah diuntungkan oleh akumulasi devisa masyarakat perantauan. Semangat dan strategi bertahan hidup yang bersifat lokal tersebut memberi imbas luar biasa bagi perekonomian negara, dan juga menghadirkan alternatif-alternatif baru dari apa yang disebut dengan bukaan sosial (*social opening*) dalam persoalan kebudayaan masyarakat, seperti apa yang diungkapkan oleh Anthony Giddens (1983).

Meskipun di bidang sosial ekonomi, dengan dukungan kegiatan merantau atau migrasi khususnya ke luar negeri, masyarakat Bawean sudah mampu bertahan hidup, namun pembangunan dan pengembangan beberapa aspek lain, terutama pada bidang infrastruktur tetaplah merupakan kewajiban pemerintah. Ketika penelitian dilaksanakan, jalan lingkaran pulau sepanjang sekitar 60 km yang melalui wilayah dua kecamatan – Sangkapura dan Tambak, dapat 70 persen dalam kondisi rusak. Dampaknya tentu saja menghambat.

Bila pembangunan hadir dalam ranah masyarakat pulau, sering terjadi perbenturan tidak kalah seru dalam persoalan rasionalisasinya dengan konsepsi kebudayaan setempat. Di satu sisi, pembangunan identik dengan kemajuan, dan kemajuan itu pada zaman sekarang diletakkan dalam bingkai modernisasi dan globalisasi. Berhasil tidaknya program pembangunan daerah kemungkinan besar akan dilihat dari fitur modernisasi dan globalisasi yang terdapat di daerah itu.

Pembangunan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka akan mengambil alih ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang bersifat ekspertis, bebas, kompetitif, hedonistis dan mengarah kepada

monodimensi nilai yang bertabrakan dengan tatanan mitologi, tradisi budaya, dan etika lama yang bersifat kosmis. Di sisi lain, otentisitas dan integritas “jati diri masyarakat pulau yang kerap mempraktikkan strategi bertahan hidup” dari ragam keterbatasan semakin sulit dihayati dan dipertahankan. Tidak jarang, di sana sini akan terjadi apa yang disebut “manipulasi psikis” dalam praktik-praktik kebudayaan mereka di kemudian hari yang sama bahayanya dengan serangan fisik negara lain dalam sektor pertahanan keamanan.

1.2 Mempersoalkan Kemampuan Bertahan Hidup

Dalam menyikapi pembangunan pada masyarakat pulau, suatu kerangka orientasi transsidental, yakni potensi etis moral dan strategi kebudayaan untuk bertahan diri yang ada di masyarakat dalam merespon “paksaan sosial” berupa pembangunan itu (Sinaga 1996:23-24) tetap dibutuhkan. Karena bagaimana pun, pembangunan cenderung membawa kepada fenomena “pincang kebudayaan”, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat belum memahami dan menguasai kebudayaan baru, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, tetapi sudah buru-buru “melupakan” religi dan budaya tradisional karena dianggap tidak relevan (Simanjutak 1984:4).

Dengan kenyataan seperti ini, patut diajukan tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana strategi bertahan hidup yang dibangun, dikenal, dan dijalankan oleh masyarakat di pulau kecil dan terpencil, pulau perbatasan dan pulau sengketa? *Kedua*, bagaimana strategi bertahan hidup dalam nilai kebudayaannya dipraktikkan ketika ada unsur-unsur kebudayaan luar? Apakah mungkin “katup pengaman” dapat hadir bersamaan dengan proses itu? *Ketiga*, bagaimana cara “pembangunan” yang selalu berorientasi pencapaian material dan kemajuan teknologi sebagai “kebudayaan luar” atau bisa dikatakan “kebudayaan nasional” itu dapat masuk ke wilayah kepulauan yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang kerap dianggap marjinal?

Dengan harapan dapat menemukan jawaban terhadap hal-hal yang dikedepankan pada latar belakang dan permasalahan di atas, termasuk mencari penjelasan responsif terhadap tiga pertanyaan

penelitian, maka penelitian berorientasi pulau-pulau ini pada tahun 2010 dilaksanakan pertama kali di Pulau Bawean. Pulau Bawean secara administratif pemerintahan termasuk wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur; letaknya dari kota Gresik (ibukota kabupaten) sekitar 150 km ke arah utara wilayah Laut Jawa. Pada saat ini, Pulau Bawean dapat dicapai dari Gresik dengan kapal lambat selama kurang lebih 10 jam dan kapal cepat sekitar 4-5 jam. Pulau Bawean terbagi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura di bagian selatan dan Kecamatan Tambak di bagian utara. Dua kecamatan tersebut menjadi lokasi dari penelitian ini.

1.3 Kapasitas Bertahan Hidup: Kerangka Pemikiran

Memahami masyarakat di kepulauan, berarti memahami mereka yang menetap di luar *central area for development* yang serba kekurangan, baik kekurangan distribusi otoritatif, distribusi konsumsi, dan distribusi ekonomi. Selain itu, lokalitas wilayah yang secara diametral pun berbeda dengan wilayah-wilayah sentral otoritatif yang dipatenkan melalui otoritas besar (nasional dan regional).

Pengandaian yang mungkin terlalu besar ini diilhami dari kalimat sederhana Muhammad Hatta, "*Small is Beautiful*". Pulau adalah kecil dan serba terbatas, tetapi indah penuh sensasi kebudayaan, dari *arcade* peradaban sampai penciptaan dan penyelarasan katup pengaman dalam strategi bertahan hidupnya. Jati diri kepulauan yang ada pada sistem nilai kebudayaan mereka dapat diilustrasikan sebagai noktah yang menyusun atau membentuk narasi besar kebangsaan.

Pulau Bawean yang menjadi lokasi penelitian pada tahun 2010, apabila dilihat pada peta Indonesia, memang hanyalah sebuah "titik". Luasnya, sebagaimana dikemukakan dalam beberapa buku dan tulisan lepas hanya sekitar 200 km² (Vredembregt, 1990:13). Apabila dalam kondisi bagus pulau ini dengan jalan lingkaran sekitar 80 km ini bisa dikelilingi dalam tempo 3-4 jam. Dalam beberapa tulisan pulau kecil yang dijuluki pulau "ada sinar matahari" (Widodo, dkk., 2001) ini memang tidak terlalu jauh dari renungan Muhammad Hatta – "*Small is*

Beautiful” di atas, sebab pulau ini memang cukup penuh dengan keindahan alam lingkungannya, sejarah, adat-istiadat dan tradisi kebudayaan masyarakatnya, serta keramah-tamahan penduduknya.

Dalam paradigma developmentalisme sentralistik sebelumnya, daerah dibagi ke dalam dua bagian: pusat dan pinggiran. Daerah pusat mendapatkan skala prioritas yang maksimal. Seluruh fokus pembangunan terkonsentrasi di daerah pusat. Sementara daerah pinggiran terlebih wilayah kepulauan dipersepsi akan mengikuti gerak pertumbuhan daerah pusat seperti tercermin dalam kebijakan *trickle down effect*. Asumsinya, jika daerah pusat maju, maka daerah pinggiran yang mengitarinya juga terkena imbas (kemajuan)nya.

Dalam tata pembangunan Orde Baru, daerah pusat pembangunan adalah Jawa. Seluruh proyeksi pembangunan ditempatkan di pulau Jawa, bahkan menjadi area pusat gravitasi (*central gravity*), tempat memusatnya seluruh asset yang karena itu kekayaan daerah tersedot ke kantong-kantong kapital pembangunan daerah pusat. Jawa tampil sebagai daerah berkemakmuran (surplus). Sementara daerah pinggiran terutama wilayah kepulauan meskipun masih di Jawa sekalipun tetap tampil dengan segala kekurangan dan keterbelakangan (*deficit*). Dengan demikian, sesungguhnya keterbelakangan masyarakat di pulau-pulau kecil dan terpencil, pulau perbatasan, dan pulau sengketa di Nusantara dengan segala indikatornya terlahir dari sistem ketimpangan pembangunan selama ini.

Hal ini selaras dengan teori *Indic-cosmology* (Geertz 1960) ”untuk mempertahankan kekuasaan pusat, maka daerah pinggiran harus diperlemah, agar sentra baru yang menjadi pesaing tidak muncul.” Demikian juga dengan Benedict Anderson (2002) dalam essay *Language of Power*nya. Dalam kaca mata pemerintahan Feodalisme Jawa, hanya ada dua: yaitu pulau utama dan ”Sabrang” atau *the rest of the Javaneese Island*. Konsekuensinya, daya ekonomi dan sosial politik selalu bersifat *leapfrogging* dimana pembangunan di pulau utama selalu didahulukan dibandingkan dengan ”pulau pulau sisa”nya.

Karena itu, identifikasi kepulauan dengan atribut tradisional dan terbatas, sebenarnya secara politik menjadi tanggungjawab negara. Sebab negara telah mengkondisikan masyarakat ke dalam satu situasi sosial dan kultural yang terbelakang. Negara telah melakukan rekayasa politik sistematis melalui kebijakan dan birokrasi eksploitatif sehingga daerah terfragmentasi ke dalam kategori-kategori yang timpang dan tidak adil. Daerah yang lahir dari sistem seperti ini akan tumbuh dengan masalah sangat kompleks: pendidikan rendah, pangan terbatas, ekonomi lambat, kesejahteraan masyarakat rendah, pembangunan tidak merata, mutu pelayanan sosial rendah dan sebagainya. Karena itu, untuk mengatasi serba keterbatasan itu, dengan sadar dan secara alami penduduk di kepulauan melalui rekayasa social kemudian melakukan terobosan-terobosan untuk bertahan hidup dalam berbagai aspek. Rekayasa sosial mereka selalu ditumpukan pada sistem religi dan budaya tradisional yang dimiliki.

Berbicara tentang pulau, sebenarnya berbicara tentang kampung halaman seperti pada masyarakat umumnya. Orang akan segera membayangkan orang-orang tua beserta adat istiadat tradisional. Kampung halaman adalah tempat dimana religi dan budaya tradisional “dihidupi” sebagai yang “menghidupkan” kehidupan masyarakat setempat, terlebih dalam realitas kehidupan masyarakat pulau. Oleh karena itu, dalam konteks kepulauan, menelisik berbagai fenomena yang berhubungan dengan strategi bertahan hidup dari “kelangkaan” pembangunan yang bersifat nasional itu dan keterbatasan dalam berbagai aspek, berarti tidak bisa tidak harus sekaligus memberi tempat bagi religi dan budaya tradisional masyarakat setempat.

Kebanyakan orang, khususnya yang berasal dari luar kebudayaan, berpikir bahwa religi dan budaya tradisional terutama di wilayah kepulauan selalu bersifat tertutup dan tidak mau menerima modernisasi. Tidak jarang sebutan *wong sabrang*, udik, dan *kampung* kerap terlontar bagi orang yang mendekati diri dengan wacana religi dan budaya tradisi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat hubungan sosial ekonomi politik masyarakat antar

pulau. Hal ini barangkali benar bila religi dan budaya tradisi ditempatkan sejauh bukan sistem nilai yang dihayati bersama.

Namun, bila religi dan budaya tradisional masih menjadi sistem nilai yang dihayati bersama dalam praktek hidup keseharian, ia bisa menjadi kekuatan sosial yang disadari oleh masyarakat pengguna. Di kampung halaman berupa pulau ini, religi dan budaya "strategi bertahan hidup" secara tradisional itu bisa menjadi kekuatan sosial karena masyarakat setempat masih menghayati nilai-nilainya secara kolektif. Kebudayaan sebagai suatu nilai yang "utuh" serta konstitutif bisa berfungsi sebagai kekuatan sosial nyata pada tempat dan waktu tertentu (Pabottinggi 1983:53) yang kekuatannya dapat berguna bagi eksistensi dan jaminan sosial bersama warga.

Tetapi di sisi lain, kebudayaan juga bila dikemas dengan baik merupakan salah satu kekuatan utama yang berperan dalam proses "masuk atau keluarnya" suatu masyarakat dari jerat kapitalisme (Prisma 1983). Kebudayaan semacam ini diasumsikan bukan sekadar ornamen-ornamen kesenian, atau dalam bahasa Andy Warhol (2007) adalah *arcade* peradaban saja. Salah satu cara kemasan yang dianggap baik adalah transfer kebudayaan dari pihak luar (para pembangun) dengan kebudayaan masyarakat (yang akan dibangun atau dikuasai). Melalui transfer budaya, pihak luar khususnya pemerintah sebenarnya telah terhindar atau diamankan dengan sendirinya dari tuntutan rasa keadilan sosial masyarakat kepulauan yang kerap dilupakan keberadaannya.

Pengaruh demonstratif dari modernisasi pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi massal misalnya, ternyata mengakibatkan masyarakat tradisional seperti di kepulauan itu seolah-olah ikut serta untuk melakukan proses produksi-konsumsi di berbagai sektor informal dengan barang (jenis dan merek) dan jasa yang serupa atau mirip dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor formal. Sayangnya, aspirasi gaya hidup modernitas yang dengan sendirinya dapat ditransfer dari pihak luar yang berkategori modern dan hebat kepada kelompok yang kerap diasumsikan tradisional itu tidak diikuti dengan transfer

dalam soal pemilikan, akses penyebaran dan pemerataan ekonomi. Strategi bertahan hidup berdasarkan kebudayaan yang ada sebelumnya harus selalu disesuaikan, atau bisa jadi mereka tetap dengan menggunakan strategi lama, tetapi juga menciptakan model-model baru dalam strategi bertahan hidup dalam beberapa persoalan yang dianggapnya baru.

Harus diakui bahwa proses transfer seperti di atas mengandung upaya “eksploitasi” dari pihak luar terhadap masyarakat yang dianggap marginal. Proses seperti ini selalu berujung pada ”segmentasi kebudayaan”. Segmentasi inilah yang juga telah ikut memudahkan solidaritas sosial horizontal secara kolektif dan luas di kalangan masyarakat sendiri. Tiap-tiap segmen bisa mengalami isolasi dan polarisasi identitas serta kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain atau tidak pernah ada kesamaan kepentingan yang dapat mempersatukan. Hal ini semakin dirunyamkan bila terdapat kendala dalam pranata kelembagaan sosial-politik dan ekonomi yang segmentatif dan korporatif.

Akibatnya, jejaring kebudayaan di masyarakat kemudian terjadi secara horizontal, di mana hubungan pertentangan itu bersifat pragmatis. Pertentangan yang ada sekadar untuk mempertahankan diri (*survival*) atau untuk menyesuaikan diri (*adaptive strategy*). Proses ini tidak berujung pada usaha “bumper” atau penciptaan “katup pengaman” bagi stabilitas kebudayaan yang dimilikinya. Padahal dengan hadirnya “katup pengaman” itu, maka *social overhead* akan terjadi melalui proses reproduksi kebudayaan yang dianggap cocok dengan kebudayaan setempat.

Katup pengaman di atas sebenarnya bisa saja muncul bersamaan dengan strategi bertahan hidup pada masyarakat, apalagi ada sebuah keniscayaan bahwa setiap masyarakat memiliki “moralitas alami” (*natural morality*).⁴ Menurut Barrington Moore

⁴Walaupun ”moralitas alami” bersifat mandiri dan berada mendahului struktur sosial dan proses produksi kebudayaan, ini tidak berarti bahwa ia kebal dari pengaruh dan limitasi struktur serta pranata kelembagaan sosial

(1978),moralitas alami ini yang merupakan dasar bagi legitimasi sosial. Keberadaan moralitas seperti ini mendahului dan bersifat independensi dari struktur sosial yang ada di masyarakat. Moralitas alami yang pada gilirannya menciptakan visi dan etika tentang jaminan sosial, rasa keadilan, kebersamaan, solidaritas, toleransi, etos, eksistensi diri, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Barrington Moore, di atas moralitas ini pula kontrak dan kebersamaan sosial dibangun dan diberi legitimasi sosial oleh anggota-anggota masyarakat yang tujuannya untuk melindungi semua kepentingan dan alat penjamin pemenuhan kebutuhan mereka.⁵

politik dan ekonomi dari pihak luar. Frank Broeze misalnya menyatakan bahwa melihat masyarakat pada suatu konteks ruang seperti kepulauan harus memerhatikan tiga hubungan, yaitu i). Hal ini berarti, bagaimana pun tradisional dan otentiknya strategi bertahan hidup masyarakat kepulauan sebagai moralitas alami itu tetap ada sentuhan pengaruh dari pihak lain.

⁵Dalam moralitas alami sebagai dasar kontrak sosial ini ditemui tiga dimensi utama yang berperan dalam memengaruhi aktivitas dan kehidupan sosial masyarakat. *Dimensi pertama*, batasan terhadap kekuasaan atau otoritas sosial, yakni berhubungan dengan mereka yang diberi otoritas untuk berkuasa dan sampai seberapa jauh kekuasaan itu masih didukung-dipatuhi. Sementara itu, bagi kelompok masyarakat yang dikuasai, mereka dituntut untuk patuh dan mendukung terhadap rumusan yang sudah termaktub dalam kontrak sosial. Melalui proses seperti ini, maka kekuasaan kemudian diberikan legitimasi. *Dimensi kedua*, pembagian kerja (*the division of labor*), yakni di mana legitimasi moral berperan dalam merumuskan pembagian kerja yang bisa menjaga keseimbangan sosial antar para anggota masyarakat supaya mereka selalu tetap di dalam posisi yang padu dan utuh, sehingga memungkinkan strategi bertahan hidup dilakukan secara bersama-sama. *Dimensi selanjutnya*, distribusi sumber daya (barang dan jasa). Masalah ini juga harus didasarkan pada rasa keadilan dan perlindungan hak bagi anggota dalam masyarakat, sehingga subsistensi ekonomi yang ada dapat diatasi bersama (Wirahadikusumah 1989). Pelanggaran terhadap kewajiban dan batasan moral ini pada gilirannya akan menimbulkan keberangan moral dan seterusnya bisa juga menciptakan berbagai perlawanan sosial, alienasi, konflik sosial yang membahayakan kehidupan bersama.

1.4 Pentingnya Pengungkapan Strategi Bertahan Hidup

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: *pertama*, mengetahui strategi bertahan hidup yang dibangun, dikenal, dan dijalankan oleh masyarakat di pulau kecil dan terpencil, pulau perbatasan, dan pulau sengketa, sebagai upaya memetakan dan mengeksplorasi daya juang, daya saing, serta semangat dan praktik kemandirian yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi persaingan global; *kedua*, memetakan secara komprehensif elastitas nilai-nilai kebudayaan lokal dalam menghadapi kebudayaan luar, khususnya saat menciptakan "katup pengaman" untuk mencegah terjadi benturan kepentingan dan konflik dalam masyarakat. Pemetaan terhadap aspek ini menjadi penting sebagai media penyusunan rekayasa sosial yang berkesesuaian dengan kehidupan masyarakat pulau; *ketiga*, menjelaskan cara kebudayaan nasional, seperti pembangunan beserta agennya masuk ke dalam kehidupan masyarakat pulau. Hal ini digunakan untuk melihat sejauhmana keberhasilan pembangunan yang ada di pulau kecil dan terpencil, pulau perbatasan, dan pulau sengketa.

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah memberi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya para perencana dan pengambil kebijakan pengembangan kawasan masyarakat kepulauan berdasarkan temuan-temuan dari tujuan khusus di atas. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat pulau-pulau kecil dan terpencil tidak hanya dari sudut pandang nilai strategis pertahanan keamanan dan ekonomis saja, tetapi juga pada semua aspek struktural dan kulturalnya.

1.5 Cara Pengungkapan Strategi Bertahan Hidup: Metode

1.5.1 Pendekatan

Pendekatan dari metode etnografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi kebudayaan. Etnografi, khususnya pada aspek etnografi kebudayaan diperlukan tidak sekadar memberikan catatan perilaku dan praktek hidup individu di dalam masyarakat, tetapi juga mencari genealogi dari suatu atau beberapa aktivitas dan perbuatan yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat pada

satu kewilayahan. Oleh karena itu, melalui etnografi yang *thick description* seperti dilakukan Clifford Geertz (1960), persoalan sistem makna, sistem sosial, dan interpretasi dalam strategi bertahan hidup masyarakat kepulauan sebagai bagian dari strategi kebudayaan mereka dapat ditelusuri. Dalam soal substansi, tebal (*thick*) di sini lebih merupakan formulasi ke arah deskripsi yang mendalam, sehingga lukisan lebih berarti, bukan sekadar data yang ditumpuk. Memang etnografi bercirikan kelengkapan data, namun pembahasan juga mengandalkan akal sehat. Peneliti berusaha menangkap sepuh mungkin informasi budaya menurut perspektif orang yang diteliti.

1.5.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Berhubungan dengan metode dan pendekatan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam kebiasaan *field research* etnografis dan *library research*. Dalam *field research* etnografis yang *thick description*, cara-cara observasi partisipatif melalui *live in* dan dokumentasi visual akan dilakukan. Di dalam kegiatan tersebut akan dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada masyarakat terpilih dan wawancara spontan dengan para narasumber, khususnya para sesepuh dan tokoh masyarakat. Untuk menyimpulkan bahwa informasi itu bersifat umum dari masyarakat kepulauan, maka beberapa *Focus Group Discussion* (FGD) akan diselenggarakan.

Selain teknik pengumpulan data di atas, penelusuran data-data literatur, khususnya catatan-catatan masyarakat seperti *lontar*, *tambo*, *folklore*, dan *oral history* akan dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat informasi atau menjadi analisis perbandingan dari temuan-temuan di lapangan. Setelah data yang dikumpulkan dirasa cukup dan telah memenuhi fokus-fokus perhatian seperti yang akan dimuat dalam pedoman wawancara dan pengamatan, maka data itu dianalisis dengan menggunakan metode pengelompokan (kategorisasi), interpretasi atau penafsiran data, juga terhadap informasi hasil wawancara dan dokumen tertulis. Dari analisis

data ini akan didapatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan objek penelitian.

1.5.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian pada tahun 2010 ini berlangsung selama 10 bulan, dari bulan Januari sampai Desember 2010. Penelitian literatur dimulai pada Februari sampai Maret, dan penelitian lapangan dilakukan pada bulan April sampai Juni.

Sebelum menjelaskan lokasi penelitian tahun 2010, perlu ditegaskan di sini bahwa penelitian ini sifatnya adalah penelitian payung. Penelitian ini membutuhkan rentang waktu lama dan ketersebaran wilayah yang banyak. Pada tahun 2010 ini, lokasi penelitian ditentukan untuk mewakili pulau-pulau berkategori kecil dan terpencil. Dengan banyak pertimbangan, maka pulau Bawean beserta pulau-pulau kecil yang mengelilinginya diambil sebagai lokasi penelitian. Tahun 2011 dilakukan penelitian dengan tema sama, tetapi dengan wilayah berbeda, yaitu masyarakat yang berada pada kategori pulau-pulau perbatasan. Pulau Miangas di Sulawesi Utara akan diambil menjadi lokasi penelitian tahun 2011. Sedangkan penelitian pada tahun 2012 dilakukan untuk melihat masyarakat pulau yang berada pada kategori ketiga, yaitu pulau sengketa. Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur akan diambil sebagai lokasi untuk maksud tema yang sama. Dengan demikian, akan ditemukan bentuk-bentuk dan pola-pola yang khas dalam strategi bertahan hidup pada masyarakat pulau pada kategorinya masing-masing.

Mengapa pulau Bawean diambil sebagai lokasi penelitian tahun 2010, padahal pulau ini sendiri berada di Jawa? Secara geokultural, pulau Bawean menjadi unik, bahkan mendapat julukan sebagai pulau putri "*the virgin island*" dan Mekkahnya Indonesia. Ia berada di tengah antara dua pulau besar, yaitu pulau Jawa dan pulau Kalimantan. Sebagai pulau tengah, seharusnya ia diikat atau menjadi bagian penting dalam jaringan lalu lintas distribusi komoditas dan konsumsi pulau besar ini. Tetapi, letak yang strategis tidak begitu

dimanfaatkan masyarakat pulau ini. Untuk bertahan hidup, mereka memilih jalan lain, yaitu perantauan. Di samping juga pengelolaan lembaga-lembaga tradisi yang ada dan dikenal masyarakat, seperti *dhurung* (lambung padi), *pengawal* (pembawa tenaga kerja), dan lainnya.

Untuk kasus Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Gili dan Nosa misalnya, Vredenberg (1990) pernah menengarai bahwa fenomena perantauan ini telah dikenal masyarakat sejak abad XVIII. Masyarakat Bawean telah membangun jaringan perekonomian dan sosial genealogis ke beberapa negara di belahan Asia, seperti Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Melalui perantauan, mereka menciptakan mekanisme distribusi pemodal untuk membiayai seluruh kebutuhan sosial masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak merantau, mereka pun melakukan strategi bertahan hidup dalam keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki dengan cara unik lagi tradisional tanpa sentuhan negara. Bisa jadi, masyarakat kepulauan lain yang pola sosial budayanya mirip dengan pulau Bawean selama ini tumbuh dan berkembang tanpa pantauan negara.

Pulau Bawean sendiri merupakan gugusan pulau yang berada di wilayah kabupaten Gresik sejak tahun 1974. Luas wilayahnya kira-kira 625 km persegi (lebih besar sedikit dari Singapura) yang terletak 150 km utara Gresik. Pulau ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil seperti pulau Gili, Selayar, Nuko, Nosa, Karangbila, pulau Cina, dan lainnya. Secara administratif, pulau ini terbagi ke dalam dua kecamatan (Tambak dan Sangkapura), 30 desa dan sekitar 143 dusun atau kampong. Orang luar Bawean melihat Bawean dengan tiga keunikan; i) anyaman tikar Bawean; ii) ikan pindang; dan iii) sejenis rusa Axis Kuhli (Rusa Bawean).

1.6 Susunan Hasil Penelitian

Dalam buku ini sedikit banyak memaparkan analisis dari persoalan tarik menarik “perubahan” dan “model pembangunan” bagi masyarakat kepulauan (baca: Bawean), khususnya dalam hubungan

migrasi atau merantau yang banyak dilakukan oleh orang Bawean keluar pulau dan khususnya keluar negeri, etos kerja yang didasarkan kepada ajaran agama Islam yang dianut oleh semua orang Bawean, kehidupan nelayan sebagai sebuah profesi yang akrab bagi sebagian warga masyarakat pulau dan ketahanan pangan yang bertolak dari potensi kearifan lokal dihadapkan dengan sajian pangan yang berasal dari luar.

Hasil penelitian ini memfokuskan diri pada beberapa persoalan yang dianggap dapat mewakili strategi bertahan hidup masyarakat pulau. Persoalan pertama, sebagai refleksi sudut pandang, tertuju pada merantau sebagai bagian strategis bertahan hidup masyarakat pulau. Persoalan ini didasari pada asumsi bahwa bila pulau tidak mampu memberikan kesejahteraan, salah satu jalan keluarnya adalah mencari peruntungan di luar wilayahnya. Perantauan dapat dimaknai dua; merantau antar pulau, dan merantau antar negara. Dalam hal ini, migrasi yang ada tidak hanya dilihat sebagai peruntungan ekonomi, tetapi terkait erat dengan jejaring sosial yang dibangun sebelumnya.

Persoalan kedua, tertuju pada pengaruh religi dan adat terhadap pembentukan etos dalam kerja. Persoalan ini dilatarbelakangi oleh konsepsi bahwa manusia bisa berkarya, dan hasil karya itu dapat saja memenuhi kebutuhan hidupnya, bila di dalam diri individu mampu mengartikulasikan konsep kerja yang berasal dari sumber-sumber lingkungan dirinya secara benar. Kemampuan artikulasi biasanya berasal dari warisan antar generasi.

Persoalan ketiga, terkait erat dengan sumber daya alam atau artikulasi dari sudut pandang mengenai perkembangan wilayah. Persoalan ini melihat luasnya sumber daya laut sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. Sebagai wilayah kepulauan, yang pastilah akan dikelilingi oleh laut, tentu memiliki sumber daya perikanan yang cukup banyak dibandingkan dengan wilayah pesisir pulau besar yang dihuni jutaan penduduk, di mana telah terjadi *overfishing*. Persoalan ini bersangkutpaut dengan persoalan nelayan yang biasanya meliputi cara penangkapan dan pengolahan pasca penangkapan yang bisa diatur

untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan pokok harian masyarakat. Asumsinya adalah pengelolaan hasil tangkapan adalah kunci masyarakat dapat bertahan hidup.

Persoalan terakhir, sebagai usaha perangkaian sudut pandang secara etnografis, diarahkan pada pengungkapan budaya ketahanan pangan di tengah merebaknya jajanan dan budaya konsumsi lainnya. Asumsinya dilandaskan pada konsepsi bahwa tidaklah masuk akal bila suatu masyarakat yang tinggal di pulau, tidak memiliki kearifan lokal dalam soal pangan. Diversifikasi beserta cara pembudidayaan dan pengolahan pangan pasca panen tentu ada, seiring tumbuhkembangnya masyarakat kepulauan. Pangan tidak hanya diartikan beras, tetapi juga jenis-jenis lain, seperti sagu dan umbi-umbian. Demikian juga, cara pengolahan pasca panen pun pasti dikenal masyarakat. Terlebih ketika dahulu masyarakat Bawean mengenal *durung*, sebagai tempat olah dan simpan pangan hasil olahan di sawah dan hutannya. Pangan akan berkembang seturut temu-kenalnya masyarakat dengan jajanan yang berasal dari wilayah luar; dan pangan jenis lokal pun.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Taufik (ed). 1988. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- Anderson, Benedict. 2000. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Bourdieu, Pierre. 2003. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature Pierre Bourdieu*, Columbia: Columbia of University.
- Giddens, Anthony. 1983. *A Contemporary Criticique of Historical Materialism*. Barkeley: University of California Press.
- Kartono, Drajat Tri. 2004. *Orang Boyan Bawean: Perubahan Lokal dalam Transformasi Global*. Surakarta: Pustaka Caraka Surakarta.

- Latif, Abdul, HS dkk. 2003. *Mencipta Bawean: Antologi Gagasa Orang-orang Boyan*. Bawean: Boyan Publishing.
- Mohamad, Goenawan. 2005. "Sebuah Ruang, 17 Ribu Pulau". *Majalah Tempo*, Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan, 15-21 Agustus 2005.
- Moore, Barrington. 1978. *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*. New York: ME Sharpe.
- Simanjuntak, B.A. 1984. *Ungkapan Tradisional sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Depdikbud.
- Sinaga, Anicetus. 1996. *Imam Trinitar*. Jakarta: Obor.
- Vredenbregt, Jacob. 1990. *Bawean dan Islam*. Jakarta: INIS.
- Wirahadikusumah, Miftah. 1991. "Sektor Informal sebagai Bumper pada Masyarakat Kapitalis. Dalam *Prisma*, 5 Mei 1991. Jakarta: LP3ES.

BAB II

MIGRASI ORANG BAWEAN

Abdul Rachman Patji

2.1 Sebuah Tradisi Kebudayaan dan Keberlangsungan Hidup Ekonomi

Dalam sebuah karangan sebagai hasil penelitiannya berjudul “Pulau Putri: Kebudayaan Migrasi dan Dampaknya di Pulau Bawean”, Rebecca Soraya Leake (2009)¹ menyatakan di bagian kesimpulan antara lain:

“Di dalam daerah-daerah khusus juga ada kecenderungan migrasi yang jelas dan faktor ini menunjukkan pengaruh tradisi dan kebudayaan terhadap pola-pola migrasi ini.

Ternyata ada kebudayaan merantau di Bawean. Kebanyakan keluarga perantau mempunyai sejarah keluarga panjang bekerja di luar negeri dan biasa untuk kepala keluarga pensiun dan pulang ke Bawean waktu anaknya merantau. Walaupun alasan ekonomi (garis bawah oleh penulis sebagai penekanan) sering diberi sebagai alasan utama untuk bekerja di luar negeri, bisa dilihat bahwa tradisi ini merupakan sebagian dari kebudayaan Bawean. Pada umumnya orang laki-laki diharapkan pergi ke negara lain sedikitnya satu kali. Satu alasan untuk tradisi ini adalah untuk mencari nafkah dan mengirimkan uang balik ke Pulau Bawean karena ini menaikkan standar kehidupan untuk keluarganya”.

Mendukung tesisnya bahwa migrasi adalah sebuah tradisi dan kebudayaan Bawean, Rebecca memberi argumentasi, antara lain

¹Rebecca Soraya Leake, *Pulau Putri: Kebudayaan Migrasi dan Dampaknya di Pulau Bawean*, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS), Angkatan 28, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Juni 2009, hal. 51-52.

[adanya] sejarah keluarga [yang] panjang bekerja di luar negeri. Ia juga menyatakan bahwa pada umumnya orang laki-laki diharapkan pergi ke negara lain sedikitnya satu kali. Dari argumentasi berdimensi kultural tentang migrasi Bawean yang diberikan memang tampak dengan jelas bahwa bermigrasi, terutama ke luar negeri bagi masyarakat Bawean, memang sudah merupakan sebuah tradisi kebudayaan. Ia menjadi sebuah tradisi kebudayaan karena dalam khasanah budaya dan kebudayaan mereka bermigrasi atau merantau menjadi sebuah prasyarat yang semestinya didahulukan sebelum membentuk rumah tangga atau ikatan perkawinan. Disebutkan dalam suatu ungkapan, antara lain:

Jangan membuka sewek;
Kalau belum mengukir langit;
Dan jangan mengukir langit;
Kalau belum menguasai ilmu lahir dan batin.

Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa:

Jangan kawin;
Sebelum merantau;
Jangan merantau sebelum menguasai ilmu lahir;
[Ilmu lahir yakni mahir dalam permainan silat];
Jangan merantau sebelum menguasai ilmu batin;
[Ilmu batin yaitu tamat (khatam) Al-Quran, paham kitab Safinah, dan Mampu melagukan barzanj dengan bagus].

Pada ungkapan di atas, merantau diibaratkan sebagai "mengukir langit" sesuatu yang sangat fantastis dan merupakan suatu tantangan untuk dicapai bagi setiap manusia Bawean. Tentunya sedapat mungkin dilakukan salah satu anggota dari setiap keluarga. Seorang informan penelitian menyatakan bahwa "setiap rumah tangga di Bawean, pasti ada salah satu anggotanya yang merantau", di daerah mana saja. Hal itu memperlukumkan kepada kita semua bahwa masyarakat Bawean dan merantau dan/atau migrasi sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang lengket dengan kehidupan mereka.

Merantau, bagi para pemuda dan pemudi adalah suatu syarat sebelum memasuki perkawinan, membentuk mahligai rumah tangga. Ada pribahasa lain yang menyatakan bahwa "gantungkanlah cita-citamu setinggi langit" ternyata bagi orang Bawean sudah terlampaui karena, bagi mereka, bukan lagi hanya cita-cita yang perlu bersentuhan dengan langit, tetapi lebih jauh dari itu mereka ingin melukis langit. Langit dengan latar belakang warnanya yang biru sebenarnya sudah sangat indah, tetapi bagi orang Bawean, masih akan diperindah lagi melalui tindakan "melukis", yaitu dengan jalan merantau atau bermigrasi ke daerah/negeri lain.

Bertolak dari adanya ungkapan tersebut dan maknanya yang menekankan beberapa hal yang harus terpenuhi terlebih dulu sebelum merantau atau melakukan migrasi menunjukkan bahwa untuk merantau persiapan yang lengkap, matang, harus betul-betul dipersiapkan. Merantau bukan hanya mempersyaratkan adanya bekal biaya yang cukup atau segala sesuatu yang berwujud material, tetapi juga persiapan yang bersifat immaterial, yaitu bekal ilmu lahir dan batin. Meskipun tradisi merantau itu pada mulanya dirintis oleh kaum laki-laki, tetapi dalam perkembangannya sejak awal juga bersentuhan dengan semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

Kebudayaan migrasi orang Bawean, sebagaimana disampaikan oleh Rebecca seperti dikemukakan di awal karya tulis ini, sudah tidak terbantahkan. Meskipun demikian, sesuatu yang belum dilengkapi dengan penjelasan yang diberikan Rebecca ialah penjelasan yang lebih memadai, misalnya tentang bagaimana tradisi migrasi itu terbentuk, proses pembentukannya, apakah migrasi hanya sebuah tradisi keluarga-keluarga, ataukah fenomena yang memasyarakat?.

Sebaliknya, alasan-alasan yang mengarah kepada kepentingan ekonomi justru lebih diberi penekanan sehingga seakan-akan menjadikan migrasi itu sebagai sebuah strategi keberlangsungan hidup ekonomi. Hal ini mungkin berarti bahwa tanpa bermigrasi orang Bawean pada umumnya sulit melakukan tindakan kerja yang memadai, tanpa merantau ke luar negeri nafkah dan taraf kehidupan keluarga

tidak bisa terangkat. Dengan hanya bekerja di Pulau Bawean, apapun jenis pekerjaan yang ditekuni, orang Bawean menjumpai kesulitan mengelola secara berstandar keberlangsungan hidupnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu asumsi dari studi yang dilaksanakan saat ini ialah migrasi bagi orang Bawean selain merupakan sebuah tradisi yang sudah membudaya atau, sebaliknya, sebuah budaya yang sudah mentradisi, juga adalah sebuah strategi untuk menjaga keberlangsungan hidup ekonomi mereka.

Migrasi orang Bawean sebagai faktor yang penting dalam melangsungkan kehidupan ekonominya akan menjadi salah satu fokus dari penelitian ini. Melalui seminar ini ingin diperoleh masukan, respon, tanggapan, dan komentar dari para peserta tentang persoalan yang diangkat tersebut. Apakah migrasi itu sebagai suatu realitas sosial memang merupakan sebuah strategi keberlangsungan hidup ekonomi, ataukah asumsi tersebut hanyalah sebuah "kesalahan" yang validitasnya patut dipertanyakan lebih lanjut.

2.2 Ekonomi Bawean, Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar

Apakah penyebab orang Bawean merantau atau melakukan migrasi?². Didasarkan pada teori migrasi yang sudah umum diketahui terdapat ada dua faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu faktor pendorong (*push factor*) pada daerah asal perantau, dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan merantau. Kedua faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga masalah-masalah sosial, kebudayaan dan psikologi.

²Pada seminar tentang "Strategi Masyarakat dan Pembangunan Pulau Bawean" di Komplek Pondok Pesantren Hasan Jufri, Kobonagung, Sangkapura, Sabtu, 25 September 2010, dengan fokus diskusi masalah migrasi dan etos kerja, terdapat peserta yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara konsep merantau dan konsep migrasi. Menurutnya, merantau meninggalkan kampung halaman tetapi untuk kembali pada suatu saat, sedangkan migrasi meninggalkan kampung halaman secara permanen.

Oleh karena banyaknya daerah atau negara tujuan tempat merantau orang Bawean, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Pulau Christmast (wilayah Australia), negara-negara Eropah, dan Amerika Serikat, maka agak sulit untuk menggambarkan secara rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi daya tarik negara-negara tersebut bagi para migran Bawean. Meskipun demikian suatu jawaban yang mungkin bisa diberikan ialah bahwa, dalam pandangan orang Bawean, negara-negara tujuan migrasi (daerah perantauan) tersebut menyediakan peluang dan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk bekerja dengan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan melakukan pekerjaan yang sama di daerah sendiri. Juga di tanah rantau mereka merasa lebih bebas bekerja apa saja, tanpa harus terbebani rasa malu, untuk menangani jenis pekerjaan tertentu, pekerjaan paling kasar sekalipun yang tidak mungkin mereka kerjakan di Bawean.

Dalam perkataan lain terdapat faktor pendorong (*push factor*) yang sangat bervariasi, mulai dari keadaan alam di Pulau Bawean yang belum dikelola secara efektif oleh pihak pemerintah sehingga tidak ada sumber penghasilan yang cepat bisa dinikmati bagi masyarakatnya, kendala kultural yang menyebabkan penduduknya tidak akan mengerjakan pekerjaan jenis rendahan, semuanya menyebabkan banyak penduduknya terdorong untuk memutuskan keluar dari Bawean ke daerah lain dan juga bermigrasi ke luar negeri. Bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Pulau Bawean adalah persoalan yang perlu diungkapkan secara jelas.

Sesuatu yang ingin dikedepankan lebih dulu ialah kondisi kehidupan ekonomi masyarakat pulau Bawean sejak dulu sampai sekarang. Tampaknya dalam ekonomi produksi (*production economy*) Bawean memang belum pernah berkembang secara memadai. Paling tidak hal itu dikesankan dari berbagai tulisan para ahli, sarjana, dan pengamat mengenai sosial, budaya dan ekonomi dimana tulisannya dianggap membahas keadaan Bawean di zamannya. Jacob

Vredenbregt, misalnya, dalam tulisannya yang berhubungan ekonomi produksi di bidang pertanian beras menyatakan sebagai berikut:³

"However, only 55 % of the sawah area was actually being cultivated, while the unirrigated fields were almost entirely unused in the same period (1916–1920). The result of this situation was, and is, that rice production is insufficient for meeting the needs of population, the deficit imported from Java. Before 1942, the inhabitants of the desa Dipangga of the northern Bawean went to the island of Sumbawa to trade pandan mats for rice.

Rekaman Jacob Vredenbregt mengenai kondisi ekonomi pertanian masyarakat Bawean tersebut di atas sebenarnya sama dan sebangun dengan kondisi ekonomi masyarakat Bawean pada beberapa tahun selanjutnya, bahkan sampai saat ini. Dalam pengertian kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya tidak mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih maju. Persoalannya masih terletak selain pada keadaan alam lingkungannya, kondisi sosial, budaya, dan psikologi, serta upah yang tidak cukup yang menjadi faktor yang menekan sehingga merasa malu dan tidak ingin untuk melakukan jenis pekerjaan sembarangan. Lihatlah misalnya, komentar Professor Ida Bagoes Mantra, sebagai hasil dari penelitiannya pada tahun 1996 yang dituangkan dalam sebuah artikelnya:⁴

".... The consideration of the very unpromising physical conditions of the three research areas [East Flores, West Lombok, and The Island of Bawean] like infertile soils, long droughts, rough and hilly topography, which actually constitute the major push factors of migrants from these places to other

³ Jacob Vredenbregt, "Bawean Migrations Some Preliminary Notes", dalam: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 120 (1964), No. 1, Leiden, 109-139.

⁴ Ida Bagoes Mantra. 1996. *Indonesian Labour Mobility to Malaysia (A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island of Bawean)*, A Brief Overview of International Migration,

areas, especially Malaysia. Beside the poor natural conditions, wages paid here, if any, are usually very low.

Keadaan yang digambarkan oleh Jacob Vredendregt pada tahun 1920-an sampai tahun 1940-an, situasi yang dilukiskan oleh Professor Ida Bagoes Mantra tahun 1990-an, sampai pada tahun 2000-an atau di abad millineum ini, ternyata kondisinya tidak banyak mengalami perubahan. Suatu fakta yang jelas bahwa migrasi (*migration-out*) keluar orang-orang atau penduduk, contohnya, dari Pulau Bawean masih berlangsung terus, sementara untuk mengisi lowongan atau peluang kerja yang ditinggalkan oleh mereka justru diisi oleh para perantau atau migran masuk (*migration-in*) ke Pulau Bawean justru berasal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama dari beberapa daerah seperti dari Pulau Madura dan dari daerah-daerah di daratan Jawa Timur, seperti Situbondo, Jombang, Lamongan, Jember, dan lain-lain. Dikatakan oleh seorang informan:

“Karena adanya daya atau faktor-faktor penarik (*pull-factors*) dari Singapura, Malaysia, terutama panggilan keluarga yang sudah lama bermukim di negara-negara jiran tersebut, juga kesempatan mencari uang di sana yang lebih terbuka; sebaliknya adanya bermacam-macam masalah ekonomi, sosial-budaya dan psikologis yang dihadapi di Pulau Bawean sebagai faktor-faktor pendorong (*push factors*), maka banyak anak-anak muda (mayoritas laki-laki) pergi merantau di berbagai daerah dan negara luar. Akibatnya, lowongan pekerjaan yang sebenarnya ada juga di Bawean, meskipun dengan penghasilan yang tidak sebesar jika bekerja di negara-negara lain, justru dimanfaatkan oleh para perantau yang datang ke Pulau Bawean. Dengan demikian terjadi semacam migrasi masuk (*migration-in*) dan migrasi keluar (*migration-out*) di Pulau Bawean. Keduanya alasan utamanya karena masalah ekonomi”.

2.3 Sejarah Migrasi Orang Bawean

Orang Bawean mulai “melayar” meninggalkan pulaunya sudah sejak lama. Apabila hanya disandarkan kepada mulainya orang Bawean meninggalkan pulau kampung halamannya dan pergi ke suatu

daerah/negeri yang lain, barangkali keberangkatan mereka ke Tanah Deli pada tahun 1881⁵, juga dapat disebutkan sebagai “pergi” meninggalkan kampungnya yang mungkin termasuk masa-masa awal yang dapat dicatat dalam sejarah. Disebut “pergi” karena motivasi pergi ke tanah Deli pada masa-masa di hampir penghujung abad ke-19 itu sesungguhnya bukan karena semata-mata dilandasi oleh kesukarelaan, juga bukan dengan motivasi yang tulus dan ikhlas, serta tidak fokus kepada upaya mencari pekerjaan, meningkatkan penghasilan guna menunjang tingkat ekonomi keluarga. Kepergian mereka ke Tanah Deli sebagian karena dipaksa penguasa kolonial Belanda yang pada waktu itu membuka hutan belantara yang sangat luas untuk dijadikan perladangan tembakau.⁶

Sesuatu yang jelas ialah kepergian ke Tanah Deli itu tidak bisa disebut secara tepat sebagai “merantau” atau migrasi dalam eksistensinya seperti sekarang yang dilakukan ke Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Masalahnya berbeda, kalau yang disebut merantau atau migrasi adalah keinginan yang muncul dalam diri, dilakukan secara ikhlas dan tulus, terdapat pertimbangan dan harapan mendapatkan benefit ekonomi yang memadai. Jadi kepergian ke Tanah Deli pada abad ke-19 itu karena mereka dikirim untuk ke sana oleh suatu kekuatan yang memaksa (kolonial melalui antek-anteknya), untuk bekerja bukan sesuai dengan bakat dan keterampilan, bahkan bukan keinginan mereka, dan juga dengan hak penghasilan yang seringkali tidak dibayarkan kepada mereka.

Menggambarkan pengiriman tenaga kerja kuli kontrak ke Tanah Deli, penulis menyatakan, antara lain, sebagai berikut:⁷

⁵Lihat, Dukut Imam Widodo. 2000. “Koeli Kontrak Bawean di Tanah Deli”, dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Pemda Kabupaten Gresik, hal. 507-512.

⁶Mengenai sejarah Koeli Kontrak di Tanah Deli, Sumatera Timur, lihat pula beberapa buku, antara lain: Anthony Reid.

⁷*Ibid*, hal., 510.

”Maka dengan segala macam cara, pada tahun 1881, dikirimlah ’kloter pertama’: 745 orang Bawean, Madoera dan Djawa ke Tanah Deli. Supply tenaga kerja itu terus berlanjut dari tahun ke tahun. Hingga tahun 1902 jumlah Wong Jowo (termasuk Wong Bawean) yang telah dikirim ke Tanah Deli adalah: 295.046 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sungguh ini suatu jumlah yang fantastik!

Bagaimana proses rekrutmennya?..Tempo doeloe pengusaha labour supply itu menggunakan segala macam cara seperti: bujuk rayu, dikoyahi dan digombali... Kalau yang bersangkutan sulit dibujuk bagaimana? Yaa diculik saja!. Verkoop en Commissie-kantoor Emigratie ESAS dan H. Leeksa Kzn. adalah dua perusahaan labour supply yang terkenal tempo doeloe di Soerabaia. Dan mereka jagonya tipu menipu, culik menculik calon tenaga kerja”.

Migrasi atau perantauan yang sesungguhnya bagi orang Bawean ke berbagai daerah dan negara sudah berlangsung lama, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Disebutkan bahwa pada tahun 1819 sudah ada orang Boyan (Bawean) di Malaka.⁸ Mengenai kedatangan awal mereka ke Malaka, selengkapnya dikemukakan adanya tiga pendapat.

Tiga pendapat yang dimaksud adalah *Pertama*, mengatakan bahwa ada orang yang bernama Tok Ayar [diduga orang Bawean] datang ke Malaka pada tahun 1819. *Kedua*, orang Bawean datang ke Malaka kira-kira 1824 semasa penjajahan Inggris di Malaka. *Ketiga*, orang Bawean sudah ada di Malaka sebelum tahun 1900 dan [karena] pada tahun itu sudah banyak orang Bawean di Malaka. Kemudian, sehubungan dengan kedatangan orang Boyan (Bawean) di Singapura pada tahun 1849 sudah tercatat dalam Statistik Singapura sebanyak 763 orang Boyan (Bawean). Sejak tahun 1849 tersebut hingga tahun selanjutnya jumlah mereka di Singapura terus bertambah. Vredembregt (1964) menjelaskannya seperti dapat dilihat pada tabel 1.

⁸ Lihat, ”Suku Bawean”, dalam: *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, dipublikasikan <http://webcache.googleusercontent.com>.

Tabel 2.1.
Jumlah orang Bawean di Singapura 1849-1957

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1849	720	43	763
1871	1377	257	1634
1881	1504	607	2111
1891	1808	869	2677
1901	1701	1011	2712
1911	3028	2058	5086
1921	3765	2824	6589
1931	5338	4075	9413
1947	8237	7197	15434
1957	11580	10587	22167

Sumber: Jacob Vredendregt, 1964: 115.

Berbeda dengan ke tanah Deli, merantau ke Malaka (saat ini masuk Malaysia) dan Singapura, juga ke negara-negara lainnya dilakukan dengan pola dan strategi migrasi yang dapat dikatakan khas (salah satunya nanti akan dibahas pada sub-judul “Kampung Halamanku Pulau Bawean”, sehingga tidak salah kalau ada yang menyebutnya sebagai “kebudayaan migrasi” orang Bawean.

Karena sudah lamanya orang Bawean melakukan perantauan sehingga waktu yang tepat mengenai awal mulanya perantauannya sulit untuk diprediksi. Catatan-catatan dan statistik yang ada di Malaka dan Singapura yang dikemukakan di atas, baru setelah kolonial Inggris menguasai kedua daerah itu. Setelah masa kemerdekaan Indonesia atau tepatnya setelah migrasi orang Bawean menjadi subyek penelitian barulah beberapa sarjana Indonesia atau ahli tentang Bawean menuliskan sejarah perantauan mereka dari perspektif Indonesia. Meskipun demikian, catatan sejarahnya yang pertama-tama mungkin juga adalah hasil pengalaman orang-orang asing yang berhubungan dengan masyarakat Bawean di tanah perantauannya.

Sejarah merantau atau migrasi bagi orang Bawean, Jacob Vredendregt, misalnya, dalam upayanya mempelajari orang Bawean

memulai studinya di kalangan orang “Boyan” (Bawean) di Singapura. Dalam bukunya disebutkan sebagai berikut:⁹

“Penelitian yang diterbitkan ini dimungkinkan oleh sebuah subsidi dari Nederlandse Organisatie voor Zuiverwetenschappelijk Onderzoek ZWO (Organisasi Belanda untuk Penelitian Ilmu Dasar) dan dilakukan selama tahun 1962-64.

Dua tahun pertama saya melakukan penelitian lapangan di kalangan penduduk Bawean di Singapura. Untuk memperoleh gambaran yang lebih umum tentang penduduk imigran ini saya berdiam pada tahun 1963 selama beberapa bulan di Malaya, tempat saya mengunjungi pusat Bawean terpenting di kota-kota besar sepanjang pesisir barat semenanjung Malaya. Pada tahun 1964, saya menyelesaikan penelitian saya dengan suatu kunjungan yang agak lama di Pulau Bawean itu sendiri.

Pada waktu saya memulai penelitian di Singapura, saya tidak diganggu maupun didorong oleh pengetahuan yang pernah dibukukan mengenai kelompok penduduk setempat itu.

Hanya melalui data sensus ternyata bahwa, meskipun lolos dari penelitian ilmiah, orang Bawean mendiami Singapura dalam jumlah yang besar. Di sini dikenal dengan nama rusak ”Boyan”.

Kendatipun sejarah migrasi orang Bawean dimulai di salah satu negeri perantuannya, seperti Singapura dan Malaysia, guna menelusuri waktu yang tepat dari kedatangan mereka di negeri tersebut, namun ternyata juga sulit diperkirakan¹⁰. Hanya saja seminimal informasi historis yang bisa diungkapkan masih agak lebih jelas

⁹Jacob Vredembregt, *Bawean dan Islam*, terjemahan *De Baweanners in hun Moederland en in Singapore*, oleh A.B. Lapien, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1990. Seri INIS Jilid VIII.

¹⁰ Pada ensiklopedia bebas yang dilansir Wikipedia bahasa Indonesia, disebutkan antara lain: “Sulit untuk menentukan waktu yang tepat kedatangan orang-orang Bawean ke Malaka, [kini: Malaysia, juga ke negeri-negeri lainnya] karena tidak ada bukti dan dokumentasi sejarah mengenai kedatangan mereka”.

dibandingkan jika memulainya dari kampung halaman mereka, yaitu Pulau Bawean yang pada saat ini termasuk di wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

2.4 Proses, Prosedur dan Pengawal Migrasi

Migrasi atau merantau bagi orang Indonesia ke luar negeri, baik dari Bawean, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, maupun dari daerah-daerah di Pulau Sumatera serta dari daerah lain di Indonesia yang merantau ke Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya, senantiasa dilakukan dengan dua cara jika ditinjau dari sudut hukum, yaitu migrasi legal dan illegal. Migrasi legal yaitu migrasi yang dilakukan secara syah, berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh baik pemerintah Indonesia sebagai negara asal maupun sesuai dengan aturan negara-negara penerima yang dituju. Sementara itu, migrasi illegal adalah migrasi yang baik proses dan prosedurnya tidak dilakukan secara syah, tidak sesuai dengan aturan dan prosedur baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di negara-negara penerima migran.

Informasi dari penelitian di Bawean menyatakan bahwa kedua cara migrasi itu juga diberlakukan para perantau dari pulau tersebut. Dalam pengertian, ada orang Bawean yang melakukan migrasi baik secara legal maupun illegal. Menurut beberapa informan, migrasi legal terjadi apabila mereka yang merantau atau bermigrasi menggunakan pesawat terbang untuk mencapai negara tujuan. Migrasi dengan fasilitas penerbangan, minim dari cara dan prosedur yang tidak sesuai aturan, karena memang pada sistem penerbangan itu diterapkan secara ketat peraturan yang ada. Apalagi ditunjang oleh aparat yang melaksanakan tugasnya secara konsisten dan bertanggung jawab serta menggunakan teknologi deteksi yang canggih atas pelanggaran-pelanggaran yang bakal dan dicoba dilakukan oleh para migran guna mencari keuntungan-keuntungan pribadi yang secara aturan tidak diperbolehkan dan secara sosial tidak bisa diterima.

Kemudian merantau secara illegal biasanya terjadi pada perantauan yang dilakukan dengan menggunakan transportasi laut untuk masuk ke wilayah suatu negara. Keadaan ini bisa terjadi karena, antara lain: (1) keinginan untuk merantau tidak dicukupi oleh persiapan (modal biaya) yang memadai sehingga dilakukan pula melalui cara-cara yang dianggap tidak membutuhkan biaya yang besar, (2) mendapatkan peluang untuk merantau ke suatu negeri dengan cara illegal dan proses dan/atau prosedur ini seringkali terjadi melalui bantuan agen atau pengawal yang tidak bertanggung jawab, (3) merantau secara illegal juga dapat terjadi karena rumit dan panjangnya rantai birokrasi perizinan yang diimplementasikan dari peraturan pemerintah, dimana para pengelola pemberi izin (pegawai instansi yang berkaitan), karena kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk mencari keuntungan, juga ikut serta memperlambat, menghambat, proses dan prosedur yang semestinya.

Dari wawancara di lapangan beberapa informan menyatakan bahwa karena sulit dan panjangnya rentang birokrasi perizinan di beberapa daerah di Jawa dan luar Jawa menyebabkan banyak calon perantau yang menyempatkan meminta bantuan dari para pengawal migrasi yang berdomisili di Bawean. Proses dan prosedur demikian itu dapat terjadi karena beberapa pengawal migrasi atau merantau di Bawean sudah dikenal di daerah lain. Mereka, para pengawal itu dikenal bertangan dingin (memiliki peruntungan yang baik), cekatan, dan berpengalaman dalam mengurus orang-orang yang ingin merantau.

Merantau, menurut mereka yang pernah melakukannya, seringkali adalah sebuah petualangan kehidupan karena dilakukan tanpa adanya kejelasan jenis pekerjaan tertentu yang akan ditangani di negeri rantau. Hal yang banyak muncul sebagai kenyataan adalah merantau sama dengan mencari pekerjaan, walaupun pekerjaan yang diidamkan tidak diperoleh, karena kebutuhan hidup yang mendesak, menyebabkan banyak perantau bekerja apa saja. Sejatinnya ingin bekerja sebagai karyawan kantor, kenyataannya malah kerja sebagai pembantu rumah tangga. Itulah contoh dan kiat strategi bertahan hidup yang paling banyak dijumpai di perantauan.

Migrasi atau merantau sebenarnya, dilihat dalam perspektif keluarga, membawa dampak konsekuensi pada dua sisi, yaitu mereka yang bermigrasi dan lainnya ialah mereka yang ditinggalkan. Harapan yang paling ideal ialah anggota keluarga yang merantau mencapai sukses sesuai yang diinginkan, sementara kehidupan keluarga yang ditinggalkan tetap stabil, dalam pengertian kepergian anggota keluarganya merantau tidak menyebabkan tingkat kesejahteraan kehidupan keluarganya merosot. Bagaimana kiat agar berhasil dalam merantau, sesuai proses dan prosedur yang semestinya? Selain mereka yang mempunyai jaringan khusus dalam merantau, misalnya ada keluarga yang sudah menetap di rantau yang menjadi fasilitator, kebanyakan orang Bawean dalam melakukan migrasi atau merantau memanfaatkan jasa para pengawal. Apalagi mereka yang baru pertama kali merantau meninggalkan tanah pulau kelahirannya.

Pengawal migrasi bagi orang Bawean adalah orang atau lembaga yang mengurus orang yang ingin merantau atau bermigrasi. Itu adalah pengertiannya yang sederhana. Secara lebih memadai, pengawal adalah orang atau lembaga yang menjadi penghubung dalam proses migrasi tenaga kerja antara calon migran di Pulau Bawean, juga orang Bawean yang bertempat tinggal di daerah lain, dengan pasar tenaga kerja di negeri rantau (Malaysia, Singapura, dan lain). Pemahaman lebih mendalam mengenai pengawal ialah suatu kompleks kegiatan dan jaringan. Pengawal memiliki suatu posisi dan keterikatan tertentu dengan masyarakatnya, dia dipercaya memiliki pengetahuan yang luas dan ketrampilan khusus dalam mengurus seluk-beluk merantau di kalangan masyarakatnya, sehingga dia didukung, dipertahankan dan dilindungi (bandingkan, Kartono, 2004:125).

Menjadi pengawal bukan suatu hal yang mudah, dalam pengertian padanya harus terintegrasi bermacam kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan. Pengawal harus memiliki pengetahuan yang bervariasi dan memadai, seperti pengetahuan mengenai undang-undang, peraturan dan hukum keimigrasian, pengetahuan tentang masalah transportasi darat, laut dan udara, pengetahuan ekonomi dan bisnis yang cukup, pengetahuan yang luas tentang negeri yang menjadi

tujuan migrasi, serta tentunya pengetahuan dan kemampuan manajerial dalam mengelola usaha. Berbagai macam pengetahuan tidak selalu harus ditimba dari bangku sekolah, tetapi juga melalui pengalaman sebagai jalan pintas ilmu dan pengetahuan.

Seorang informan mantan pengawal yang pernah berkiprah selama lebih dari 20 tahun menyatakan bahwa "ilmu pengawal" sebenarnya lebih banyak merupakan ilmu terapan, lebih baik langsung dipraktikkan sehingga menjadi tidak hanya suatu pengetahuan, tetapi juga pengalaman dan kebiasaan. Melalui praktek langsung dapat ditimba hal-hal yang benar dan salah dalam ke-pengawal-an, hal yang benar selalu dapat menjadi referensi yang tepat untuk langkah-langkah selanjutnya, sedangkan hal yang salah dapat secara langsung dikoreksi pada tahap-tahap berikutnya.

Menjadi pengawal migrasi yang sukses, dalam arti dipercaya oleh masyarakat, memerlukan beberapa syarat. Berdasarkan sistem kerjanya, pengawal dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu pengawal mandiri dan berstruktur¹¹. Bertolak pada pendapat Kartono (2004) dan hasil wawancara dengan beberapa informan pengawal dan migran, mereka menyatakan bahwa untuk bisa memperoleh kepercayaan diperlukan paling tidak empat syarat yang utama, yaitu:

1. Kejujuran

Kejujuran pengawal adalah suatu yang mutlak bagi masyarakat. Pengawal dianggap jujur jika dalam proses, prosedur dan perjalanan mengantar migran tidak terjadi kecurangan yang memberatkan migran. Kecurangan misalnya dapat terjadi pada biaya yang lebih mahal dari keumuman, juga jika antaran barang, uang, atau lainnya disampaikan kepada pemiliknya tidak sesuai dengan yang dikirimkan.

¹¹ Pengawal mandiri adalah pengawal yang dalam semua kegiatannya terhadap migran dilakukan sendiri. Pengawal berstruktur adalah pengawal dalam kegiatannya untuk migran dilaksanakan melalui suatu sindikasi yang bersifat kolaboratif menurut kapasitasnya masing-masing.

2. Bermodal

Pengawal dalam pandangan para migran adalah yang memiliki modal. Tidak jarang terjadi ada orang yang ingin bermigrasi atau merantau tidak memiliki modal sama sekali atau tidak punya cukup biaya, sehingga dia mengharapkan diongkosi lebih dulu oleh pengawal. Terjadinya keadaan seperti itu tentu saja dilandasi oleh perjanjian (tertulis) antara pengawal dan migran.

3. Berjiwa penolong

Pengawal karena posisinya sebagai pemodal, pengurus dan pengantar migran maka pada dirinya memang harus ada jiwa penolong yang tinggi. Tanpa semangat seperti itu pengawal tidak didekati oleh masyarakat, karena seperti diketahui bermigrasi atau merantau dalam masyarakat (baca: Bawean) adalah upaya melakukan perubahan dalam hidup dan kehidupan. Hubungan antara pengawal dan migran mungkin bisa disebut sebagai hubungan antara "penjual" dan "pembeli" jasa.

4. Bertanggung jawab

Pengawal yang disenangi oleh masyarakat ialah mereka yang bisa bertanggung jawab penuh kepada migran. Hal ini berarti pengawal selain pemodal, pengurus, pengantar, tetapi juga dapat bertindak sebagai agen atau "pencari" kerja bagi migran yang memakai jasanya. Jadi pengawal demikian ini tidak hanya menjadi pengantar sampai tujuan daerah yang dikunjungi, tetapi juga jenis pekerjaan yang pada akhirnya digeluti oleh migran.

Semua informan penelitian sepakat menyatakan bahwa sebaik-baiknya pengawal adalah mereka yang pernah menjadi migran atau perantau lebih dulu. Tentunya, hal ini dimaksudkan bahwa jika melalui pengalaman sebagai migran atau perantau lebih dulu pengawal tersebut dapat menimba ilmu, pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana sebenarnya lika-liku seorang perantau. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh seorang pengawal pada saat menjadi perantau dia dengan lebih mudah dapat menerapkan strategi yang tepat, atau sekurang-kurangnya, mendekatinya dalam profesinya sebagai

pengawal. Pentingnya menjadi perantau atau migran lebih dulu sebelum menjadi pengawal karena banyak hal-hal menyangkut peranan seorang pengawal yang harus dipelajari.

Menurut Drajat Kartono (2004) dalam proses migrasi seorang pengawal atau sebuah lembaga pengawal memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) peran, yaitu: (1) memberi modal kepada calon migran atau perantau, (2) mengurus kelengkapan administrasi, (3) mengantar perjalanan migran sampai ke negara tujuan migrasi, dan (4) membawa uang kiriman.

Pengawal baik perseorangan maupun lembaga dalam menekuni profesinya, dipandang dari sudut ekonomi, memang harus mempunyai kemampuan yang kuat. Dalam perkataan lain pengawal harus termasuk berstatus kelompok/golongan ekonomi kuat, bukan dari kelompok/golongan ekonomi lemah. Status itu penting karena pengawal, dalam upayanya memberangkatkan migran, khususnya calon migran atau perantau yang tidak mampu, seringkali diminta membiayai lebih dulu sang calon migran. Pengembalian biaya yang dikeluarkan baru akan dikembalikan apabila migran sudah berpenghasilan alias sudah bekerja. Tentu saja dalam hubungannya dengan pembiayaan itu terdapat perjanjian tertulis atau dalam bentuk apapun antara pengawal dengan para migran yang diberangkatkan.

Pengawal dalam kapasitas kerjanya yang menghubungkan berbagai kalangan atau pihak, misalnya pihak migran dengan petugas di berbagai instansi dan pelayanan untuk kelengkapan surat-surat yang diperlukan sebagai calon migran ketika masih di Indonesia, demikian juga ketika sudah sampai di negara tujuan, memang dituntut untuk mengerti urusan administrasi. Pengetahuan tentang administrasi baik di Indonesia maupun administrasi di negara-negara tujuan migrasi. Pentingnya pengawal mempunyai pengetahuan administrasi yang baik karena tidak semua calon migran dalam urusannya, apalagi mereka yang berpendidikan rendah, dapat mengurus surat-suratnya secara langsung dan mandiri.

Pengawal migran/perantau Bawean berbeda dengan pengusaha pengirim TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia dalam cara dan mekanisme kerjanya. Pengusaha pengirim TKI/TKW biasanya hanya mencari calon TKI/TKW dan menyalurkannya ke "agen" (baca: pengusaha pengirim yang lain) sehingga tidak atau kurang mempunyai tanggung jawab moral akan keberhasilan dalam perjalanan hingga sampai ke negara tempat tujuan. Berbeda dengan itu, pengawal migran Bawean memiliki tanggung moral yang tinggi terhadap calon migran mulai dari mengurus persiapan, termasuk menyediakan modal perjalanan, meninggalkan rumah dan kampung halaman, selama dalam perjalanan, dan sampai ke negara tujuan.

Mengapa pengawal migran Bawean memberikan perhatian yang begitu tinggi terhadap para migran dalam urusannya?. Jawabannya, para migran yang diurus adalah kebanyakan orang Bawean, penduduk kampung halaman sendiri, mungkin tetangga sebelah rumah, bisa saja masih ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan pengawal. Jadi bisa saja masih adanya hubungan emosional dan kultural antara pengawal dengan para migran yang mereka urus. Itulah mungkin bedanya dengan pengurus TKI/TKW yang lain, dimana mereka tidak terikat hubungan kultural dan emosional yang mengikat dengan para langganannya.

Pengawal harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para migran, karena mereka masih tetap memiliki hubungan dalam masa-masa para migran sudah mendapatkan pekerjaan di negeri rantau. Gunanya hubungan antara kedua pihak dipelihara secara langgeng ialah tidak kurang pula para pengawal kembali menjadi "pengurus" (pembawa) atas kiriman para migran di luar negeri kepada orang tua, sanak saudara, keluarga dan kerabatnya di Baswean atau di daerah lainnya di Indonesia. Dilihat dari peranan ini, dapat diketahui betapa intensnya jalinan hubungan yang tercipta antara pengawal migran Bawean dengan para migrant/perantau dalam urusannya.

Selain empat peran yang dikemukakan Drajad Kartono di atas dan sudah diulas berdasarkan hasil klarifikasi dari beberapa informan penelitian, sebenarnya masih ada peran pengawal yang tidak disebutkan. Peran yang dimaksud ialah beberapa pengawal juga bisa bertindak sebagai “agen” yang mencarikan atau mengurus pekerjaan bagi perantau. Seorang mantan pengawal yang menjadi informan penelitian, pada saat ini mengurus hotelnya sendiri, menyatakan bahwa ketika dia menjadi pengawal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun seringkali pula dia mencarikan sendiri pekerjaan bagi migran yang diantaranya. Hal ini, menurutnya, merupakan “seni” tersendiri dan tidak kurang pula memerlukan ketrampilan khusus.

Menurutnya, mencarikan pekerjaan bagi para perantau Bawean di negara lain biasa dilakukannya dengan memanfaatkan hubungan-hubungan “tradisional” (juga bersifat kultural) misalnya minta bantuan dari atau melalui jasa organisasi sosial dan keagamaan orang Bawean di rantau. Untuk mendapatkan simpati dari para pengurus organisasi demikian itu, maka strateginya yang paling jitu ialah harus rajin dan suka membuka pergaulan dan berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan organisasi itu. Baik di Singapura maupun di Malaysia, misalnya, terdapat organisasi masyarakat Bawean dengan bermacam kegiatannya mulai dari mengelola pendidikan, urusan keagamaan, sampai kepada memberikan bantuan atau nasihat kepada orang-orang Bawean yang dihadapkan kepada suatu masalah hukum.

2.5 Destinasi dan Keadaan di Rantau (Luar Negeri) Orang Bawean

Pada awalnya orang Bawean merantau dan bermigrasi hanya menuju ke daerah dan negeri-negeri yang dapat dijangkau oleh perahu layar tradisional mereka, yaitu perahu kayu tanpa mesin, yang kecepatannya tentu saja relatif lambat dibandingkan dengan kapal besi yang sudah bermesin. Konsekuensinya mereka baru dapat mencapai daerah tujuan (destinasi) migrasinya setelah waktu berhari-hari, yang bagi mereka sendiri tidak dapat memperkirakannya secara tepat,

apalagi jika berhadapan dengan kendala-kendala iklim, angin, ombak dan gelombang laut yang tidak bersahabat.

Bahkan merantau, bermigrasi, pada mulanya mungkin hanya bersifat avonturir, dalam pengertian melakukan pelayaran dengan suatu daerah atau negeri tujuan yang belum ditentukan secara pasti, atau sampai di suatu daerah tujuan bukan negeri yang direncanakan semula, tetapi pulau/negeri lain yang belum dikenal dan berlabuh di sana akibat dibawa angin laut saja. Sesuatu yang juga bisa terjadi ialah pelayar-pelayar pada masa lalu, dengan perahu tanpa mesin, justru sampai atau mendarat di suatu pulau yang masih kosong atau tidak/belum dihuni oleh manusia.

Sampai pertengahan tahun 1900-an destinasi para migran Bawean yang banyak diketahui ialah selain di daerah-daerah lain di Indonesia, di luar negeri yang terpenting ialah Singapura dan Malaysia. Selain kedua negara tetangga itu juga pada saat ini terdapat perantau Bawean di Vietnam, Amerika Serikat dan di Pulau Christmast (Australia).

Pada saat ini sulit untuk mengetahui jumlah orang Bawean di luar negeri; namun sesuatu yang pasti ialah jumlah orang Bawean di luar Pulau Bawean jauh lebih banyak daripada yang tinggal di Pulau Bawean sendiri, demikian disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren di Sangkapura, Bawean. Zulfa Usman, seorang pemakalah pada Seminar Maulidurrasul Internasional Warga Bawean yang diadakan di Sangkapura, Bawean, Kabupaten Gresik, pada tanggal 16 Maret 2010, menyebutkan bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBS (Persatuan Bawean Singapura), pada tahun 1984 terdapat tidak kurang dari 250 ribu warga Bawean di Singapura. Pada tahun yang sama, berdasarkan data dari PBM (Persatuan Bawean Malaysia) terdapat sekitar 750 ribu warga Bawean di Malaysia.

Mengenai keadaan para migran Bawean di luar negeri, dalam arti kultural (budaya) tampaknya mereka juga berupaya melestarikan kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang ditinggalkannya di Pulau Bawean. Meskipun unsur kebudayaan yang dilestarikan tidak sama

persis cara dan metoda pelestariannya. Hal ini berarti, misalnya, kebiasaan hidup dalam sistem masyarakat paguyuban (*gemenschaaft society*) dihidupkan pula di negeri rantau. Di Singapura, sebagai contoh, kita bisa menjumpai misalnya organisasi masyarakat Bawean, demikian pula di Malaysia, bahkan konon terdapat pula di Amerika Serikat. Bagi orang Bawean merantau untuk pulang kampung, pulau Bawean kampung halamanku.

2.6 Penutup

Migrasi atau merantau bagi masyarakat Bawean sebenarnya sudah menjadi suatu “pengalaman sosial” yang telah menyita waktu panjang. Mereka sudah mulai bermigrasi pada awal abad ke-18. Diperkirakan sejak 1819 sudah ada orang Bawean yang tinggal di Malaka, dan dimulai sejak waktu itu sampai saat ini orang Bawean merantau ke berbagai negara, tidak hanya ke Malaysia dan Singapura, tetapi juga Amerika, Kanada, Jerman. Australia, dan negara lainnya.

Merantau disebut sebagai suatu “pengalaman sosial” dimaksudkan telah dilakukan secara serempak oleh masyarakat Bawean, sehingga didapatkan informasi ketika penelitian lapangan bahwa “tidak ada satu keluarga Bawean yang tidak pernah “mengirim” salah satu anggota keluarganya untuk merantau ke luar negeri”. Merantau atau bermigrasi ke luar negeri bagi orang Bawean tidak hanya menjadi strategi bertahan hidup untuk menunjang hidup dan kehidupannya sekeluarga, tetapi melebihi hal itu juga meliputi strategi bertahan hidup bagi masyarakatnya, bagi kampung halamannya, bagi pulaunya, bahkan bagi agamanya – Islam.

Pustaka Acuan

Leake, Rebecca Soraya. 2009. *Pulau Putri: Kebudayaan Migrasi dan Dampaknya di Pulau Bawean*, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS), Angkatan 28, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Juni.

- Mantra, Ida Bagoes. 1996. *Indonesian Labour Mobility to Malaysia (A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island of Bawean)*, A Brief Overview of International Migration.
- Vredendregt, Jacob. 1964. "Bawean Migrations Some Preliminary Notes", dalam: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 120 (1964), No. 1, Leiden, 109-139.
- Vredendregt, Jacob. 1990. *Bawean dan Islam*, diterjemahkan dari **De Baweanners in hun Moederland en in Singapore**, oleh A.B. Lapien, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1990. Seri INIS Jilid VIII.
- Widodo, Dukut Imam. 2004. "Koeli Kontrak Bawean di Tanah Deli", dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Pemda Kabupaten Gresik.
- "Suku Bawean", dalam: *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, dalam <http://webcache.googleusercontent.com>.
- Seminar tentang "Strategi Masyarakat dan Pembangunan Pulau Bawean" di Komplek Pondok Pesantren Hasan Jufri, Kobonagung, Sangkapura, Sabtu, 25 September 2010.

BAB III

ETOS KERJA (ISLAMI) ORANG BAWEAN

Muhammad Asfar Marzuki

3.1 Pengantar

Dalam sejarah perjalanan hidup manusia tempo dahulu telah dikisahkan kepada kita bahwa sekurang-kurangnya ada dua prinsip yang kalau dilanggar niscaya kita akan mengalami kebangkrutan. Dua prinsip itu adalah “kebebasan” dan “kebutuhan” yang dilandasi norma agama.

Menurut Karl Marx, manusia hanya mempunyai tiga kebutuhan (*Three Satisfactions*) yaitu sandang-pangan, papan dan seks. Manusia tidak membutuhkan agama. Bahkan agama bagi Marx adalah candu masyarakat (*the opium of the people*). Sedangkan Abraham Maslow menetapkan kebutuhan manusia dengan teorinya yang terkenal *Five Satisfactions* (lima kebutuhan). Lima kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego dan kebutuhan realisasi diri (*self actualization*).¹

Kedua keturunan Nabi Adam a.s. yang berdarah Yahudi ini tidak mau memasukkan agama dalam daftar kebutuhan manusia. Keduanya ingin sekali memisahkan agama atau meniadakan campur tangan agama dalam kehidupan manusia. Dengan pemahaman lain, mereka menginginkan manusia hidup dengan sebebas-bebasnya seperti mahluk lain tanpa kendali agama. Secara politis dan ideologis keduanya menghendaki adanya generasi ateis secara berkelanjutan.

Dalam kehidupan duniawi masalah pemenuhan kebutuhan materi acapkali menjadi faktor yang amat menonjol dalam kehidupan manusia bahkan kadang-kadang menempati prioritas utama dalam

¹Thohir Luth. 2001. *Perut dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani.

kehidupannya. Pemilikan yang menonjol akan kekayaan material, acapkali membawa pemiliknya kepada penerimaan status sosial tertentu.² Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika sejarah kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh persaingan yang ketat dalam lingkup persoalan ini.

Setiap manusia berjuang untuk mempertahankan hidup dan juga untuk mendapatkkan kekayaan material. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan kalau mungkin tidak sekedar cukup. Kecenderungan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan material adalah sunnatullah atau bawaan naluriah dan bagian dari sisi emosi manusia.

Dalam hubungan ini, Max Weber memperlihatkan suatu sikap tentang prilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dengan konsep spirit kapitalisme, kata lain untuk menunjukkan manusia sebagai *homo economicus*.³ Selain sebagai *homo economicus* pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai *homo religious*.⁴ Penyebutan manusia sebagai hewan berpikir, atau hewan yang memenuhi kebutuhan material (ekonomi)nya serta hewan yang beragama pada gilirannya dapat dilekatkan dengan pola dan karakter tiap-tiap manusia. Manusia dengan segala potensi yang dimilikinya, merupakan subyek dari maju mundurnya suatu peradaban.

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dan membangun peradaban itu, manusia Indonesia dinilai memiliki daya saing yang relatif lemah dibanding manusia di negara-negara lain. Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) menempatkan Indonesia pada urutan ke 50 dari 125 negara. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing

² Syamsuddin Abdullah. 1979. *Max Weber, Hidupnya, Karya-karyanya dan Sumbangannya*, Yogyakarta, Percetakan UII.

³ Taufik Abdullah, (ed). 1988. "Tesis Weber dan Islam di Indonesia". dalam *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.

⁴ Ary Ginanjar Agustian. 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Jakarta: Penerbit Arga.

Indonesia berada pada tingkat menengah. Diantara lima negara ASEAN, peringkat Indonesia masih berada dibawah Singapura yang menduduki peringkat 5, Malaysia di posisi ke-26 dan Thailand pada peringkat 35. Namun peringkat Indonesia lebih baik dibanding dengan Filipina yang berada di peringkat 71.⁵

3.2 Agama dan Etos Kerja

Prilaku ekonomi termasuk didalamnya etos kerja dinyatakan berkaitan dengan ajaran agama tertentu. Dalam tesisnya tentang Etika Protestan dan hubungannya dengan semangat kapitalisme, Max Weber mengatakan adanya hubungan antara ajaran agama dengan prilaku ekonomi, yakni keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada pranata-pranata yang membentuk masyarakat. Dengan suatu fakta statistik, Weber menjelaskan fenomena di dunia Eropa modern. Ia menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin perusahaan dan para pemilik modal, atau mereka yang tergolong sebagai buruh terampil (*skill labour*) terlebih lagi karyawan perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknis dan perniagaan, sebagian besar memeluk agama Protestan.

Menurut Weber, kapitalisme modern timbul sebagai hasil kumulatif kekuatan sosial, politik dan ekonomi, serta agama yang berakar jauh di dalam sejarah Eropa. Akan tetapi sejak masa reformasi sampai kira-kira abad ke-18, pengaruh dari agama sangat signifikan. Weber telah menentukan agama, terutama Protestan sebagai aktor determinan. Agama merupakan faktor yang berdiri sendiri dan berpengaruh. Lebih jauh Weber menjelaskan bahwa etika agama yang memberikan spirit pada prilaku ekonomi adalah agama yang bercorak progresif atau reformatories, bukan agama passif dan tradisional.

Pandangan Weber yang menempatkan agama sebagai faktor yang determinan tersebut berbeda dengan Karl Marx yang menempatkan agama pada posisi nomor dua dan dependen. Dalam hal

⁵Nur Kholish, *Etos Kerja Dalam Islam*.

ini, Weber sangat boleh jadi ingin mencari relasi atau hubungan antara penghayatan agama dengan pola perilaku. Dari sini tampaknya Weber mengajak pada suatu model pemikiran atau pendekatan bahwa faktor struktural dan pola-pola pemikiran (ide dan nilai) harus dianalisis secara bersamaan dengan cermat. Antara perilaku-prilaku religius dan perilaku-prilaku ekonomi harus dipahami dengan sebaik-baiknya.

Etos kerja kerap kali dimaknai sebagai sikap atau pandangan manusia terhadap kerja yang dilakukan, yang dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai tersebut dapat berasal dari suatu agama tertentu, adat istiadat, kebudayaan, serta peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam suatu negara. Etos kerja yang dimiliki seseorang tidak terlepas dari sistem nilai dan pandangan hidup yang dianutnya.

3.3 Islam dan Etos Kerja

Islam sebagai sebagai agama dan ideologi memang mendorong umatnya untuk bekerja keras, tidak melupakan kerja setelah beribadah (Q.S. Al-Jumuah: 10). Rasulullah bersabda hendaknya kamu jangan meninggalkan generasi yang lemah (H.R. Muslim). Yang dimaksudkan lemah adalah kesusahan dalam iman dan ekonomi.

Ketidak-sempurnaan memahami atau salah memahami ajaran agama justru akan membuat penganut ajaran tersebut terperangkap dalam pandangan dan praktek di luar ajaran. Memahami Islam hanya sebatas ritual 'ubudiyah atau upacara peribadatan yang sempit ternyata mengakibatkan tidak sedikit muslim yang mengabaikan tuntunan yang disampaikan Islam lewat dua sumber utamanya yaitu Al Quraan dan Sunnah Rasulullah saw. Allah swt berfirman: Dan Kami turunkan Kitab (Al Quraan) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim). (An- Nahl: 89). Rasulullah saw tidak membiarkan suatu perkara pun yang mendekatkan diri kita kepada Allah melainkan beliau menyuruh kita untuk melakukannya, dan tidak membiarkan suatu perkara pun yang menjauhkan diri kita dari Allah

melainkan beliau melarang kita untuk melakukannya. Sehingga beliau meninggalkan kita di atas *mahajjah* (jalan lurus, petunjuk) yang terang, malamnya sama seperti siang, tidak ada seorangpun yang sesat dari petunjuk itu melainkan ia seorang yang binasa (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

Secara demikian, seluruh isi yang dipesankan Islam kepada pemeluknya, berada pada satu rotasi yakni 'ubudiyah dan penghambaan yang total kepada Allah swt. Islam sendiri mengecam pemecahan pesan-pesannya. Al-Quraan mengecam keras sikap Bani Israil yang tidak beriman dengan seluruh pesan syariat mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian yang lain ? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian diantara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah:86). Untuk itu Allah berfirman:” Wahai orang-orang yang beriman ! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (*kaaffah*), dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah: 208).

3.4 Kewajiban Bekerja

Salah satu bagian dari syari'at Islam adalah kewajiban bekerja, dan keharaman berpangku tangan serta bermalas-malasan bagi orang yang berkemampuan untuk bekerja. Allah swt berfirman: ”Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang yang mu'min, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS At-Taubah: 105).

Allah juga berfirman: “ Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (QS Al-Jumuah: 10). Rasulullah saw bersabda “ Seseorang mengambil tali-talinya lalu pergi

ke bukit dan memikul setumpuk kayu di atas punggungnya lantas menjualnya sehingga dengan demikian Allah mencukupkan baginya rizqi yang dibutuhkan untuk hidupnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang-orang lain baik mereka memberikan atau tidak” (HR. Al-Bukhari).

Bahkan Allah swt telah memerintahkan para Nabi-Nya untuk berusaha mencari rizqi. Firman Allah kepada Nabi Muhammad saw; “Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap “ (QS Asy-Syarah: 7-8). Allah swt juga berfirman; “ Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang (QS Al-Muzammil: 7). Dan firman Allah kepada keluarga Dawud as: “Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur (QS Sabaa: 13).

Para nabi merupakan tauladan nyata dari sikap menghargai nilai bekerja betapapun kecil nilai pekerjaan itu. Nabi Dawud a.s. adalah seorang pandai besi. Ia membuat perisai dengan tangannya dan Allah telah melunakkan besi untuknya. Rasulullah Pernah bersabda; ”Seseorang tidak akan dapat memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Dawud a.s. makan dari hasil kerja tangannya”. (HR Al-Bukhari). Nabi Nuh a.s. adalah seorang pemahat. Ia memahat sendiri kapalnya. Nabi Musa as sepuluh tahun lamanya menggembala kambing milik Nabi Syu’aib a.s. sebagai mahar nikah salah seorang putrinya. Nabi Muhammad s.a.w. menggembala kambing dan memperdagangkan harta Sayyidah Khadijah r.a.

Allah s.w.t. telah memerintahkan hamba-hambaNya untuk berusaha di muka bumi ini agar dapat memperoleh rizqi yang telah ditentukan untuk mereka. Hal ini dikarenakan Allah telah mengatur sebab seseorang memperoleh rizqi adalah melalui ia berusaha dan bekerja keras. Disamping itu, kerja juga merupakan faktor yang sangat

penting untuk membangun agama dan dunia sekaligus, dan merupakan wahana penting untuk melaksanakan berbagai amal ibadah lainnya.

Pahala dan kedudukan seorang hamba disisi Allah akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia berusaha dan bagaimana kadar keikhlasannya dalam berusaha. Allah swt berfirman; ” Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizqiNya”. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan (QS Al-Muluk: 15).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Ia telah mempersiapkan bumi dan menyediakannya agar dapat dimanfaatkan sebagai manusia bergerak dan berusaha. Bumi telah ditundukan-Nya supaya untuk dapat merespon aktifitas manusia sehingga ia dapat mengeluarkan rizqi bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Allah swt telah memuliakan manusia, menganugerahkan kepadanya berbagai ni'mat sehingga ia lebih tinggi dari seluruh makhluk-Nya yang lain.

Allah menjadikan manusia sebagai khalifa-Nya di muka bumi, sebagaimana firman-Nya “ Inni ja'ilun fi al ardhi khalifah”. (QS Al Baqarah). Kepada manusia dipikulkan beban untuk memakmurkan bumi, untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman, dan bukan untuk merusak dan menumpahkan darah. Beban berat ini tidak akan dapat dipikul apabila manusia berdiam diri saja, bermalas-malasan.

Beban inipun bukan hanya dipikulkan kepada sebagian manusia melainkan kepada setiap pundak manusia. Oleh karena itu setiap manusia yang memiliki tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tapi ia memilih untuk tidak bekerja, maka ia telah menyalahi amanat yang dimandatkan oleh Pencipta dan Pemberi berbagai anugerah kepadanya. Allah swt berfirman: ”Dia telah menjadikan kamu dari tanah dan Ia jadikan kamu pemakmurnya (QS Hud: 61).

3.5 Bekerja Sebagai Ibadah

Perdagangan dunia di era globalisasi tidak hanya berada dalam tatanan ekonomi belaka, melainkan juga merambah ke ranah politik. Sebagai bukti adalah adanya *money politic* atau politik uang yang marak terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia dalam perebutan kursi kekuasaan. Perdagangan dunia yang luas menggiurkan pencari kerja, karena disana memang terbuka cukup lebar kesempatan. Terbukanya peluang kerja merangsang orang untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Sudah barang tentu harapan yang memotivasi para pencari kerja adalah mendapat penghasilan.

Usaha mencari kerja guna memperoleh pendapatan supaya hidup lebih maju adalah sah sah saja. Hanya saja, kerja seperti apa dan bagaimana yang disebut sah atau halal? Ini perlu kejelasan, agar supaya dapat diketahui kedudukan hukum agamanya. Sebab kerja seperti apa dan bagaimana ini mempunyai pengaruh terhadap pekerja itu sendiri. Harga diri seorang pekerja seperti mucikari (*sex broker*) di mata Tuhan dan masyarakat tentulah berbeda dengan buruh tani. Penjual nasi lebih mulia dibanding dengan penjual miras. Seorang *cleaning service* jauh lebih mulia dibanding dengan penguasa sadis dan pengusaha licik. Begitu juga petani di desa yang sederhana akan lebih berharga dibanding dengan “petani berdasari” yang bak tikus-tikus kota yang menggerogoti kekayaan negara.

Kita sering dikacaukan dengan terminologi amal saleh yang acapkali tidak diterjemahkan secara gamblang, bahkan kadang dibiarkan begitu saja. Sehingga pemahaman orang pun menjadi amat terbatas dalam konteks dan kaitannya dengan masalah ritual saja, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Jika amal saleh berarti “pekerjaan yang baik” pasti pengertiannya menjadi lebih luas, seperti membersihkan jalan dan saluran air atau selokan, menjual koran dan berdagang sayuran bahkan sebagai pemulung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan apa saja yang baik menurut ukuran agama adalah amal saleh. Oleh karena itu pekerjaan tukang batu, tukang kayu,

tukang cuci, tukang masak, tukang kebun, tukang pijat dan lain-lain adalah amal saleh juga.

Bahwa segala bentuk aktivitas manusia yang baik adalah amal saleh atau ibadah, maka aktivitas tersebut harus memenuhi beberapa syarat antara lain;

- (1) Ikhlas, yaitu menyatunya badan, pikiran dan hati dalam tugas atau aktivitas seraya menyucikan niat karena Allah swt semata (*Lillahi Ta'ala*). Bekerja adalah ibadah kepada Allah swt, maka ikhlas harus terpatri di dalam kerja tersebut.
- (2) Cinta yaitu adanya rasa rindu untuk mendapat ketenangan atau kebahagiaan bila bertemu dengan yang didamba. Mencintai pekerjaan adalah satu keharusan, karena di dalamnya kita dapat memperoleh nilai tambah secara materi dan spiritual berupa pengalaman untuk memenuhi hajat hidup kita. Kita tak bisa memungkiri bahwa kita dapat menunaikan shalat, haji, zakat dan bersedekah karena didukung oleh harta yang kita miliki. Ini berarti kerja untuk memperoleh penghasilan menempati kedudukan strategis untuk memperbanyak amal saleh. Dengan demikian harapan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat bukan mustahil akan didapatkan.
- (3) Istiqomah yakni tetap tekun dan berpihak pada yang benar. Karena bekerja adalah ibadah maka kita harus istiqomah, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan.
- (4) Sedia Berkorban. Bekerja sebagai ibadah juga memerlukan pengorbanan.
- (5) Membelanjakan harta di jalan yang benar.

Kerangka berpikir secara filosofis yang Islami tentang bekerja adalah ibadah. Oleh karena itu tujuan bekerjapun harus ditentukan dengan jelas, untuk apa bekerja, dan apa yang harus dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan. Jawaban orang tentu akan berbeda-beda dalam menjawab pertanyaan untuk apa bekerja. Hal itu tergantung niatnya. Sangat boleh jadi sebagian orang mengatakan bahwa mereka bekerja untuk bertahan hidup, seperti buruh petani misalnya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa mereka bekerja untuk mengejar kekayaan

dan atau kekuasaan, seperti pengusaha, pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif misalnya. Pemuda pengangguran mungkin akan mengatakan bahwa bekerja agar supaya bisa cepat menikah. Anak-anak yang selalu menggantungkan diri pada orang tuanya mungkin akan menyatakan bahwa bekerja untuk bisa mandiri, dan lain-lain.

Bila dicermati jawaban-jawaban tersebut tampak tidak mempunyai muatan keagamaan bahkan terkesan sangat materialistis. Seolah-olah dunia ini hanya dipenuhi dengan segudang materi. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Fakta sosial telah banyak menunjukkan peristiwa tragis kepada mereka yang materialistis. Contohnya ada yang dicaci-maki rakyat karena korupsi. Ada yang mengakhiri masa tuanya di penjara karena mencuri harta orang atau harta negara. Bahkan ada yang membunuh orang lain dan dirinya sendiri untuk menghilangkan jejaknya sebagai penjahat ulung. Yang lebih menyedihkan lagi adalah yang kejahatannya meninggalkan bekas yang sangat pahit dan menyakitkan bagi keturunan mereka.

Seperti sebutan mantan koruptor, mantan maling, mantan penjahat ulung dan sebutan negatif lainnya yang harus dipikulkan ke pundak anak cucu mereka. Jadilah, ia generasi yang sial, yang tidak ikut makan nangka, tapi kena getahnya.”. Kenapa itu terjadi.? Karena sebagian orang tidak menghadirkan visi *religious* dalam bekerja. Al Qur'an menegaskan bahwa yang perlu dicari adalah keutamaan dan keridhaan. (QS Al Fath: 29 dan Al Jumua: 10). Dengan demikian tujuan bekerja adalah: (1) Mencari keridhaan Allah swt; dan (2) Mendapat keutamaan (kualitas, hikmah) dari hasil yang diperoleh.

Kalau kedua hal ini menjadi landasan dan sekaligus visi dalam bekerja, maka diperlukan beberapa aktivitas positif, diantaranya;

- (1) Mulailah mencari pekerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang halal. Maksudnya jangan menjadi tukang tadah, mucikari dan lainnya.
- (2) Jadilah pekerja jujur, dapat dipercaya untuk mengembangkan usaha. Maksudnya jangan menjadi pekerja yang suka menghianati kepercayaan hanya karena untuk memperkaya diri.

- (3) Dapatkan mitra kerja yang baik dan ajak mereka bersama-sama bekerja secara baik pula. Maksudnya jangan bersekongkol dan melakukan perbuatan destruktif.
- (4) Gunakan cara-cara yang baik. Jangan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan.
- (5) Keluarkan sebagian rizqi yang diperoleh itu untuk zakat, infaq dan sedekah.
- (6) Bersyukur atas ni'mat Allah yang diperoleh dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pintu mana yang harus dilalui untuk mendapat keridhaan Allah swt? Banyak pintu masuk menuju kesana, diantaranya Sabda Rasulullah, "*Ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil waalidain.*".

Dalam rangka usaha meluruskan pengertian dan pemahaman kaum Muslimin mengenai ajaran agama Islam yang berkaitan dengan kewajiban berusaha mencari nafkah penghidupan, Khalifah ke empat Khulafaur –Rasyidiin, 'Ali ibn Abi Thalib, *karamallahu wajhah*, selalu memberi pengertian kepada kaum muslimin mengenai beberapa pokok ajaran Islam, antara lain:

- (1) Nilai seseorang tergantung pada kadar kemauannya.
- (2) Bukankah kemiskinan itu termasuk cobaan hidup? Ketahuilah, bahwa kemiskinan yang terberat itu adalah penyakit jasmani. Dan penyakit jasmani yang paling parah adalah penyakit hati. Kesehatan badan lebih berharga daripada kecukupan harta, dan hati yang bertaqwa lebih berharga daripada badan yang sehat.
- (3) Barangsiapa yang enggan bekerja ia akan menghadapi cobaan hidup, dan Allah tidak membutuhkan orang yang tidak mengindahklan nikmat yang dikaruniakan dalam harta dan jiwanya.
- (4) Orang yang bahagia adalah yang dapat menarik pelajaran dari orang lain, orang yang sengsara ialah orang yang tertipu oleh hawa nafsunya.
- (5) Hai para hamba Allah, janganlah sekali-kali kalian terkecoh oleh kebodohan kalian, dan jangan pula kalian menuruti hawa nafsu

kalian. Orang yang tunduk kepada dua hal tersebut ia berada di tepi jurang yang terjal.

- (6) Ilmu pengetahuan wajib diikuti dengan amal perbuatan. Barangsiapa berilmu ia harus beramal. Dengan beramal ilmu akan meningkat tinggi, dan tanpa amal ilmu akan merosot.
- (7) Amal perbuatan adalah buah ilmu pengetahuan. Orang berilmu yang berbuat tidak sesuai dengan ilmunya, sama dengan orang bodoh yang kebingungan dan tetap bodoh. Bahkan orang seperti itu kesalahannya lebih besar, lebih pantas disesali dan di hadirat Allah swt ia akan menjadi orang yang paling menyesal. Orang yang bekerja tanpa ilmu tidak ubahnya seperti orang yang bepergian tanpa kenal jalan, sehingga orang lain yang melihatnya akan bertanya-tanya “bepergiakah atau pulang”?.
- (8) Barangsiapa dikaruniai kekayaan oleh Allah swt hendaklah ia memperhatikan kaum kerabatnya, menghormati dan menjamu tamu sebaik-baiknya, membebaskan tawanan perang dan melepaskan orang dari penderitaan, membantu kaum fakir miskin dan orang yang tenggelam di dalam hutang demi kebajikan, dan hendaknya ia bersabar tidak menuntut hak karena ingin mendapatkan pahala senata-mata. Sifat-sifat demikian itu merupakan keberuntungan yang akan menghantarkan orang ke pintu gerbang kemuliaan di dunia dan insya Allah merupakan pembuka jalan baginya untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat.
- (9) Bekerjalah dengan sekuat tenaga, janganlah engkau menjadi penumpang hasil kerja orang lain.
- (10) Janganlah engkau malu jika hanya dapat memberi sedikit, karena dapat memberi sedikit lebih baik daripada tidak dapat memberi. Jadilah engkau seorang yang penyantun, tetapi jangan menjadi seorang yang pemboros. Jadilah engkau seorang yang hemat, tapi jangan menjadi seorang yang kikir.
- (11) Janganlah engkau menjadi orang yang tidak mempan peringatan, karena orang yang berakal cukup diperingatkan dengan tutur kata yang bai, sedangkan hewan tak dapat diperingatkan kecuali dengan pukulan.

- (12) Hati manusia dapat merasa jemu dan lesu sebagaimana badan juga merasa jemu dan lesu. Karena itu carilah ilmu dan hikmah untuk mengobatinya.

Imam 'Ali berpendapat, orang yang hidup dicengkeram kemelaratan tentu kehilangan ketenangan dan ketentramannya. Sukar baginya untuk menghayati kejujuran, perilaku yang baik dan menghias dirinya dengan sifat-sifat utama. Sukar pula baginya untuk membuang rasa iri hati dan dengki dari lubuk hatinya. Maka dari itu ia mudah terperosok ke dalam penyelewengan yang tidak baik. Benar bahwa Imam 'Ali hidup zuhud dan menganjurkan kezuhudan, demikian pula dengan beberapa sahabat Nabi semisal Abu Dzar Al-Ghifari. Akan tetapi mereka tak pernah menganjurkan untuk hidup melarat daripada berkecukupan. Imam 'Ali tidak jemu-jemu mengingatkan kepada kaum muslimin, "*'Imal li dunyaka kaannaka taisyu abada wa 'amal lil aakhirati kaannaka tamuutu ghoda*" yang artinya "Beramallah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari".

Menurut Imam 'Ali upaya memperoleh rizqi dengan jalan yang benar dan lurus tidak akan mendatangkan hasil lebih besar daripada yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan. Dengan tegas dan jelas Imam 'Ali berkata; "Jika kamu menempuh jalan kebenaran, tentu akan terbuka jalan yang menyenangkan kalian dan tidak akan ada orang yang menggantungkan penghidupannya kepada orang lain". Berdasarkan pengamatan yang tajam dan cermat Imam 'Ali yakin bahwa kemelaratan dapat menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Karena itulah ia memerangi segenap kekuatan yang ada, serta dengan tegas dan tandas mencemoohkan orang-orang yang menganjurkan atau membagus-baguskan kemelaratan dengan kezuhudan. Memang kalau hidup zuhud akan menambah iman dan taqwa kepada Allah Ta'ala, akan tetapi kalau kemelaratan akan membawa ke dalam kekufuran. Dimana nanti kita akan menyembah selain-Nya. Itu bias harta dan juga kekuasaan. Maka dari itu seumpama kemelaratan itu berupa manusia, seharusnya kita membunuhnya.

Islam menuntut keikhlasan dalam bekerja sebab ia merupakan bagian dai 'ubudiyah kepada AllahSwT. Bukan banyak atau sedikit hasil yang diperoleh dari suatu kerja yang menjadi ukuran nilai di sisi Allah tapi justru kerja keras dan keikhlasan itu sendiri yang akan diganjar oleh Allah swt dengan pahala. Karenanya Rasulullah saw pernah bersabda “Apabila datang hari kiamat, dan kebetulan ditanganmu ada tunas pohon kurma yang hendak kau tanam, maka jangan sampai kegalauan pikiran tentang hari kiamat mengurungkan niatmu untuk menanam tunas pohon kurma tersebut”.

Demikian pentingnya kerja sehingga dalam kondisi dimana kepanikan lumrah terjadi, keputusanpun wajar muncul dalam benak manusia, tapi Rasulullah saw melarang muslim untuk berhenti bekerja. Secara demikian tidak ada alasan menghentikan kerja. Acapkali berbagai pintu usaha terlihat seperti tertutup. Padahal Allah swt telah memberikan kepada manusia akal untuk berpikir dan berbagai karunia lainnya agar manusia dapat mengelola hidupnya. Perasaan diri lemah dan putus asa justru menjerumuskan manusia bersikap curiga kepada Allah swt bahwa Allah swt tidak menyayangi dirinya. Dan ini adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam.

Hasil suatu kerja Allah yang menentukan, tapi manusia diwajibkan untuk berikhtiar dengan segenap kemampuannya sebagai suatu manifestasi 'ubudiyah kepadaNya, yang oleh Allah swt dinilai sederajat dengan jihad *fisabilillah* atau jihad di jalanAllah. Pernah suatu ketika Rasulullah saw sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian, ada seorang pemuda lewat didepan mereka. Seorang pemuda yang gagah dan energik. Pagi sekali ia pergi untuk bekerja mencari 'rizqi. Diantara para sahabat ada beberapa yang berkomentar “sayang sekali pemuda itu! Kegagahannya dan tenaga muda yang penuh energik itu tidak dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah”.

Lalu Rasulullah saw menegur mereka. Jangan kalian berkata begitu. Sesungguhnya apabila ia berusaha mencari rizqi untuk dirinya agar ia tidak perlu minta-minta dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, maka ia itu sedang *jihad fii sabilillah*. Dan apabila ia

berusaha mencari rizqi untuk menafkahi kedua orangtuanya atau anak-anaknya yang lemah (karena masih kecil atau sebab lainnya) supaya mereka dapat hidup berkecukupan dan tidak perlu bergantung pada orang lain, maka dia sedang *jihad fii sabilillah*. Tapi apabila ia pergi berusaha untuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan, maka ia sedang di jalan syaithan. (HR. At Thabrani).

Rasulullah saw menyetarakan perbuatan orang yang berusaha menghidupi diri dan keluarganya dengan *jihad fii sabilillah* yang merupakan salah satu ‘ubudiyah tertinggi di dalam Islam. Apabila berusaha atau kerja keras merupakan salah satu praktek ‘ubudiyah, maka keikhlasan niat untuk mencapai ridha Allah swt adalah sesuatu yang paling prinsip atau rukun agar ‘ubudiyah tersebut diterima oleh Allah swt. Dengan keikhlasan yang demikian, maka seorang Muslim akan terus menjaga sepak terjangnya dalam berusaha agar ia tidak sampai melakukan sesuatu yang melanggar syari’at Allah swt.

Rasulullah saw bersabda “Tidak ada sesuatu perbuatan yang aku ketahui akan mendekatkan diri kalian kepada syurga serta menjauhkan diri kalian dari neraka melainkan aku telah menyuruh kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada sesuatu perbuatan yang aku ketahui akan mendekatkan diri kalian kepada neraka dan akan menjauhkan diri kalian dari syurga melainkan aku telah melarang kalian mengerjakannya. Sesungguhnya Ar-Ruh Al-Quds (Malaikat Jibril ‘alaihi salam) telah membisikkan kedalam hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sampai dengan ia memperoleh rizqinya sekalipun tidak langsung datang. Maka bertaqwalah kepada Allah swt dan baguskan diri kalian pada saat berusaha mencari rizqi. (HR Ahmad).

Membaguskan diri ketika bekerja mencari rizqi, yang dimaksud oleh Rasulullah saw dalam hadits tersebut adalah dengan tetap memiliki harga diri, tidak bersikap munafiq dan menjilat; dengan penuh ketenangan batin dalam iman kepada Allah swt; serta melalui jalan-jalan atau cara-cara yang dianjurkan oleh syari’at sehingga terwujud sikap membaguskan diri dengan prilaku-prilaku yang mulia

atau berakhlakul karimah. Abu Hurairah, r.a meriwayatkan satu sabda Nabi Muhammad saw “ Makanan yang paling halal dimakan oleh seorang hamba adalah hasil jerih payah tangannya apabila ia ikhlas” (HR. Ahmad). Yakni ikhlas dalam pekerjaan, profesi dan pelaksanaan tugasnya, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan senantiasa memantau keridhaan Allah Ta’ala dalam dia berusaha baik itu menyangkut produk yang dipersembahkan bagi konsumen, pelayanan yang disuguhkan maupun lainnya.

Pekerjaan atau amal shaleh (perbuatan bermanfaat) yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah Ta’ala dan dengan hati ikhlas mengharap keridhaan Allah akan menjamin taraf kehidupan yang baik di dunia dan mendapat pahala di sisi Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Kahfi ayat 88: ”Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan (amal shaleh), maka ia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan Kami berikan kepadanya perintah Kami yang mudah-mudah”. Dan dalam Surat An Nahl ayat 97 Allah berfirman: “ Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Etos kerja dalam Islam menyangkut akhlaq dalam pekerjaan. Untuk bisa menimbang bagaimana akhlaq seseorang dalam bekerja sangat tergantung dari cara melihat arti kerja dalam kehidupan, cara bekerja dan hakekat bekerja. Dalam Islam iman banyak dikaitkan dengan amal. Dengan kata lain, kerja yang merupakan bagian dari amal tak lepas dari kaitannya dengan iman seseorang. Secara demikian, idealnya semakin tinggi iman seseorang maka semakin tinggi pula semangat kerjanya. Ungkapan iman sendiri bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual saja melainkan juga berkaitan dengan program aksi.

Dalam rangka memahami relasi agama dan etos kerja telah dilakukan penelitian di masyarakat Bawean. Orang Bawean adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang berdiam di Pulau Bawean.

Pulau Bawean dilihat dari sudut pandang letak geografis memang relatif terpencil. Pulau ini berada disebelah utara Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan jarak kurang lebih 150 kilometer. Perjalanan ke pulau ini ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam dengan menggunakan kapal laut Ferry cepat dan atau sekitar 6 jam dengan menggunakan kapal laut biasa. Pulau Bawean adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh pulau lain yang lebih kecil yakni Pulau Nusa, Pulau Selayar, Pulau Noko dan Pulau Gili Barat serta Pulau Gili Timur.

Pulau Bawean terbentuk dari sisa-sisa gunung berapi tua. Kurang lebih 85% dari Pulau Bawean terdiri atas lapisan sedimen batuan tua yang terdiri dari batu kapur, lapisan pasir, batu dan tanah liat.⁶ Karenanya di Pulau Bawean terdapat cukup banyak gunung, antara lain Gunung Kastoba, Gunung Bengkoang, Gunung Tinggi, Gunung Gadung, Gunung Besar, Gunung Dedawang dan Gunung Besar. Gunung tertinggi yakni Gunung Tinggi yang tingginya sekitar 665 meter. Gunung-gunung tersebut membentang di sekitar tengah Pulau Bawean. Berdasarkan sejarah geologi, pulau-pulau di Indonesia terbagi atas dua macam pulau, yakni Pulau Laut dan Pulau Benua.

Salah satu pulau di Indonesia yang termasuk dalam kategori Pulau Benua adalah Pulau Bawean, yang pada masa lampau mempunyai hubungan dengan daratan atau benua lainnya karena turunnya permukaan laut.⁷ Secara metaforis, pulau Jawa itu ibarat huruf Nun dan titiknya adalah Pulau Bawean.⁸ Artinya ada hubungan antara Pulau Bawean dengan daratan lain dalam hal ini adalah Pulau Jawa.

⁶A. Hoogerwerf. 1966. *Notes on the Island of Bawean (Java sea), with special reference to the births.* Natural History Bulletin of Siam Society, 21:313-340.

⁷J. Supriatna Primack, M. Indrawan, dan Kramadibrata. 1998. *Biologi Konservasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

⁸M. Dhiyauddin Quswandhi. 2008. *Waliyah Zainab Putri Pewaris Syeikh Siti Jenar: Sejarah Agama dan Peradaban Islam di Pulau Bawean*, Bawean, Yayasan Waliyah Zainab Dipinggo.

Secara administratif, Pulau Bawean sebelum tahun 1974 termasuk dalam wilayah Kota Surabaya. Mengingat letaknya lebih dekat dengan Kabupaten Gresik, pada tahun 1974 Pulau Bawean dimasukkan ke wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pulau Bawean dibagi menjadi dua wilayah administratif yaitu Kecamatan Sangkapura yang terdiri dari 17 desa yaitu Desa Kota Kusuma, Sawahmulya, Sungai Teluk, Sungairujing, Patar Slamet, Gunungteguh, Daun, Lebak, Kebunteluk Dalam, Baliktetus, Deka, Suwari, Tagung, Komalasa, Pudak Barat dan Pudak Timur. Adapun Kecamatan Tambak terdiri atas 13 desa yaitu Desa Telukjati, Sukalila, Dedawang, Pakalongan, Gelam, Kalompang ghubuk, Gelam, Sokaoneng, Tanjungori, Paroman, Kepuhteluk, Kepuhlegundi dan Diponggo. Di Desa Diponggo inilah salah seorang penyebar agama Islam terdahulu yaitu Waliyah Zainab dikebumikan.

Meskipun Pulau Bawean merupakan daerah terpencil tetapi keterpencilannya tidak dapat serta merta menggiring opini orang untuk beranggapan bahwa daerah ini pastilah serba terbelakang. Hal ini dikarenakan nuansa kehidupan modern setidaknya dapat langsung dirasakan tatkala seseorang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bumi Pulau Bawean. Secara fisik, nuansa kehidupan modern antara lain dapat dilihat dari bangunan rumah penduduk, masjid, sekolah Islam, yang sebagian besar memiliki model dan gaya masa kini. Di daerah ini juga terdapat beberapa hotel dengan fasilitas yang relatif cukup memadai. Jalan desa yang didanai dengan swadaya masyarakat hampir semuanya diaspal dan dalam kondisi relatif baik. Memang kondisi jalan lingkar atau jalan utama saat ini sebagian besar rusak tetapi sedang dalam perbaikan, dan ditargetkan tahun 2012 jalan utama tersebut sudah mulus seperti beberapa tahun lalu.

Dalam kehidupan sosial budaya, kemodernan masyarakat Bawean antara lain dapat dilihat dari pola berpikir mereka yang sudah mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak sedikit orang Bawean yang melanjutkan studi hingga ke jenjang tertinggi (S3) di Perguruan Tinggi. Dan bukan hanya di Perguruan Tinggi Agama Islam seperti Institut Agama Islam Negeri, Universitas

Islam Negeri, Universitas Islam Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan lainnya, melainkan juga di Perguruan Tinggi Umum, seperti: Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, dan lainnya. Mereka yang merantau di luar negeri seperti di Malaysia dan Singapura tidak sedikit orang Bawean yang bekerja sebagai nahkoda maupun teknisi kapal pesiar yang menuntut keahlian tertentu. Disamping itu juga ada yang menjadi pengusaha, bahkan ada yang menduduki jabatan di Pemerintahan Malaysia dan Singapura.

3.6 Etos Kerja Orang Bawean

Setiap bangsa mempunyai pandangan hidup, entah hal itu disadari atau tidak. Pandangan hidup yang dimiliki suatu bangsa itu khas dan mempengaruhi bagaimana perilaku dan budaya bangsa yang bersangkutan. Semangat kerja pun dipengaruhi oleh pandangan hidup sehingga dalam kajian tentang suatu masyarakat dikenal istilah etos kerja. Demikian juga dengan Orang Bawean. Orang Bawean dikenal sebagai perantau yang memiliki etos kerja yang cukup tinggi. Sebagian besar orang Bawean terutama usia produktif hampir dipastikan merantau.

Budaya merantau orang Bawean diawali sejak pra kemerdekaan RI, yang dikenal dengan perantau generasi pertama. Hingga saat ini budaya merantau orang Bawean terus berlangsung. Tidak sulit menemukan orang Bawean di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, Saudi Arabia atau Australia.⁹ Menurut keterangan beberapa tokoh Bawean, orang Bawean yang ada di Malaysia dan Singapura jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan orang Bawean yang ada di Pulau Bawean. Sekitar tahun 80-an jumlah

⁹M. Faisol, *Membangun Jiwa Entrepreneurship yang Sustainable Warga Bawean Memasuki Era Globalisasi*. Makalah Seminar disampaikan dalam Seminar Interaktif “Membangun Bawean Lewat Alam dan Budayanya”, 16 Maret 2010.

orang Bawean yang berada di perantauan lebih kurang 160.000 orang dan yang tinggal di Pulau Bawean sekitar 70.000 orang.

Pada saat ini jumlah orang Bawean di Malaysia tidak kurang dari 250.000 orang, dan di Singapura lebih dari 150.000 orang. Sedangkan yang tinggal di Pulau Bawean sekitar 300.000 orang.¹⁰ Di dalam negeri, sekedar untuk menggambarkan betapa orang Bawean merantau kemana-mana di hampir seluruh pelosok nusantara. Di Kepulauan Riau, terutama di Batam dan Tanjung Pinang, menurut Bapak H. Abdul Khaliq, mantan Pengawal atau Topekong, kedua daerah ini sangat akrab terdengar ditelinga orang Bawean. Daerah ini bukan saja sebagai tempat merantau tetapi juga sebagai transit orang Bawean yang akan merantau ke Malaysia dan Singapura.

Di Provinsi Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Manggar Belitung, yang merupakan daerah bekas tambang timah yang pernah berjaya di masa Orde Baru, banyak sekali orang Bawean yang berdomisili disana. Bukan hanya di Kepulauan Riau tetapi juga di Pulau Kalimantan banyak orang Bawean bertempat tinggal. Di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda, Balikpapan dan Bontang banyak dijumpai orang Bawean. Demikian pula di Kalimantan Selatan, terutama di Martapura, di kota ini banyak orang Bawean bertempat tinggal, bahkan di Kalimantan Tengah, terutama di Sampit banyak orang Bawean bermukim menjadi penduduk disana. Di Pulau Jawa, orang Bawean yang tinggal dan berdomisili nyaris tidak terhitung jumlahnya, karena mulai dari ujung Barat Pulau Jawa (Anyer) hingga ujung Timur Pulau Jawa (Banyuwangi) banyak sekali ditemui orang Bawean.

Di samping memiliki budaya merantau, orang Bawean sebenarnya juga memiliki jiwa wirausaha yang dilandasi etos kerja yang cukup tinggi. Sebagian besar perantau Bawean generasi pertama (1915-1940) terutama yang bermukim di Pulau Jawa adalah para

¹⁰Wawancara dengan Bapak Drs. Cuk Sugrito dan Bapak Camat Bawean 23-24 September 2010.

pengusaha yang sukses. Diantara mereka yang mencapai puncak kesuksesan adalah H. Ma'ruf, H. Mundzir dan H. Masykur yang berdomisili di Kediri, Jombang dan Madiun, Jawa Timur. Di Solo, Jawa Tengah adalah H. Ahsin, kemudian H. Mensawi di Bandung, Jawa Barat.¹¹ Jika mereka diklasifikasikan dengan tingkatan pengusaha sekarang, mereka termasuk dalam kategori pengusaha kelas menengah dengan omset dan aset yang mencapai ratusan miliar rupiah bila dihitung dengan nilai aset sekarang.

Orang Bawean dikenal juga amat religius. Sejak kecil anak-anak Bawean sudah dididik agama. Pendidikan agama bagi orang Bawean merupakan prioritas. Orang tua di Bawean cenderung mengarahkan pendidikan untuk putra-putri mereka ke pendidikan agama pada tingkat permulaan. Sangat boleh jadi, orang tua di Bawean berpandangan bahwa penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam seyogyanya ditanamkan ketika anak masih kecil. Belajar agama di waktu kecil jauh lebih baik daripada belajar agama ketika sudah dewasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir diatas batu, belajar ketika sudah dewasa bagai mengukir di atas air. Sehingga tidaklah mengherankan jika sarana pendidikan Islam di Bawean sangat baik.

Di Kecamatan Sangkapura saja untuk tingkat dasar setidaknya terdapat tidak kurang dari 45 buah Madrasah Ibtidaiyyah, dengan jumlah sekitar 2.930 murid dan 337 ustadz. Dan orang segera akan tahu kalau melihat suatu gedung sekolah atau madrasah yang bagus, tentulah itu bukan gedung sekolah negeri melainkan gedung sekolah swasta/Islam. Sangat boleh jadi ajaran agama Islam yang telah ditanamkan sejak dini itulah yang menjadi salah satu faktor signifikan yang membentuk orang Bawean sebagai penganut agama yang taat atau sangat religius.

Kalau semua orang Bawean tinggal di pulau yang kecil ini maka mau makan apa? Ungkapan beberapa orang Bawean ini, sangat boleh jadi menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi mengapa

¹¹M. Faisol, *op.cit.*

orang Bawean pergi merantau hingga ke luar negeri. Selain dari itu ada semboyan: "*Aja moka cewek monta ngarsai langit, Aja moka langit monta ngarsai sangona*". Yang artinya kira-kira "Jangan berani menikah kalau belum pernah merantau, Jangan merantau kalau belum cukup bekalnya. Bekal yang dimaksud bukan hanya berupa materi seperti uang, melainkan juga bekal spiritual atau agama. Orang Bawean yang akan pergi merantau setidak-tidaknya sudah *khatam* mengaji Al Quraan dan kitab *Safinatun Najah* (Perahu Keselamatan). Di samping itu ada bekal lain yakni silat atau ilmu bela diri. Kitab *Safinatun Najah* merupakan kitab yang membahas masalah fiqih dan tauhid cukup detail.

Setiap bangsa mempunyai pandangan hidup, entah hal itu disadari atau tidak. Pandangan hidup yang dimiliki suatu bangsa itu khas dan mempengaruhi bagaimana perilaku dan budaya bangsa yang bersangkutan. Semangat kerja pun dipengaruhi oleh pandangan hidup, sehingga dalam kajian tentang suatu masyarakat dikenal istilah etos kerja, yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok.

Demikian pula dengan Islam yang mempunyai ajaran tertentu. Pandangan Islam atau pemeluknya tentang hubungan manusia dengan Tuhan juga mempengaruhi etos kerja orang yang bersangkutan. Orang yang berpandangan bahwa Allah menentukan nasib semua manusia dan manusia tidak diberi kekuasaan untuk mengubahnya tentu akan mengakibatkan tingkat etos kerjanya rendah. Sebaliknya orang yang berpandangan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk mengubah nasibnya sendiri tentu akan mengakibatkan etos kerja yang tinggi.

Semangat kerja orang Bawean sangat boleh jadi juga dipengaruhi oleh agama yang mereka peluk. Dalam perjalanan waktu, menurut Amyadi, salah satu tokoh muda Bawean, telah terjadi pergeseran ideologi orang Bawean dalam kaitannya dengan bekerja atau mencari nafkah terutama bagi orang Bawean yang merantau. Ia membagi perantau Bawean menjadi dua kelompok yakni kelompok

angkatan tahun 80-an dan tahun 90-an. Menurutnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua kelompok tersebut. Kelompok pertama angkatan 80-an relatif lebih religius dibanding kelompok angkatan 90-an yang kurang religius.

Menurut tokoh muda Bawean yang sangat intelek ini, ideologi angkatan 90-an, antara lain ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya secara instan untuk dibawa ke Bawean dengan gaya konsumtif dan hedonis, mereka beli motor, perangkat *sound system*, dan sebagainya. Sedangkan kelompok angkatan 80-an, mereka mengumpulkan harta, tidak konsumtif dan tidak hedonis. Mereka menabung dalam bentuk emas, beli sawah, ladang dan sebagainya. Mereka juga menyisihkan sebagian uang untuk membiayai putra-putri mereka melanjutkan studi ke pesantren-pesantren di Jawa, Perguruan Tinggi Islam dan juga ke Perguruan Tinggi Umum.

Kelompok angkatan 80-an ini dapat disebut sebagai penerus sejati perantau Bawean generasi pertama pra kemerdekaan RI (1915-1940) yang sukses dan yang kental keislamannya. Mereka betul-betul mencari nafkah, mencari ilmu, bertani atau bekerja menjadi buruh migran itu adalah manifestasi ibadah. Sehingga dalam mencari nafkah mereka senantiasa berpedoman pada syariat Islam.

Kelompok ini adalah kelompok yang setidaknya-tidaknaya dapat memaknai, memahami serta melaksanakan firman Allah swt “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian) itu” (QS Almaidah: 1). Dimana perjanjian-perjanjian itu meliputi perjanjian antara Tuhan dan manusia, yakni kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan, perjanjian antara manusia dengan dirinya sendiri, dan perjanjian antara individu dengan sesamanya. Jadi secara demikian, perjanjian (*uqud*) yang dirujuk pada ayat tersebut secara sederhana dapat dinyatakan berkisar antara pelaksanaan shalat sehari-hari sampai menjual barang dagangan di bazaar, dari sembah sujud hingga kerja mencari nafkah.

Berangkat dari pandangan dunia tradisional tersebut, yang tidak mendikotomikan antara sakral dan profan, maka etos kerja kaum

Muslimin selayaknya memperhatikan kualitas pekerjaannya. Ini berarti dalam bekerja karakteristik spiritual tetap terjaga dan terpelihara yakni pekerjaan itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap kerja berarti kesiapan untuk bertanggung jawab dihadapan Yang Maha Mutlak, Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Sebab kerja adalah saksi bagi semua tindakan manusia. Kelompok ini juga menjadikan nilai-nilai ajaran Islam yang termaktub dalam firman Allah tersebut sebagai spirit dalam bekerja.

Sementara itu, kelompok perantau Bawean angkatan 90-an, karena orientasinya lebih dititikberatkan kepada keduniawiyahan, maka untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cepat mereka pun tidak segan-segan menyerempet hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Sangat boleh jadi karena terlalu berorientasi keduniaan sehingga cara-cara batil pun dilakukan. Pokoknya *wal wal keduwal*, tidak peduli haram atau halal, haq ataupun batal.

Dalam Ushuludin disebut-sebut perihal *ma'ad* atau qiyamah yang bila diterjemahkan dalam keseharian akan sangat mendukung sekali terhadap profesionalisme dalam bekerja. Praktik shalat wajib dikalangan Syiah yang mencakup shalat fajar (shubuh), shalat siang hari (dzuhur, ashar) dan shalat malam (maghrib,'isya) merupakan refleksi etos kerja mereka yang begitu tinggi dan manifestasi produktifitas dalam berkarya. Artinya bila kaum Syiah selesai menunaikan shalat siang hari, maka setelah shalat dan dzikir, mereka akan kembali bekerja dengan semangat yang tetap terjaga. Bukan meneruskan dengan aktifitas yang kurang produktif dan tidak bermanfaat (Syeid Husen Nasr, 19).

Rasulullah bersabda: "Tempat yang paling dicintai Allah di negeri-negeri adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah di negeri-negeri adalah pasar-pasarnya (HR, Muslim, shahih 665; Ibnu Hibban, shahih 16600). Kuntowijayo, dalam karyanya *Dinamika Perjuangan Umat Islam Indonesia*, berkomentar bahwa kedua tempat itu sebetulnya merupakan simbol aktifitas dalam dunia kehidupan Muslim. Penafsiran Kuntowijoyo yang didasarkan pada

pendekatan sosiologis memaknai pasar sebagai simbol aktivitas kerja secara khusus, sedangkan masjid dimaknai sebagai wilayah beribadah atau belajar (*ta'lim*) secara khusus pula. Memnag bila kerja dibatasi maknanya pada aspek ekonomi dan sosial saja, seolah-olah mengesankan adanya dikotomi antara yang profan atau duniawiyah (pasar, kerja) dengan sakral atau ukhrowiyah (masjid, belajar). Celakanya, kesan seperti itu tampak begitu kuat di kalangan umat Islam sendiri.

Dalam realitanya, cakrawala pandang kaum Muslim modern atas dua kehidupannya itu terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang lebih menitik beratkan pada urusan “pekerjaan” atau duniawiyah saja. Mereka sudah mencoba menampilkan kinerja yang professional, tetapi motivasi bekerjanya sangat rapuh, yakni sekadar mencari uang semata. Akibatnya, dari motivasi yang kurang lurus ini, keinginannya untuk berderma di jalan Allah amatlah minim. Ia merasa *eman* atau sayang untuk mengeluarkan sedekah, infaq, atau zakat, sebab ia merasa bahwa yang bekerja adalah dirinya sendiri, bukan orang lain.

Ia merasa bahwa kekayaan yang dimilikinya bukanlah anugerah dari Allah swt melainkan dari jerih payahnya sendiri. Jadi dalam mencari nafkah mereka begitu punya semangat yang tinggi dan etos kerja yang kuat. Dengankata lain, mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. *Ya'rifuuna dhaahiro min al hayati addunya wahum 'anil aakhiratihum ghaafiluun*. Mereka itu hanya tahu kulit lahir kehidupan dunia saja sedangkan untuk urusan akhirat mereka melalaikan. Akan tetapi untuk urusan ilmu atau belajar mereka cenderung mencukupkan diri dengan pengetahuan yang sudah terakumulasi sebelumnya.

Kelompok kedua adalah mereka yang menitikberatkan diri pada urusan ibadah/keilmuan. Kelompok ini cenderung gandrung pada urusan yang sifatnya “intelektual ritual”, namun kurang bisa menampilkan sikap yang professional dalam bekerja. Artinya pekerjaan yang mereka tunaikan kualitasnya amat rendah, tidak tepat waktu, dan

kurang cita rasa seni. Yang penting pekerjaan itu selesai merupakan salah satu semboyan mereka.

Tafsir sosiologis Kuntowijoyo tentang “pasar dan “masjid” tampaknya mendekati kenyataan yang menimpa pada sebagian besar kaum Muslimin sendiri. Ideologi “kaum pasar” semakin diperkuat dengan serbuan pandangan materialisme Barat yang sangat memuja materi atau keduniawiyahan. Materilah yang menjadi ukuran apakah seorang layak dihormati atau tidak, dihargai atau tidak, diakrabi atau dijauhi, bahkan dikawini. Kontribusi budaya massa seperti televisi, radio, majalah, dan surat kabar semakin memperteguh lagi pandangan dunia yang sebetulnya asing, dan sama sekali tidak berakar pada nadi kehidupan kaum Muslimin. Perantau Bawean generasi 90-an kesini, tampaknya masuk dalam kategori “kaum pasar”.

Sedangkan “kaum masjid” seakan-akan muncul di atas ketidak-berdayaan dalam menghadapi gelombang zaman. Sehingga “sufisme” menjadi salah satu lahan pelarian (eskapis) bagi mereka untuk menghindari kenyataan. Dan mereka berlindung dibalik istilah-istilah sabar, tawakal, zuhud dan sebagainya.

3.7 Penutup

“Orang Bawean merantau dengan agamanya”, yaitu Islam sebenarnya memiliki makna yang dalam. Dilihat dari segi etos kerja, sebagaimana didapatkan dari hasil penelitian lapangan, agama memang menjadi salah satu motivasi yang kuat sehingga merantau seakan-akan menjadi “wajib” bagi setiap keluarga Bawean. Tidak ada keluarga Bawean yang tidak pernah merasakan lika-likunya merantau ke luar pulaunya, bahkan juga ke luar negeri. Merantau dapat dikatakan adalah proses “hijrah” dari suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan, serba tak punya, serba kemiskinan, menuju kepada suatu kondisi yang berkecukupan untuk menuju kepada hidup dan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Syamsuddin. 1979. *Max Weber, Hidupnya, Karya-karyanya dan Sumbangannya*. Yogyakarta: Percetakan UII.
- Abdullah, Taufik (ed). 1988. "Tesis Weber dan Islam di Indonesia", dalam *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*. Jakarta: Penerbit Arga.
- Faisol, M. 2010. *Membangun Jiwa Entrepreneurship yang Sustainable Warga Bawean Memasuki Era Globalisasi*, Makalah Seminar disampaikan dalam Seminar Interaktif "Membangun Bawean Lewat Alam dan Budayanya. Bawean, 16 Maret.
- Hoogerwerf, A. 1966. *Notes on the Island of Bawean (Java sea), with special reference to the births*. Natural History Bulletin of Siam Society. 21:313-340.
- Luth, Thohir, Perut dan Nur Kholis, *Etos Kerja Dalam Islam*, Yogyakarta: Percetakan UII.
- Primack, J. Supriatna, M. Indrawan, dan Kramadibrata. 1998. *Biologi Konservasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Quswandhi, M. Dhiyauddin. 2008. *Waliyah Zainab Putri Pewaris Syeikh Siti Jenar: Sejarah Agama dan Peradaban Islam di Pulau Bawean*. Bawean: Yayasan Waliyah Zainab Dipinggo.

BAB IV

NELAYAN BAWEAN

Surmiati Ali

4.1 Pengantar

Desa Kepuh Teluk, lokasi penelitian ini, adalah suatu desa nelayan yang sangat unik berbeda dengan desa nelayan-nelayan di Indonesia. Desa ini cukup bersih dengan rumah-rumah mewah dengan fasilitas rumah tangga yang tidak kalah mewahnya dengan penduduk kota. Kebanyakan desa nelayan di Indonesia mencerminkan kemiskinan, rumahnya berdindingkan bambu dan kadang-kadang atapnya terdiri dari atap rumbia. Biasanya ketika memasuki desa sudah tercium bau anyir dan terkesan kumuh. Namun lain halnya Desa Kepuh Teluk terhindar dari semua itu, hanya salah satu ciri sebagai desa nelayan adalah terlihat berbagai jenis perahu nelayan di tepi pantai bersandar seperti perahu layar, sampan, jukung dan sebagainya.

Luas Desa Kepuh Teluk ini sekitar 863,12 Ha dengan perincian tanah sawah 59,00 Ha, tanah kering seluas 311,6 Ha, tanah pekarangan sekitar 73,90 Ha dan masih ada tanah desa 418,86 Ha. Secara Administratif Desa Kepuh Teluk berada dalam wilayah Kecamatan Tambak dan masuk Kabupaten Gersik. Jarak desa ini dengan kota Kecamatan hanya 7 km dan dengan kota Kabupaten Gersik sekitar 147 Km, dan dengan kota Provinsi Surabaya sekitar 250 km.

Meskipun pulau ini terpencil di ujung Timur sana, namun masyarakatnya cukup dinamis dengan mobilitas yang tinggi. Mereka tidak hanya menetap begitu saja di kampung, tetapi pergi belajar hampir ke seluruh di wilayah Indonesia dan merantau ke Malaysia dan Singapura. Hanya kendalanya adalah transportasi laut yang sangat terbatas dan jumlah penumpang kapal yang begitu padat. Persolan ini tentunya akan berakibat kepada keselamatan penumpang, sebagai

warga negara mereka perlu mendapat perhatian sebagaimana daerah-daerah lain.

Bentuk topografi desa sangat bervariasi antara dataran tinggi, perbukitan, dataran rendah dan sawah, dan dataran hutan berbagai jenis pohon tumbuh di desa ini terutama pohon kelapa. Pemukiman penduduk kebanyakan di dataran rendah dan sebagian penduduk yang lain bermukim di pinggir pantai. Sebenarnya penduduk lebih suka membuat rumah di daerah perbukitan, karena menurut mereka lebih aman. Pembangunan rumah di pinggir pantai sendiri terjadi setelah beberapa tahun terakhir ini. Lama kelamaan penduduk yang lain ikut membuat rumah juga di tepi pantai. Bangunan rumah mereka rata-rata pada ketinggian dua meter di atas permukaan air laut.

Sumber daya laut yang utama ditangkap oleh nelayan adalah ikan layang dan ikan tongkol. Jenis-jenis ikan lain di perairan Bawean sudah banyak berkurang, mungkin karena hutan bakau sudah musnah. Padahal, hutan ini tempat berlindung atau berpijaknya berbagai jenis ikan. Pada masa lalu cukup banyak hutan bakau tersebut, hal ini terlihat dari sisa-sisa masa lalu. Sayangnya, belum ada upaya masyarakat nelayan untuk menanam kembali hutan bakau sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan.

Desa Kepuh Teluk ini terletak di sebelah utara adalah Desa Ponggo, sebelah timur laut Jaut Jawa, di sebelah selatan Desa Kepuh Legundi dan sebelah Barat Desa Peromaan. Letak desa ini cukup strategis karena merupakan teluk, sering dijadikan tempat berlindungnya nelayan-nelayan dari Jawa yang sedang melakukan penangkapan ikan ketika cuaca tidak lagi bersahabat seperti angin badai ombak yang tinggi menerpa. Pada saat seperti ini nelayan-nelayan andon dari Jawa tersebut pergi berlindung ke Desa Kepuh Teluk sampai cuaca kembali normal. Perahu mereka biasanya bersandar sampai dua atau tiga hari. Ketika kapal-kapal mereka bersandar harus membayar uang kas kepada kepala desa, meskipun kegiatan penangkapan ikan sendiri tidak mendapatkan dari izin Dinas Perikanan setempat.

Jalan untuk menuju Desa Kepuh Teluk adalah jalan aspal biasa meskipun sebagian sudah rusak karena diterpa hujan setiap hari. Untuk mencapai kota kecamatan penduduk desa lebih menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil sewaan lainnya. Di sana belum ada kendaraan umum atau angkutan desa yang menghubungkan Desa Kepuh Teluk dengan desa lainnya.

4.2 Keadaan Penduduk dan Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kepuh Teluk di tahun 2009 sudah mencapai 4.692 jiwa, yaitu 2.414 jiwa laki-laki dan 2.278 jiwa perempuan yang terhimpun dalam 1000 kepala keluarga (KK), dan terdiri 668 rumah. Dari tahun ke tahun ada kecenderungan penduduk Desa Kepuh Teluk meninggalkan kampung dan pergi merantau ke Malaysia dan Singapura atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, setelah menamatkan sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah di daerah-daerah Jawa atau lainnya.

Tingkat pendidikan Desa Kepuh Teluk sudah cukup baik, meskipun pilihan pertama untuk sekolah anak-anak mereka adalah pesantren atau Aliyah setingkat SMA, ataupun sekolah umum seperti SMP atau SMA. Setelah anak-anak mereka tamat di kampung halaman atau tamat di pesantren baik yang ada di Bawean atau luar Bawean, sebagian mereka melanjutkan ke perguruan tinggi di daerah lain. Anak laki-laki biasanya cenderung memilih sekolah perkapalan dengan harapan setelah tamat bekerja di atas kapal. Anak-anak nelayan pada umumnya tidak mau mewarisi pekerjaan orang tua nya sebagai nelayan, karena bekerja sebagai nelayan tidak menjanjikan. Mereka lebih senang mencari pekerjaan yang lain.

Sarana pendidikan seperti gedung sekolah sebagian besar dibangun dengan swadaya masyarakat, baik dari tingkat sekolah Taman Kanak-kanak sampai tingkat Aliyah, kecuali SDN. Di desa ini terdapat dua buah TK, yaitu TK Aisyiah dan TK PGRI. Kemudian ada 3 buah SD Negeri terletak SD Kepuh Teluk 1, SD Kepuh Teluk II, SD Kepuh Teluk III. Sementara sekolah yang setingkat SMP dan SMA yang

terdapat di desa Kepuh Teluk ini adalah MDU Miftahul Jannah, MA Miftahul Huda, MA Ruhul Amin dan MI Langkap. Dilihat dari segi pendidikan yang ada dikampung tersebut maka tercermin bahwa pulau Bawean sebagai pulau santri.

Sarana peribadatan seperti masjid-masjid yang indah dan megah dibangun dengan biaya swadaya dari masyarakat, seperti Masjid Tanah Rata, Masjid Langkap dan Masjid Almuttaqin. Sementara itu terdapat juga mushalla di sudut-sudut desa, seperti Mushalla Nurul Hidayah, Mushalla Al-hikmah, Mushalla Hizajiah, Mushalla Teluk Emur, Mushalla Sumber, Mushalla Tanah Rata, dan Mushalla Pacinan. Banyaknya sarana peribadatan mencerminkan kepedulian masyarakat dengan agamanya dan juga mencerminkan tingkat ekonomi masyarakat yang relatif cukup baik, jika dibandingkan dengan desa-desa nelayan lainnya di Indonesia. Bangunan masjid dan mushalla tidak terlepas dari bantuan masyarakat perantauan yang bekerja di luar negeri.

Jenis pekerjaan selain nelayan di desa Kepuh Teluk ini juga ada seperti pegawai negeri sebanyak 12 orang, karyawan swasta 20 orang, pedagang 22 orang, tani/nelayan 603 orang, tani 807 orang, pertukangan 18 orang, dan pensiunan pegawai negeri 4 orang. Walaupun pekerjaan sebagai nelayan tercatat ada 603 orang, namun pekerjaan ini kurang ditekuni dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi nelayan tangguh, seperti ketua nelayan dan beberapa anggota

4.3 Mata Pencaharian dan Kondisi Perekonomian

Kehidupan masyarakat nelayan di pulau Bawean tidaklah dapat dikatakan miskin, meskipun mata pencaharian mereka, tampaknya masih subsisten. Mereka lebih banyak menangkap ikan untuk kebutuhan sendiri dan sisanya baru dijual ke pasar. Uniknnya nelayan di Desa Kepuh Teluk tidak terlalu tergantung dengan hasil tangkapan ikan di laut. Mereka tidak terlalu serius untuk menekuni pekerjaannya sebagai nelayan. Hal ini ada kaitannya dengan sumberdaya laut yang sudah sangat berkurang dari hari ke hari. Di lain pihak kehidupan ekonomi mereka tidak terpengaruh dengan musim barat ataupun musim

paceklik. Karena memang tidak ada musim paceklik di masyarakat Pulau Bawean ini, meskipun ada angin barat dan mereka tidak turun ke laut. Mereka sepertinya tidak memiliki masalah dan tidak pula adanya kekurangan bahan makanan pangan.

Meskipun demikian menurut seorang nelayan senior bahwa musim paceklik hampir tidak ada di pulau Bawean, karena mereka tidak merasakannya. Mereka masih bertahan hidup dengan normal. Hasil tangkapan mereka pada umumnya hanya dua macam jenis ikan, yaitu ikan layang dan ikan tongkol. Ikan layang musimnya jatuh pada bulan Juli, sementara itu ikan tongkol tidak bermusim. Ikan jenis ini dapat ditangkap setiap hari dan sepanjang tahun.

Ikan layang ditangkap dengan menggunakan sampan, dan wilayah penangkapannya berada di sebelah timur Pulau Bawean. Di sana, rumpung sudah disediakan. Prosesnya, setelah ikan layang banyak masuk ke dalam rumpung, barulah dilakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan menggunakan jaring. Oleh karena itu, menangkap ikan layang ini umumnya dilakukan melalui kerja kelompok. Jumlah ABK biasanya 8 atau 9 orang, terdiri dari satu orang pemilik perahu dan satu orang lagi pemilik mesin dan sisanya adalah buruh nelayan. Mereka menangkap ikan ini pada musim-musim tertentu, seperti bulan Juli sampai September.

Pada tahun 1980-an, ikan layang sangat berlimpah ruah kalau musimnya sudah tiba. Saat itu, sebagian masyarakat ada yang menjadi perajin ikan asin, karena banyaknya ikan yang tidak bisa habis terjual di pasar. Pada masa lalu, ikan asin Bawean seperti ini cukup terkenal. Namun, di masa sekarang, pengasinan ikan secara besar-besaran seperti masa lalu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah pengasinan untuk kebutuhan keluarga mereka sendiri. Hal ini terjadi karena hasil produksi ikan jumlahnya sudah sangat berkurang, sementara permintaan pasar cukup tinggi terhadap ikan segar. Selain itu, para perajin juga tidak dapat memenuhi permintaan, karena hasil produksi ikannya sendiri kadang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, penangkapan ikan layang adalah kerjasama kelompok, oleh karena itu di sana terdapat sistem bagi hasil. Sistem ini ditentukan berdasarkan fungsinya masing-masing, seperti pemilik perahu, pemilik mesin, dan pekerja. Misalnya, untuk pemilik perahu diberikan dua bagian dan untuk pemilik mesin juga dua bagian. Seandainya mereka mendapatkan hasil tangkapan berjumlah Rp 1.000.000, maka untuk pemilik perahu sebesar Rp 250.000, untuk pemilik mesin Rp 250.000, dan ABK mendapat Rp 300.000 yang terbagi berdasarkan jumlah ABKnya. Selebihnya digunakan untuk tambahan modal.

Untuk meningkatkan produksi ikan dan hasil yang lebih baik serta terhindar dari bahaya ketika hendak melaut, masyarakat kampung mengadakan suatu upacara selamatan pantai, seperti upacara pada tanggal 22 Juni 2010 yang lalu. Upacara selamatan pantai ini biasanya dilakukan pada malam hari, agar tidak mengganggu pekerjaan pada siang hari. Menurut para nelayan, selamatan pantai perlu diadakan agar hasil tangkapan mereka berlimpah ruah dan terhindar dari bahaya. Upacaran ini diisi dengan kegiatan keagamaan yang intinya permohonan kepada Allah swt.

Oleh karena itu, mereka mengadakan doa bersama, beristighasah dan berzikir bersama memohon kepada Allah agar hasil tangkapan mereka lebih banyak. Dalam upacara selamatan pantai ini dihadiri oleh pemimpin desa, seperti kepala desa, Dinas Perikanan, pemuka masyarakat dan ketua nelayan. Semua tokoh ini memberikan kata sambutan sesuai kedudukan mereka masing-masing. Setelah selesai, mereka berzikir dan berdoa, dan diakhiri dengan mengadakan makan bersama seluruh anggota masyarakat, baik petani maupun nelayan.

Dari upacara tersebut tercermin, bahwa masyarakat Kepuh Teluk adalah pemeluk Islam yang taat dan patuh terhadap ajaran agamanya. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya unsur-unsur musyrik, seperti sesajen atau jampi-jampi sebagaimana yang dilakukan dalam upacara-upacara nelayan di daerah lain. Dalam upacara

masyarakat Kepuh Teluk ini, doa hanya ditujukan kepada Allah semata. Zikir dan doa dimaksudkan agar hasil laut berlimpah ruah dan para nelayan terhindar dari bahaya dan malapetaka di laut, terutama pada saat musim ikan tiba.

Kemudian bagaimana dengan ikan tongkol? sebagaimana telah dijelaskan bahwa ikan tongkol tidak bermusim. Ikan ini dapat ditangkap sepanjang musim dengan menggunakan pancing. Armada penangkapan adalah perahu motor, dengan daya jelajah sekitar 40 sampai 50 mil lepas pantai. Perahu yang digunakan untuk menangkap ikan tongkol ini adalah perahu klotok, dan dapat dilakukan oleh seorang nelayan saja. Oleh karena itu, penangkapan ikan tongkol tidak perlu kerja kelompok sebagaimana penangkapan ikan layang yang membutuhkan banyak orang. Hasil penangkapan ikan tongkol cukup lumayan, kalau nasib mereka lagi beruntung, seorang nelayan bisa mendapat ikan banyak, misalnya jika mereka memperoleh 50 ekor ikan misalnya, jika dijual satu ekor Rp. 20.000, maka mereka akan mendapat Rp. 1.000.000.

Nelayan ikan tongkol cukup beruntung kalau kebetulan mendapat hasil tangkapan banyak, namun akan sangat mengecewakan ketika mendapat ikan hanya dua sampai tiga ekor. Padahal berangkat melaut mulai dari subuh sampai sore hari dan dengan biaya atau modal yang cukup mahal untuk membeli bahan bakar sampai ratusan ribu rupiah. Namun hasil yang diperoleh sangat tidak sesuai dengan biaya modal yang dikeluarkan.

Oleh karena itu sebagian nelayan malas pergi melaut karena modal yang cukup mahal tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan saat melaut, kenyataannya sangat merugi. Hasil tangkapan sering tidak berimbang dengan modal, sehingga rugi biaya bahan bakar dan membuang waktu karena harus berangkat setelah subuh dan pulang sore harinya.

Satu perahu Klotok sendiri harganya mencapai 30 juta rupiah dengan panjang 10 meter, lebar 2 meter dan tinggi 4.5 meter, belum

lagi perawatan perahu, dan ditambah lagi biaya melaut seperti bahan bakar dan biaya lainnya. Hal inilah yang membuat mereka tidak lagi serius mencari ikan dan bekerja sebagai nelayan, namun mereka masih tetap bertahan hidup. Selain dua jenis ikan yang ditangkap: tongkol dan ikan layang, masih ada lagi jenis ikan yang lain ditangkap nelayan dengan menggunakan perahu jangkung. Perahu jangkung ini adalah ukuran perahu kecil yang digunakan oleh nelayan untuk semua jenis ikan kecil terutama untuk jenis sontong. Perahu ini masih tradisional sekali karena masih menggunakan layar dan dayung. Hasil tangkapan nelayan dengan perahu ini memang tidak banyak. Menurut para nelayan kalau mereka lagi beruntung, hasil tangkapan mereka cukup banyak setelah diambil untuk konsumsi rumah tangga dan sisanya baru mereka jual ke pasar. Pemasaran ikan sangat mudah oleh nelayan ini, karena lokasi pasar terletak di tepi pantai dan tidak jauh dari jalan raya. Di lain pihak tengkulak juga tidak ada, biasanya hasil tangkapan nelayan habis terjual untuk konsumsi masyarakat di desa tersebut.

Bahkan, di tengah laut juga sering terjadi transaksi hasil tangkapan terutama ikan tongkol dan ikan layang, hasil tangkapan mereka dibeli oleh pembeli dari Masalembo dari Madura Jawa Timur dan bahkan dari Muara Angke. Jadi mereka tidak perlu lagi menjual ikan ke darat karena sudah dibeli di tengah laut. Oleh karena itu ikan segar seperti tongkol dan ikan lainnya sebenarnya tidak pernah bersisa, selalu habis terjual bahkan sebenarnya masih kurang, karena peminat ikan segar dari hari ke hari semakin meningkat.

Sebagaimana dijelaskan, kendalanya adalah bahwa nelayan-nelayan di Kepuh Teluk ini kurang serius mencari ikan karena bahan bakar cukup mahal dan hasil tangkapan yang sangat kurang di perairan pulau Bawean. Hal ini terjadi karena penurunan sumberdaya akibat banyaknya operasi kapal-kapal nelayan luar yang menggunakan berbagai alat tangkap yang merusak sumberdaya laut di Bawean, lebih khusus di wilayah tangkapan Desa Kepuh Teluk.

4.4 Pencurian Ikan dan Kondisi Perairan

Pada umumnya masyarakat nelayan Kepuh Teluk adalah nelayan tradisional, karena sebagian besar mereka masih menggunakan alat tangkap pancing sekitar 75 % dan selebihnya menggunakan pukat yang berukuran sedang dan ramah lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hanya dua jenis ikan yang ditangkap, yaitu tongkol dan ikan layang, ikan tongkol ditangkap dengan pancing dan ikan layang ditangkap dengan pukat.

Pada musim ikan tongkol mereka dapat memperoleh satu kuintal sampai dua kuintal, sedangkan jelajah penangkapan mereka sejauh 4 sampai 5 mil lepas pantai. Ikan layang ditangkap di lokasi rumput yang mereka buat di tengah laut dengan menggunakan pukat yang sangat ramah lingkungan, artinya tidak seperti nelayan-nelayan *poursaine* dari pulau Jawa yang mengoperasikan alat tangkap yang sangat over eksploitasi.

Di lain pihak nelayan andon atau pendatang dari Belimbing atau Tegal, Pekalongan, Jepara Lamongan Pemalang, dan Pati menangkap ikan dengan bebas di perairan Bawean tanpa mendapatkan surat izin dari Dinas Perikanan Bawean. Mereka menggunakan pukat harimau yang sangat berbeda dengan alat tangkap nelayan Bawean. Alat tangkap ini panjangnya sampai ke dasar laut, sehingga menyapu habis semua bibit ikan dan semua jenis biota laut. Alat tangkap yang merusak inilah yang menyebabkan penurunan sumberdaya laut, sehingga nelayan setempat yang menggunakan peralatan yang sangat sederhana sangat tidak beruntung karena penghasilannya dari hari ke hari menurun. Dalam hal ini sering terjadi konflik, antara nelayan pendatang dengan nelayan setempat bahkan sering terjadi pengusiran, namun nelayan andon dari Jawa masih tetap saja datang ke lokasi perairan mereka.

Nelayan-nelayan pendatang ini dengan bebas mencuri ikan di perairan Bawean, namun ketika terancam bahaya di tengah laut oleh angin barat dan gelombang pasang yang menerpa mereka saat mengeksploitasi ikan di perairan Pulau Bawean, maka untuk sementara

mereka pergi mencari perlindungan dan berlabuh menuju ke pantai Kepuh Teluk yang terletak paling ujung timur. Setelah cuaca kembali normal, mereka pergi kembali mencari ikan. Pantai Kepuh Teluk ini sering dijadikan tempat berlindung para nelayan trol dari Jawa di musim angin barat, gelombang pasang dan angin badai.

Kapal-kapal mereka bersandar dua atau tiga hari di pantai sampai menunggu cuaca normal kembali. Karena persiapan makan mereka sudah habis, mereka dapat berbelanja di pasar Kepuh Teluk, baik berupa hasil pertanian masyarakat setempat ataupun makanan yang lain, demikian juga dengan peralatan melaut yang sudah tersedia dekat pantai Kepuh Teluk.

Setelah perlengkapan melaut sudah terpenuhi dan suasana kembali normal mereka baru kembali melaut. Nelayan luar pulau Bawean yang berlindung di pantai Kepuh Teluk ini, dikenakan biaya Rp. 50.000 untuk setiap kapalnya. Masalahnya akan muncul ketika para nelayan tersebut belum mendapatkan hasil tangkapan karena terlebih dahulu terkena ombak atau badai.

Persoalan ini sebenarnya mempunyai dua mata sisi, satu sisi masyarakat mendapat keuntungan karena hasil pertanian dan hasil usaha masyarakat yang lain dapat dibeli oleh para nelayan pendatang. Di pihak lain masyarakat tidak menginginkan para nelayan ini memasuki perairan mereka, karena nelayan pendatang tersebut menggunakan alat tangkap yang berbahaya terhadap sumber daya dan berbeda dengan alat tangkap masyarakat setempat yang masih sangat sederhana.

Masyarakat setempat hanya menggunakan peralatan pancing dan pukot yang ramah lingkungan, sementara nelayan pendatang menggunakan alat tangkap over eksploitasi yang menguras semua bibit ikan di laut. Persoalan seperti ini sering menimbulkan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang. Nelayan lokal sudah tentu cemburu terhadap nelayan pendatang, karena mereka dengan bebas memasuki perairan Bawean. Sementara aparat desa sendiri memperoleh hasil dari nelayan pendatang ini meskipun tidak banyak.

Kecemburuan terhadap nelayan pendatang diungkapkan oleh seorang ketua kelompok nelayan. Ia mengatakan: kalau nelayan yang sedang mendapat ancaman badai atau ombak mereka dapat berlindung ke pantai Kepuh Teluk, bagaimana dengan nelayan-nelayan yang selamat? Mereka tidak singgah ke pantai Kepuh Teluk dan membawa hasil tangkapan yang begitu banyak. Menurutnya, tentu jumlahnya lebih banyak lagi.

Penurunan sumber daya akibat alat tangkap yang berbahaya memang sudah dirasakan oleh masyarakat, namun belum ada penyelesaian bahkan sampai hari ini. Pak Sahan (51 tahun) membandingkan, pada masa lalu, meskipun menggunakan peralatan sederhana hasilnya lumayan. Dia “mengatakan sejak tahun 1973 mereka sudah memakai perahu layar atau dalam bahasa setempat (jukung), besar perahu jukung sekitar 6 x 7 meter. Alat tangkap kebanyakan nelayan adalah pancing untuk memancing ikan tongkol.

Di samping itu, mereka juga menggunakan pukot atau jaring yang berukuran kecil, sekitar 20 meter panjang dan 12 meter lebar. Meskipun peralatan sederhana, karena pada masa itu ikan masih banyak dan berlimpah, maka penghasilan di laut mendukung perekonomian banyak warga Kepuh Teluk. Oleh karena itu, pergi memancing tidak perlu jauh-jauh lepas pantai, karena berbagai jenis ikan pun sangat mudah diperoleh. Karena sumberdaya pada masa itu masih lestari dan belum banyak nelayan yang beroperasi di perairan Bawean.

Nelayan pendatang ini juga kadang-kadang sangat mengganggu dan merugikan nelayan lokal ketika sedang panen ikan layang. Hasil panen mereka jauh berkurang karena ikan yang semestinya masuk ke dalam rumpung justru terserap ke dalam *poursain* nelayan pendatang. Padahal, dari bulan Juli sampai Oktober selama tiga bulan, pada musim inilah nelayan lokal berupaya menangkap ikan di perairan Bawean, sebagaimana dikeluhkan oleh ketua nelayan.

Bagaimana tidak terganggu, nelayan pendatang melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah

lingkungan, dan berbeda pula dengan nelayan setempat. Nelayan setempat menggunakan pukat atau jaring 5 meter ke bawah dan paling dalam 10 meter.” Sementara itu, *poursain* yang digunakan nelayan pandatang panjangnya sampai ke dasar laut. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan luar ini sudah tentu menguras perairan orang Bawean. Inilah yang membuat hasil tangkapan mereka jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun 1970-an.

Ada cerita seorang nelayan mengenai pengalaman melautnya sejak tahun 1980-an sampai hari ini. Menurutny, “hasil tangkapan pada masa itu sangat lumayan dan membuat mereka betah menjadi nelayan di kampung sendiri. Hasil tangkapan yang begitu banyak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi sekarang, dari penghasilan melaut sudah sangat jauh berkurang”. Hal ini lah yang membuat banyak nelayan untuk pergi meninggalkan kampung dan menyusul pergi sanak saudara mereka yang merantau ke Malaysia. Meskipun ada bantuan uang yang dikirimkan setiap bulan dari sanak saudara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keinginan kuatnya untuk merantau di negeri orang tetap saja ada. Ada juga sebagian nelayan yang tetap bertahan hidup dan tinggal di kampung dari hasil laut apa adanya yang diperoleh setiap harinya dan menunggu kiriman dari sanak keluarga di Singapura atau Malaysia.

Kehidupan mereka memang tidak dapat dikatakan miskin, karena bagaimana pun juga uang ringgit atau pun dolar Singapura tetap mengalir ke keluarganya. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat mempunyai jiwa perantau yang sangat tinggi, mereka selalu berkeinginan untuk pergi ke Malaysia dan Singapura dalam rangka mencapai hidup yang lebih baik sebagaimana tetangganya yang lain.

Bagi mereka yang betul-betul berjiwa nelayan, atau nelayan yang tangguh akan dapat hidup bertahan sebagai nelayan di kampungnya sendiri. Mereka tetap mencari ikan terutama ikan layang dan ikan tongkol untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ini lah yang termasuk orang-orang yang tidak terlalu memikirkan untuk pergi

merantau atau pun beralih profesi. Mereka setia menekuni pencarian ikan. Menurut mereka, menjual hasil tangkapan juga tidak susah, pembeli sudah menunggu di pasar yang tidak begitu jauh dari pantai. Bahkan, sebagian nelayan ada juga yang mau menggunakan perahunya untuk membawa jenazah dari Malaysia atau Gresik untuk pulang ke Pulau Bawean, dengan harga sewa jutaan rupiah. Padahal, jarak antara Gresik dan Pulau Bawean hanya 180 km. Perahu yang digunakan sudah tentu perahu yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan tongkol. Penggunaan perahu untuk membawa jenazah ini cukup menguntungkan, khususnya bagi nelayan yang malas turun ke laut.

Menurut seorang nelayan, dahulu ia ingin beralih profesi ke bidang lain seperti supir, sehingga bisa bekerja di luar kampung atau pergi merantau ke Malaysia. Pada tahun 1979, niatnya untuk meninggalkan pekerjaan nelayan diujudkannya. Pada masanya sebagai nelayan, belum ada perahu yang menggunakan mesin (perahu motor). Semua perahu baru menggunakan layar yang mangandalkan tenaga angin. Hal ini berlangsung sampai tahun 1993. Inilah yang menyebabkan orang tersebut meninggalkan kampungnya untuk beralih profesi.

Pak Andi meneruskan ceritanya mengenai kondisi nelayan di masa lalu itu, dia mengatakan pada awalnya masyarakat menggunakan perahu motor 5 sampai 9 PK, kemudian meningkat sampai 10 PK sampai 15 PK, dan sekarang masyarakat menggunakan sudah lebih besar lagi, yaitu 11 sampai 31 PK. Kekuatan jelajahnya untuk mencari ikan mencapai 40 mil sampai 60 mil. Namun demikian, ikan pun masih sulit dicari, sehingga ia pun ingin tetap merantau.

Dia melanjutkan ceritanya, sebagai seorang nelayan ia pun memiliki rutinitas sehari-hari. Ia biasanya akan berangkat pagi hari sekitar jam 4 subuh dan pulang dari laut sekitar pukul 5 sore dan bahkan sampai malam hari di rumah. Hasil yang dia peroleh cukup lumayan kalau lagi musimnya, bisa mencapai ratusan ekor, meskipun hanya dengan menggunakan pancing. Kalau sekarang, seekor ikan tongkol harganya sudah mencapai Rp15.000. Hasil tangkapan ini dapat

dia jual ke pasar lokal dan kadang-kadang juga dijual di tengah laut kepada tengkulak yang datang dari Jawa. Sehingga dia pulang sudah membawa uang. Bagaimana pun juga sumberdaya laut di pulau Bawean tidak seperti masa-masa lalu, cukup berlimpah tapi sekarang sudah banyak berkurang sebagai akibat penangkapan dari nelayan pendatang. Sekarang hasil yang diperoleh tidak berimbang dengan bahan bakar yang digunakan.

Memang tidak dapat disangkal bahwa kondisi perairan di Pulau Bawean sekarang sudah sangat berbeda dibanding dengan tempo dulu. Jumlah ikan sekarang sudah sangat berkurang karena banyak pencurian ikan dari nelayan-nelayan Pulau Jawa dan juga para pelaku perusak yang berasal dari orang Bawean sendiri. Perilaku merusak itu seperti menangkap ikan dengan menggunakan potasium dan bahan kimia lain yang berbahaya, bahkan ada juga yang menggunakan bom. Sayangnya, meskipun sudah ada pelarangan dari Dinas Perikanan, namun masih ada saja yang berani menggunakan alat-alat terlarang tersebut.

Ada juga di antara mereka yang menyelam pakai masker sampai ke dasar laut untuk mencari teripang, sehingga berpotensi merusak terumbu karang. Kerusakan terumbu karang di Pulau Bawean sudah mencapai 75 %. Dalam hal ini pemerintah setempat belum mempunyai peraturan untuk menjerat para pelaku yang merusak itu. Tetapi, sebagian masyarakat sudah ada keinginan untuk sama-sama melarang, termasuk kepada nelayan pendatang Jawa yang menggunakan alat tangkap yang terlarang.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungannya memang belum begitu ada. Hal ini terlihat dari pengurusan pasir-pasir di sepanjang pantai, demi memenuhi peningkatan kebutuhan pasir untuk pembangunan rumah-rumah mewah masyarakat. Banyak pantai menjadi longsor (abrasi). Hal ini sangat sulit dicegah karena menurut pengakuan masyarakat daerah-daerah pantai adalah milik pribadi. Mereka bisa berbuat sesuka hati meskipun akan membahayakan lingkungan secara keseluruhan. Demikian pula

kebiasaan masyarakat yang senantiasa membuang sampah ke tepi pantai ataupun ke sungai. Semua itu menjadi pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Padahal kampung Kepuh Teluk sebenarnya tidak kalah indahnya jika dibandingkan dengan pulau Bali. Pemandangan alam yang indah berupa susunan sawah yang membentang hijau, dan jika melihat ke atas akan terlihat bukit-bukit atau tebing-tebing yang indah. Ada pula danau di atas bukit dan muara air panas, yang semuanya itu belum dikelola oleh pemerintah daerah sebagai obyek wisata.

Perhatian pemerintah sudah seharusnya diwujudkan terutama dalam pengelolaan wilayah pantai. Jika kita mengacu kepada UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah sebenarnya diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan wilayah laut, yaitu 12 mil dari pantai ke arah laut lepas. Semestinya hal ini sudah direspon oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan tata ruang, pengaturan administrasi, dan penegakan hukum yang semestinya telah ditegakkan oleh daerah, namun sampai hari ini belum banyak juga direspon oleh pemerintah daerah.

Kalau pemerintah saja masih belum memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, baik yang di laut maupun yang di darat, bagaimana dengan masyarakatnya? Dalam hal ini kondisi masyarakat tidak dapat disalahkan karena belum ada penegakan hukum yang jelas, sehingga pengerukan pasir masih berjalan terus dan tidak dapat dilarang. Penangkapan ikan dengan alat-alat terlarang juga masih ada yang dilakukan oleh masyarakat. Namun ada juga sekelompok masyarakat yang masih peduli dengan lingkungan terutama dalam hal penanam pohon bakau di pantai. Orang tersebut, ketua kelompoknya, pernah datang ke Jakarta untuk mendapat hadiah Kalpataru pada masa Presiden Suharto.

4.5 Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Persoalan

Ada beberapa masalah yang dihadapi nelayan Bawean saat mencari nafkah di laut, seperti pencurian ikan oleh nelayan andon dari Jawa, penangkapan ikan dengan cara merusak serta pemutusan rumput-rumpong masyarakat oleh perusahaan yang mencari sumber minyak di perairan Bawean. Para nelayan pun menyadari hal itu, mereka kemudian berkumpul mengadakan rapat untuk mencari solusi atau penyelesaian masalah yang timbul, terutama soal nelayan andon. Mereka akhirnya sepakat membentuk suatu organisasi yang disebut Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas), tanggal 7 Juli 2008.

Pokwas atau Kelompok Pengawas masyarakat ini bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Salah satu ketetapannya adalah bahwa setiap nelayan diwajibkan mendaftarkan usaha penangkapannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini ditujukan agar tidak lagi terjadi konflik antara nelayan dan perusahaan yang beroperasi di perairan Bawean atau pun dengan nelayan-nelayan pendatang. Mereka harus mendaftarkan usaha penangkapan ikan, dan mencatat jenis usahanya, baik perorangan atau pun kelompok. Setelah itu, perahu nelayan akan diberi nomor seri perahu untuk lebih mengenalnya di tengah laut. Harus juga disebutkan dalam pendaftaran itu nama pemilik perahu atau kapal dan wilayah penangkapan atau pembuatan rumput, bahan pembuatan rumput serta kedalaman rumput. Masa berlaku tanda pendaftaran ini adalah selama satu tahun, yaitu sejak tanggal penerbitannya.

Apabila masyarakat nelayan telah terdaftar semuanya dan sudah diketahui jenis perahu atau kapal dalam usaha penangkapan ikannya, termasuk telah diberi nomor dan lokasi rumputnya masing-masing, maka dengan mudah akan dapat dikenali jelas siapa pelaku perusak yang tidak bertanggung jawab itu. Dengan demikian, nelayan pendatang tidak lagi akan berani memutus rumput nelayan setempat. Apabila masih terjadi pelanggaran dengan sengaja, maka dengan mudah masyarakat akan menuntut kerugian sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan.

Selama ini masyarakat Kepuh Teluk merasa dirugikan karena rumpong-rumpong mereka sering diputus, tidak pernah diganti dan tidak ada pula yang bertanggung jawab. Karena saat itu, semua peralatan dan usaha masyarakat nelayan belum terdaftar dengan baik. Meskipun tujuan ini baik, masih banyak nelayan yang belum mendaftarkan jenis usahanya. Ketua nelayan sendiri sudah berulang kali mengundang untuk mengikuti rapat dan mengisi formulir yang sudah disediakan, tetapi sedikit sekali nelayan yang mau datang.

Ketua nelayan mengeluh begitu susahnyanya mengumpulkan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Semua program yang tujuannya baik, diajak berembuk dan diberikan pengertian dalam menyelesaikan berbagai masalah kenelayanan seringkali diartikan lain atau bahkan bersifat acuh. Jika kita melihat kondisi seperti ini, semakin terlihat jelas ketidakseriusan mereka bekerja sebagai nelayan. Di Bawean, akhirnya pekerjaan nelayan hanya lah sampingan. Meskipun begitu kehidupan dan kondisi ekonomi mereka tidak banyak terganggu, karena adanya subsidi dari keluarga di luar negeri.

4.6 Penutup

Menjadi nelayan sebagai satu jenis “pekerjaan domestik” bagi orang Bawean, ternyata pada saat ini tidak lagi banyak diharapkan hasilnya. Dalam pengertian hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang akrab dengan wilayah laut tersebut, semakin menurun dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Terjadinya kemerosotan hasil karena sudah banyak masalah yang menjadi tantangan bagi para nelayan, seperti mulai dari masuknya nelayan luar ke wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) para nelayan Bawean, masalah modal kerja yang seringkali lebih besar daripada hasil yang diperoleh, sampai kepada persoalan iklim dan kondisi lingkungan yang kadang-kadang tidak menunjang. Selain itu, menjadi nelayan bagi warga Bawean saat ini seakan-akan hanya mencari “kesibukan alternatif” di masa transisi menantikan waktu tepat untuk ikut serta merantau ke luar negeri.

Pustaka Acuan

- Adhuri, Dedi S. 2005. *Fishing in, Fishing Out: Memahami Konflik-konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: LIPI Press.
- , dkk. 2006. *Konflik-konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola, Akar Masalah & Resolusinya, Studi Kasus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kep. Riau*. Jakarta: LIPI Press.
- Koordinator Statistik Kecamatan Sangkapura. 2008. *Kecamatan Sangkapura dalam Angka*. Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
- Koordinator Statistik Kecamatan Tambak. 2008. *Kecamatan Tambak dalam Angka*. Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik
- Panitia Nasional Penelitian Laut (PNPL). 1974. *Metodologi Penelitian tentang Laut*. Jakarta: Depdikbud.

BAB V

BUDAYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PULAU BAWEAN

M. Alie Humaedi

5.1 Mempersoalkan Keterbatasan: Pengantar

Sedikitnya ada tiga sudut pandang dalam melihat strategi hidup masyarakat pulau dari sisi ketahanan pangan, seperti pulau Bawean, yaitu: (1) hubungannya dengan wilayah lain; (2) peranan dan kepemimpinan (*leadership*) para elite lokal dalam menggerakkan aktivitas sosial ekonomi dan sistem sosial yang ada; dan (3) perkembangan kewilayahan itu sendiri.

Aspek pertama berhubungan dengan tata letak dan titik konsentris antara satu pulau dengan pulau lain. Hubungan ini biasanya diikat melalui moda transportasi, sebagai sarana distribusi komoditas dan produksi yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ini terlihat jelas antara masyarakat pulau Bawean dengan Gresik dan Banjarmasin; bisa juga antara pulau Menjangan dengan kepulauan Batam. Selain hubungan bersifat ekonomis, hubungan ini biasanya diikat dengan aspek sosial seperti jejaring pendidikan, keagamaan, bahkan mitologi yang berkembang. Seperti ikatan sosial yang dibangun antara masyarakat pulau Bawean dengan Malaysia dalam soal ekonomi dan kekerabatan, atau antara pulau Bawean dengan wilayah Jawa Timur lain, dimana Pesantren Sidogiri misalnya menjadi tempat para santri Bawean belajar.

Aspek kedua, berhubungan dengan dinamika lokal dari struktur sosial yang membentuk dan menghiasi sistem sosial yang berlaku di masyarakatnya. Aspek ini menjadi penting, karena dapat memerikan potensi kearifan lokal dari tindakan-tindakan kebudayaan masyarakat, sebagai usahanya dalam bertahan hidup. Aspek ini berhubungan erat dengan religi, adat, dan mitologi yang berkembang di

masyarakat yang dapat saja membentuk suatu pandangan hidup dan etos dalam kerja (nilai hidup). Sementara itu, aspek ketiga, berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu pulau. Potensi ini dapat ditumbuhkembangkan, tentu dengan jaringan dari luar pulau, sehingga akan mempengaruhi perkembangan wilayahnya. Aspek ini terlihat nyata dalam soal lahan, permukiman, prasarana, relasi sosial yang dibangun, dan organisasi-organisasi sosial yang ada dan masuk.

Dengan tiga sudut pandang di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan diri pada aspek ketahanan pangan di tengah merebaknya jajanan dan budaya konsumsi lainnya. Asumsinya dilandaskan pada konsepsi bahwa tidaklah masuk akal bila suatu masyarakat yang tinggal di pulau, tidak memiliki kearifan lokal dalam soal pangan. Diversifikasi beserta cara pembudidayaan dan pengolahan pangan pasca panen tentu ada, seiring tumbuh kembangnya masyarakat kepulauan.

Pangan tidak hanya diartikan beras, tetapi juga jenis-jenis lain, seperti sagu dan umbi-umbian. Demikian juga, cara pengolahan pasca panen pun pasti dikenal masyarakat. Terlebih ketika dahulu masyarakat Bawean mengenal *durung*, sebagai tempat olah dan simpan pangan hasil olahan di sawah dan hutannya. Pangan akan berkembang seturut temu-kenalnya masyarakat dengan jajanan yang berasal dari wilayah luar; dan pangan jenis lokal pun.

Dengan kenyataan seperti ini, patut diajukan dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana strategi bertahan hidup yang dibangun, dikenal, dan dijalankan oleh masyarakat pulau Bawean di bidang ketahanan pangan? *Kedua*, bagaimana strategi bertahan hidup dalam nilai kebudayaannya dipraktikkan ketika ada unsur-unsur kebudayaan luar berupa budaya konsumsi hadir di sekitaran kehidupan masyarakat? Dengan permasalahan yang ada seperti ini, maka sasaran penelitiannya adalah keseluruhan nilai dan praktik kebudayaan masyarakat di pulau Bawean yang mengarah pada upaya-upaya pembentukan strategi bertahan hidup di bidang ketahanan pangan, khususnya dari keterbatasan pangan.

Aspek ketahanan pangan yang dilihat adalah upaya dan strategi masyarakat dalam mengembangkan tanaman padi ladang untuk kecukupan kebutuhan pangan pokok dan revitalisasi lembaga tradisi *durung*. Secara umum, penelitian ini dimaksudkan mencari model pengembangan dan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Dalam kapasitas ini, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air.

5.2 Pola Ketahanan Pangan: Suatu Kerangka Pemikiran

Ketahanan pangan atau *food security*, sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat. Artinya, setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam Undang-undang RI, Nomor 7 Tahun 1996¹ disebutkan sebagai berikut: “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan² bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau”. Dari definisi UU ketahanan pangan seolah dekat dalam pengertian swasembada. Dari dua pengertian ini, ketahanan pangan dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama, yaitu: a. Kecukupan (ketersediaan) pangan. b. Stabilitas ekonomi pangan c. Akses fisik dan ekonomi individu untuk mendapatkan pangan.

¹Indonesia menerima konsep ketahanan pangan, yang dilegitimasi pada Undang-undang pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Indonesia memasukkan mutu, keamanan, dan keragaman sebagai kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata dan terjangkau.

²Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.

Secara singkat, ketahanan pangan minimal harus mempunyai dua unsur pokok, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Sayangnya tidak pernah dipermasalahkan soal sumber pangannya, apakah dari dalam negeri atau impor. Persoalan ini semakin nyata ketika kebijakan pemerintah tidak mendorong terjadinya revitalisasi produksi pertanian dalam negeri. Bisa saja sebaliknya, kebijakan malah memberikan peluang baik bagi pengadaan sumber pangan yang berasal dari import, misalnya dengan cara regulasi non-pajak bagi komoditas impor tertentu.

Secara umum, konsep ketahanan pangan dapat diterapkan dalam beberapa tingkatan, yaitu global, nasional, regional, serta rumah tangga dan individu. Tiga tingkat itu (global, nasional, dan regional) ketahanan pangan tersebut tidak menjadi fokus penelitian ini. Dengan banyak pertimbangan, penelitian ini mengkhususkan pada tingkat rumah tangga dan individu pada sebuah kehidupan masyarakat pulau. Ketahanan pangan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan beragam sesuai budaya setempat, baik dari produk sendiri atau membeli dari waktu ke waktu agar hidup sehat.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan, khususnya ketika aspek ini semata ditentukan oleh nilai ekonomis beras. Penelitian Sayogyo (1988) tentang konsumsi harian beras per setiap penduduk di suatu desa di pedesaan Jawa telah memberi gambaran bahwa beras menjadi nilai atau standar suatu rumah tangga dapat berkecukupan pangan. Karena itu ia menjadi determinan utama kemiskinan di tingkat rumah tangga.

Argumentasi sederhananya, karena beras adalah komoditas pertanian paling penting di Indonesia, terutama bagi kelompok sosial ekonomi rendah. Walaupun argumentasi ini merupakan hasil bentukan panjang dari “politik beras” dan “revolusi hijau” pada dekade sebelumnya yang memiliki problematikanya sendiri. Persoalan harga beras misalnya menjadi dilema bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen. Harga beras yang tinggi akan merugikan kelompok

masyarakat yang murni sebagai konsumen seperti masyarakat perkotaan, sedangkan harga beras yang rendah akan merugikan masyarakat petani di pedesaan sebagai produsen beras.

Tidak hanya itu, ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga dipengaruhi ketahanan pangan di tingkat nasional dan regional, namun tanpa disertai dengan distribusi dan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, maka tidak akan tercapai ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), pencapaian ketahanan pangan dalam kasus rumah tangga dapat juga diukur dari berbagai indikator. Indikator itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan situasi pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses pangan, sedangkan indikator dampak meliputi indikator langsung maupun tak langsung.

Indikator ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumber daya alam, praktek pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional, dan kerusuhan sosial. Indikator akses pangan meliputi antara lain sumber pendapatan dan akses terhadap kredit modal. Indikator akses pangan juga meliputi strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan pangan. Indikator dampak secara langsung adalah konsumsi dan frekuensi pangan. Indikator dampak tak langsung meliputi penyimpanan pangan dan status gizi (Khomsan dkk 2004).

Penelitian ini sedikitnya akan melihat indikator ketersediaan, dengan melihat kuantitas dan kualitas produksi pertanian, dan indikator akses pangan yang di dalamnya strategi masyarakat dalam memenuhi kekurangan pangan, baik melalui sistem dan pola produksi pertanian maupun penguatan dan revitalisasi lembaga tradisi dalam bidang ketahanan pangan, seperti *durung*. Aspek pertama akan diamati adalah kebiasaan orang-orang Bawean dalam mengolah pertaniannya; dan aspek kedua akan ditelusuri lembaga tradisi yang paling potensial mampu menjaga ketahanan pangan khususnya pasca produksinya.

Lembaga tradisi di sini diartikan organisasi sosial ekonomi yang di dalamnya juga tercakup relasi sosial antar individu di dalam masyarakat. Lembaga tradisi sesungguhnya tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi bukan karena berdasarkan adanya hubungan dan wewenang formal. Biasanya, lembaga tradisi berkembang karena ketidakmampuan lembaga formal dan sistem kepemimpinan yang ada di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari anggotanya. Seperti dikatakan Max Weber (dalam Winardi, 2003:9), “Berkembangnya lembaga informal ini karena struktur formal tidak dapat memberikan pemenuhan kebutuhan para anggotanya dan juga kebutuhan organisasi (formal) itu sendiri”.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, penelitian ini mengasumsikan bahwa: *pertama*, masyarakat senantiasa teridentifikasi oleh kebudayaannya, termasuk dalam hal ini adalah strategi bertahan hidup di bidang ketahanan pangan yang ada pada masyarakat pulau kecil dan terpencil. Strategi bertahan hidup ini tidak hanya sebagai “penanda” atau karakterisasi sebuah masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penjaga eksistensi masyarakat;

Kedua, ketika strategi bertahan hidup yang berasal dari religi dan budaya tradisional masyarakat pulau tergerus oleh kebudayaan luar, bisa jadi masyarakat akan mengalami instabilitas bila tidak segera menciptakan katup pengaman, karena alienasi atau keterasingan dari budayanya sendiri bukan tidak mungkin akan mengancam eksistensi masyarakatnya sendiri; *Ketiga*, dalam konteks pulau, strategi bertahan hidup di bidang ketahanan pangan bisa jadi mengalami marginalisasi unsur budaya non-pulau, sehingga ruh materialisme dan pragmatisme seperti yang tertuang dalam budaya konsumsi model kota akan dianut dan akhirnya masyarakat melakukan semacam ‘manipulasi psikis’ yang melumpuhkan kemandirian, daya saing dan daya juangnya.

5.3 Bawean: Suatu Amatan Keterpencilan

Bawean adalah sebuah pulau yang terletak di laut Jawa. Bawean, dalam pikiran banyak orang, bukan saja nun jauh di sana, tetapi juga sebagai khayalan bahwa pulau ini ada dan masyarakatnya terus bereksistensi. Menurut cerita, Bawean dulunya pernah disebut Buwun (Luhung, Pulau Bergandul Potongan Kuping, dalam <http://www.sastra-indonesia.com/>). Ia adalah gugusan pulau yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur sejak tahun 1974. Luas wilayahnya kira-kira 625 km persegi (lebih besar sedikit dari Singapura) yang terletak 120 km utara Gresik.

Pulau ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil seperti pulau Gili, Selayar, Nuko, Nosa, Karangbila, Pulau Cina, dan lainnya. Secara administratif, pulau ini terbagi ke dalam dua kecamatan (Tambak dan Sangkapura), 30 desa dan sekitar 143 dusun atau kampung. Orang luar Bawean melihat Bawean dengan tiga keunikan; i) anyaman tikar Bawean; ii) ikan pindang; dan iii) sejenis rusa *Axis Kuhli* (Rusa). Bawean dapat dikategorikan sebagai pulau kecil dan terpencil, dari sisi letak dan penerimaan distribusi pembangunan.

Secara geo-kultural, pulau Bawean menjadi unik,³ bahkan mendapat julukan sebagai pulau putri "*the virgin island*"⁴ dan Mekkahnya Indonesia. Ia berada di tengah antara dua pulau besar, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Sebagai pulau tengah, seharusnya ia

³Salah satu keunikan misalnya adalah kata-kata "*sapa rea*" (siapa kamu) sering terlontar saat orang Bawean menyapa orang melalui komunikasi HP, dan sebutan "rumput Jepang" untuk tali rapih merupakan serangkaian ilustrasi transfer kebudayaan modernitas, tetapi tidak diikuti dengan mental modernitas. Mereka mengalami apa yang disebut "manipulasi psikis" yang didasarkan pada "paksaan sosial" karena gaya hidup.

⁴Bawean adalah pulau perempuan, sebab para lelakinya cenderung merantau. Bagi orang Bawean, pergi ke luar negeri itu seperti pergi ke kota sebelah. Ada seseorang yang berkata, jika dirinya ke Malaysia hampir dua atau tiga minggu sekali. Di samping mengurus tenaga kerja, juga melakukan bisnis kecil-kecilan.

diikat atau menjadi bagian penting dalam jaringan lalu lintas distribusi komoditas dan konsumsi pulau-pulau besar ini. Tetapi, letak yang strategis tidak begitu dimanfaatkan oleh masyarakat pulau ini. Untuk bertahan hidup, mereka memilih jalan lain, yaitu perantauan. Di samping juga pengelolaan lembaga tradisi yang ada dan dikenal masyarakat, seperti *durung* (lumbung padi), *pengawal* (pembawa tenaga kerja), dan lainnya.

Untuk kasus Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Gili, Vredenberg (1990) pernah menengarai bahwa fenomena perantauan ini telah dikenal masyarakat sejak abad XVIII. Masyarakat Bawean telah membangun jaringan perekonomian dan sosial genealogis ke beberapa negara, seperti Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Melalui perantauan, mereka menciptakan mekanisme distribusi pemodalannya untuk membiayai seluruh kebutuhan sosial masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak merantau, mereka melakukan strategi melewati keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki dengan cara unik lagi tradisional tanpa sentuhan negara.

Ketika orang Telaga Candi yang mendiami wilayah perbukitan tengah pulau ini ditanya pada wawancara tanggal 8 Juli 2010, lebih senang tinggal di mana? Mereka menjawab lebih senang tetap tinggal di tempatnya; walaupun orang lain, seperti saya dan barangkali orang Tanjung Ori Tambak yang dianggap kota satelitnya pulau Bawean, apa enakny tinggal di wilayah seperti itu? Kondisi tanah becek, jalan tidak bagus, hujan terus, dan sebagainya. Mereka dengan mudah menjawab; di sini saya bisa bekerja apa saja; menanami kebun, hutan, dan lainnya? Apakah pilihan seperti ini bukan strategi mereka menyiasati keterbatasan? Karena itu, bisa jadi, masyarakat pulau lain yang pola sosial budayanya mirip dengan pulau Bawean selama ini tumbuh berkembang tanpa pantauan negara.

Pulau yang Diselubungi Mitologi

Konon pada masa Dinasti Ming, China, pulau Bawean dijadikan pelabuhan persinggahan sebelum perahu-perahu masuk ke

Pulau Jawa. Nama Pajinggahan, sebuah desa yang berada di Kecamatan Tambak, diduga berasal dari “persinggahan” perahu-perahu dari Kalimantan, Sulawesi dan China. Di Masa Kejayaan Majapahit sampai masa Pemerintahan Islam di Pulau Jawa, beberapa pelabuhan kuno Pulau Bawean diposisikan sebagai tempat persinggahan perahu-perahu kerajaan, ini bisa diamati bekas-bekasnya di pelabuhan tua di Kumalasa dengan adanya kuburan dan benda pustaka bersejarah.

Masa pemerintahan sesudahnya adalah pengiriman Juru Dakwah dan penyiar agama Islam dari Raja-Raja di Madura yang menggunakan bahasa Madura. Bahasa para penyiar tersebut berasimilasi dengan bahasa penduduk setempat yang beragam, baik dari Jawa, Sumatra, Sulawesi dan bahasa lainnya termasuk juga Bahasa Arab, maka lahirlah Bahasa Bawean sebagaimana yang digunakan masyarakat Bawean saat ini baik di rantau atau di pulau. Di bidang seni dan pakaian banyak kesamaan dengan Melayu. Bidang bela diri ada perpaduan antara Suku Mandar di Sulawesi, Jawa dan Melayu. Olah raga sepak takraw yang para atletnya yang selalu mendapat prestasi nasional diperkirakan berasal dari Tanjung Pinang dan Bangka Belitung. Sedangkan tradisi dan keagamaan masyarakat, terdapat pengaruh Hindu Budha yang dahulu diduga berpusat di Dusun Candi, Langaor, dan Paromaan. Bukti otentiknya, beberapa ritual yang diiringi dengan sesajen dan kepercayaan roh suci, ditambah model-model bangunan masih kuat dipegang oleh mereka.

Beberapa misteri dan mitologi yang ada di Pulau Bawean masih diyakini oleh masyarakatnya selama ini. Mereka mengenal beberapa mitologi yang masih penuh misteri, misalnya tentang kuburan yang ukuran panjangnya tidak umum (Makam Panjang);⁵ pangeran yang mampu menjaring ikan-ikan di alun-alun (Purbonegoro);

⁵Biasa dikenal dengan Jherat Lanjheng atau makam panjang. Pantai ini memiliki keunikan di pinggir lautnya yang terdapat makam aneh yang panjangnya tak kurang dari 10 meter. Konon makam ini adalah makam dari salah seorang ajudan Aji Saka yang meninggal dalam tugasnya menjaga pusaka Aji Saka yang saat itu sedang mengembara menjelajahi Pulau Jawa.

seseorang yang dapat memanggil ikan-ikan dengan kentongan (atraksi Arfai); danau yang di tengahnya ada undakannya (Kastoba); kapal-kapal Belanda yang dulu pernah hilir-mudik; orang asing yang dapat bersiul dengan rusa; istri sunan yang berkelana (Waliyah Zainab); adu sapi; sampai pada nasi yang direndam pandan (nasi hijau).

Mitologi yang kuat dipegang oleh masyarakat Bawean lebih khusus di Candi dan Paromaan adalah misteri kejadian Danau Kastoba. Danau ini berjarak sekitar 5 kilometer ke arah timur dari pusat Kecamatan Tambak, tepatnya berada di Desa Perumahan. Danau ini memiliki luas 527 hektar. Ada keyakinan bahwa pada zaman dahulu ketika pulau ini diperintah oleh Ratu Jin, hamparan gunung menyebar rata di seluruh penjuru pulau, dengan pepohonan lebat yang subur menghiasi hutannya. Dengan wibawanya semua makhluk tunduk di hadapannya.

Di pulau ini banyak tumbuh pohon kastoba. Namun ada satu kastoba sakti yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Ratu Jin penguasa pulau ingin pohon sakti ini tetap abadi dengan menjauhkannya dari ketamakan makhluk-makhluk yang hanya ingin bisa memanfaatkan kesaktian pohon ini tanpa mau merawatnya. Maka diutuslah sepasang burung gagak untuk menjaga pohon, termasuk menjaga rahasia tentang kesaktian pohon itu.

Pada suatu ketika datanglah seorang kakek yang bersemedi meminta petunjuk untuk menyembuhkan kebutaan yang dideritanya di bawah pohon sakti ini. Dan kakek itu tak sengaja mendengar suara bisik-bisik kedua burung gagak yang tak hentinya membicarakan tentang kesaktian pohon ini. Sang kakek akhirnya memetik daun kastoba dan mengoleskan getahnya di mata. Secara ajaib kakek tersebut bisa melihat lagi dan kakek berteriak kegirangan. Suara kakek itu sangat mengejutkan kedua burung gagak, mereka sadar telah berbuat ceroboh, maka mereka segera melaporkan kejadian itu pada Ratu Jin.

Ratu Jin sangat murka mendengar pengakuan mereka dan diusirlah sepasang burung gagak itu, Ratu juga meminta semua gagak yang ada di pulau itu pergi dan melarang anak cucunya untuk kembali.

Kisah ini pula yang dipercaya masyarakat Bawean, mengapa sampai saat ini tidak pernah terlihat burung gagak di pulau ini. Akhirnya Ratu Jin mencabut pohon sakti itu hingga ke akarnya, bekas akar yang tercabut inilah yang selanjutnya sebagai jalan air hingga menggenangi kawasan hutan dan membentuknya menjadi sebuah telaga.

Kini pohon Kastoba (*euphorbia pulcherrima*) yang juga disebut pohon merah atau di beberapa daerah dikenal sebagai pohon racunan ini sudah sangat jarang ditemui di Bawean. Namun keelokan danaunya masih bisa dinikmati, tetap terhampar seolah mengundang keingintahuan para pendatang untuk berkunjung. Selama perjalanan menuju danau, mata kita akan disegarkan oleh lebatnya pohon, kita bisa sepuasnya menghirup udara yang segar tanpa polusi. Diantara hijaunya dedaunan dari pohon-pohon raksasa yang telah berusia puluhan tahun, terlihat deretan rumah-rumah di balik bukit seberang yang membentuk sebuah perkampungan kecil.

5.4 Kebanyakan Migrasi: Susahnya Menilai Demografi

Pada tahun 2009, Biro Pusat Statistik, menyatakan bahwa jumlah penduduk Bawean di dua kecamatan, Sangkapura dan Tambak, mencapai angka 88.027 yang terdiri dari 43.675 laki-laki dan 44.348 perempuan. Sulit memastikan kebenaran angka ini; karena migrasi penduduknya berlangsung dalam ritme yang sangat cepat. Tidak hanya itu, tidak jarang penduduk Bawean yang melakukan migrasi ke Malaysia dan Singapura memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini memungkinkan karena proses sejarah sebelumnya di mana karib kerabat mereka telah terlebih dahulu menjadi warga Malaysia atau warga Singapura dan menetap di sana.

Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun di Desa Tanjung Ori dan Paromaan saja misalnya rata-rata dilahirkan di Malaysia. Mereka memiliki akta kelahiran Malaysia yang dapat ditukar menjadi *permik* (*permitt*) tinggal sebagai modal menjadi warga negara di sana. Pada usia 12 tahun, mereka akan dibawa orang tua mereka memasuki wilayah Malaysia, dan kemudian dititipkan ke karib kerabat untuk

disekolahkan di sana. Cara ini dilakukan untuk memudahkan anak-anak tersebut mendapatkan premik tinggal dan mendapatkan ID Card warga negara Malaysia pada usia yang telah ditentukan, yaitu 17 tahun. Bagi mereka menjadi warga negara Malaysia menjadi penting sebagai jaminan ekonomi di masa yang akan datang, terlebih ketika pintu-pintu tenaga kerja illegal dipersulit dan tenaga kerja legal pun hanya berorientasi buruh pabrik dan pengurus rumah tangga.

Dengan mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, mereka akan dapat bekerja lebih dari itu, seperti menjadi krew kapal pelayaran internasional, menjadi guru mengaji, berdagang, supir, dan lain sebagainya yang mendapatkan upah lebih dari cukup ketika berada dan menjalani hidupnya di Pulau Bawean. Pola migrasi yang terlalu cepat ini, dan kenyataan banyaknya penduduk Bawean yang memiliki dua kewarganegaraan membuat angka persis sensus harus selalu dipertanyakan. Dalam kapasitas ini, penduduk Bawean memiliki kekhususan tersendiri dan berbeda jauh manakala dibandingkan dengan jumlah penduduk di 16 kecamatan lainnya di Gresik.

Pola migrasi dan kecenderungan dua kewarganegaraan ini telah berjalan turun temurun. Dahulu mereka dengan mudah melakukan migrasi dengan moda transportasi kapal laut; dan pesawat terbang pada periode akhir-akhir ini. Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, pulau Bawean terhubung langsung dengan Malaysia dan Singapura. Saat itu dikenal ada jalur pelayaran segitiga emas antara Tanjung Perak, Bawean, Kalimantan dan Singapura atau Johor (tanpa harus mampir di Pelabuhan Gresik).

Pelopor utama dibukanya jalur segitiga emas itu adalah Kemas Haji Djamaluddin Bin Kms Haji Said yang bersama keluarganya mengembangkan kegiatan ekonomi yang besar di Bawean, sekaligus menjadi agen dari perusahaan pelayaran Belanda (KPM) di Indonesia. Ia memasukkan Bawean sebagai salah satu jalur pelayaran kapal yang menyingahi Pulau Kalimantan, Jawa dan Singapura” (Kartono 2004). Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa tentu tidak akan mudah

memasukkan sebuah wilayah sebagai pos tujuan, bila wilayah itu tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh pos tujuan lainnya.

Menjadi pertanyaan, apa kira-kira yang dapat diandalkan atau ditawarkan Bawean kepada Malaysia dan Singapura saat itu? ⁶ Pertanyaan ini menarik, karena dalam *Memorie van Overgave East Java*, tidak pernah ada satu dokumen pun yang menyebutkan bahwa Bawean menghasilkan produksi unggulan bidang pertanian atau kehutanan, seperti layaknya wilayah lain di Pulau Jawa? Aspek penghasil komoditas dua bidang tersebut sepertinya tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Bawean. Potensi ekonomi yang ada adalah jaringan dan penyedia tenaga kerja, seiring tumbuhnya perekonomian dan pembangunan di Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan kondisi itu, rute perdagangan dan pelayaran yang dilakukan Maskapai KPM itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintah di awal kemerdekaan RI sampai tahun 1968. Sayangnya, pasca tahun 1968, rute itu macet. Menurut informan, seorang pengawal dari Kepuh, kemacetan itu akibat konflik Indonesia dan Malaysia di tahun-tahun 1968-1970-an yang dampaknya dirasakan hingga tahun 1980-an. Pada tahun 1992 sampai akhir tahun 2003, PELNI berusaha menghidupkan kembali jalur pelayaran itu secara terbatas, yaitu jalur Tanjung Perak, Bawean, Tanjung Pinang atau Kalimantan.

Jalur pelayaran PELNI ini akhirnya tidak dilanjutkan karena beberapa oknum pengusaha kapal Bawean yang hanya mementingkan pribadi dengan mengirim surat protes kepada Menteri Perhubungan.

⁶Meskipun kejayaan nelayan Bawean di awal kemerdekaan saat itu sangat terkenal; baha hasil satu kali musim panen bisa dimakan setahun sehingga pegawai negeri sipil sangat tidak diminati karena gaji pegawai negeri jauh lebih rendah penghasilannya dibanding nelayan. Home industri pindang yang berjumlah 33 pengusaha (Jacob Vredembregt, 1998) yang produksinya dipasarkan di Surabaya dan sampai jauh menyeberang ke Kota Semarang, Jawa Tengah menggambarkan betapa tingginya potensi ikan di perairan Bawean. Apakah ikan pindang ini menjadi komoditas yang ditawarkan ke negeri jiran, tidak pernah ada catatan sejarah atasnya.

Celakanya, Pemerintah Daerah Gresik tanpa cek dan recek langsung merekomendasi usulan tersebut. Kecuali rute Gresik-Bawean, akhirnya rute pelayaran yang menghubungkan Bawean dengan rute wilayah pelayaran turun temurunnya terputus sampai sekarang. Seiring berhentinya rute pelayaran itu, terhenti pula tradisi “pengawal” yang dikenal oleh masyarakat Bawean dalam menyuplai tenaga kerja ke negeri jiran.

Pada satu dekade terakhir ini, masyarakat Bawean akhirnya mengalami berbagai kondisi yang memprihatinkan, dari soal pangan, politik ekonomi, sampai soal penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya pernah berjaya. Kondisi masyarakat pun saat itu lebih dinamis, yaitu terbukti dengan betapa semangatnya para pendahulu mereka mendirikan Nahdlatul Ulama Cabang Bawean pada tahun 1943, jauh sebelum Cabang NU Gresik terbentuk. Kemudian diikuti dengan Cabang Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU – IPPNU, LP Ma’arif, dan Front Pembela Kemerdekaan.

Sekarang, Bawean lebih dikenal dengan pelayanan pemerintahan dan transportasi yang buruk, ditambah adanya fenomena ketidakmerataan tingkat kesejahteraan pada kelompok masyarakatnya sendiri. Kondisi ini seringkali diberikan jawaban dengan kenyataan bahwa letak geografis Bawean yang sangat berjauhan dengan ibukota kabupatennya yang tidak terhubung dengan moda transportasi yang layak, efektif dan efisien.

Padahal, pada tahun 1983, Bupati Gresik, Wasiadji, SH (1978 – 1983) pernah mengatakan bahwa antara Bawean – Gresik tidak dipisah laut, melainkan disambung oleh laut (artinya laut tidak menjadi hambatan), tetapi kenyataannya tetap saja warga Bawean tidak terlayani dengan baik. Sebuah pernyataan pemanis yang tidak berfungsi signifikan dari segi kebijakan, termasuk ungkapan-ungkapan bahwa Bawean tidak pernah dianaktirikan. Namun realita dan faktanya warga Bawean dari beberapa sisi, bukan saja sebagai “anak tiri”, tetapi mungkin lebih dari itu yaitu sebagai “anak titipan”.

Dalam lintasan sejarahnya, Pulau Bawean sebelum tahun 1975 sebenarnya merupakan bagian dari Keresidenan Surabaya, tetapi setelah tahun 1975, pulau ini kemudian dititipkan kepada pemerintah Kabupaten Gresik. Pembangunan Bawean dan pola pertumbuhannya pun seolah terlepas dari tangan negara. Kemandirian sesungguhnya sangat tampak di pulau ini. Lihat saja dalam pola-pola migrasi, kecenderungan *dual citizenship*, dan lainnya seolah menafikan kehadiran negara di tengah kehidupan mereka.

5.5 Kebudayaan Material yang Terlihat: Kegamangan atau Berlebihan Melangkah

Seperti disebutkan di atas, secara umum, masyarakat kepulauan dalam kacamata politik, rata-rata tidak tumbuh dengan skema perencanaan pembangunan nasional yang digariskan oleh pemerintah, seolah “tidak ada negara dalam wilayah ini”. Tetapi, secara ekonomis masyarakat pulau, seperti Pulau Bawean dapat memperlihatkan kemampuannya untuk berkembang tanpa campur tangan negara. Melalui sistem *rantau* yang tidak bertumpu pada bentuk formalisasi ketenagakerjaan dari negara misalnya, mereka telah mampu membiayai kebutuhan sosial ekonomi. Mereka tampil sebagai masyarakat mandiri yang tidak tergantung kepada negara.

Secara politik mereka seolah “tidak terpegang, tetapi secara ekonomi mereka bisa menentukan sikapnya sendiri”. Keadaan semacam ini berjalan dalam tempo yang sangat lama. Ironisnya, negara malah diuntungkan oleh akumulasi devisa masyarakat perantauan. Semangat dan strategi bertahan hidup yang bersifat lokal tersebut memberi imbas luar biasa bagi perekonomian negara, dan juga menghadirkan alternatif-alternatif baru dari apa yang disebut dengan bukaan sosial (*social opening*) dalam persoalan kebudayaan masyarakat, seperti apa yang diungkapkan oleh Giddens (1983).

Apakah ketidakhadiran negara dalam tradisi merantau orang Bawean yang disebut sukses itu juga dapat berlaku pada aspek lain dari kehidupan masyarakatnya? Katakanlah, misalnya pada aspek ketahanan

pangan pokok, aspek etos kerja yang disemangati oleh ajaran agama Islam yang dianut mayoritas warganya, ataukah dalam aspek kenelayanan yang sangat strategis dalam eksistensi mereka sebagai penduduk pulau kecil. Baik aspek ketahanan pangan, etos kerja, kegiatan kenelayanan, secara bersama-sama dengan tradisi merantau, dan mungkin banyak aspek lagi yang lain, adalah merupakan sebagian dari strategi masyarakat Pulau Bawean dalam mengarungi kehidupannya.

Menjadi pertanyaan, selain soal merantau, bagaimana dengan tiga aspek lainnya? Apakah masyarakat Bawean dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat berswasembada sendiri, apakah sawah dan kebun mereka masih difungsikan dengan baik, apakah *durung*, sebagai lembaga tradisi berketahanan pangan masih terisi penuh dan terjaga dengan baik?, apakah usaha bercocoktanam masih mendapatkan tempat, dan mendapatkan keuntungan cukup untuk berbagi dengan masyarakat lain?.

Dalam aspek etos kerja, bagaimana masyarakat ulet bekerja, selain pekerjaan di rantauannya? Bagaimana pula agama dan nilai adat menumbuhkan suatu kreativitas sosial ekonomi. Karena selama ini masyarakat Bawean dikenal masyarakat religius; apakah nilai religiusitasnya itu menyatu ketika ia bekerja; ataukah menempatkan agama dalam satu wadah sendiri dan pekerjaan di wadah lain, sehingga nilai “berkah” sudah tidak lagi diyakini? Tidak kalah seru, adalah persoalan dalam aspek kenelayanan. Sebagai masyarakat pulau, sepertinya lucu bila sebagian besar masyarakatnya tidak lagi memiliki keahlian dan kemampuan penangkapan ikan. Walaupun ketidakmampuan ini selalu dijujungpangkalkan ke alasan bahwa sulit sekali distribusi pasca penangkapan, dan lainnya.

Bila pembangunan lalu hadir dalam ranah masyarakat pulau, baik yang berasal dari kreativitas masyarakat ataupun berdasarkan proyek yang diluncurkan pemerintah, tidak jarang sering terjadi perbenturan tidak kalah seru dalam persoalan rasionalisasinya dengan konsepsi kebudayaan setempat. Di satu sisi, pembangunan selalu

identik dengan kemajuan, dan kemajuan itu pada zaman sekarang diletakkan dalam bingkai modernisasi dan globalisasi. Berhasil tidaknya program pembangunan daerah kemungkinan besar akan dilihat dari fitur modernisasi dan globalisasi yang terdapat di daerah itu.

Pembuatan lapangan pesawat terbang misalnya, merupakan salahsatu usaha berdasarkan rasionalisasi modernitas yang memungkinkan masyarakat Bawean lebih terbuka, berbiayai ekonomi rendah dalam transportasi, dan lainnya. Kenyataannya, terlalu banyak ketidak-sesuaian antara rasionalisasi modernitas dengan kearifan masyarakat setempat, seperti soal tata letak lapangan terbang, ganti rugi tanah dan tanaman, dan pelibatan masyarakat dalam proyek yang bersifat nasional itu (RPJM 2005-2010 dan dilanjutkan RPJM 2010-2015).

Pembangunan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka mengambil alih ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang bersifat bebas, kompetitif, hedonistis dan mengarah kepada monodimensi nilai yang bertabrakan dengan tatanan mitologi, tradisi budaya, dan etika lama bersifat kosmis. Di sisi lain, otentisitas “jati diri masyarakat pulau yang kerap mempraktikkan strategi bertahan hidup” dari ragam keterbatasan semakin sulit dihayati dan dipertahankan. Lihat saja misalnya, profesi “pengawal” di masyarakat Bawean, sekarang ini telah hampir dikatakan hilang. Padahal posisi ini, menurut Vredenberght (1991), sebelumnya merupakan salah satu profesi yang mendudukkan pelakunya berada pada tingkat sosial ekonomi atas.

Setiap bulan, berdasarkan wawancara langsung dengan mantan pengawal (maaf tidak disebut nama, karena saya yakin semua orang Bawean pasti mengenalnya), ia bisa melakukan pengiriman tenaga kerja dua kali dalam sebulannya. Setiap pengiriman bisa berjumlah minimal 50 orang. Kalau setiap orang memberi biaya jasa Rp.1.000.000, si pengawal bisa mendapatkan keuntungan Rp.100.000.000 setiap bulan, belum ditambah sirkulasi pengiriman uang dari tenaga kerja ini. Selama menjalani profesinya, para pengawal

menjadi orang-orang kaya di Bawean, mengikuti kekayaan dari para kapten kapal internasional. Tetapi apa yang terjadi?

Profesi ini di tahun 1997-an ke atas sudah sulit dilakukan; selain regulasi pemerintah soal ketenagakerjaan yang semakin ketat, juga masalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki para pengawal beserta jaringannya. Selama mereka bekerja, pengawal hanya mengandalkan kemampuan teknis dan jaringan bersifat tradisional. Sebut saja, untuk memberangkatkan sejumlah orang, mereka mengkordinasikan di tingkat desa dengan sistem permintaan orang yang mau berangkat itu sendiri; bagi yang tidak memiliki biaya, si pengawal memberi piutang; bagi yang punya, si pengawal hanya memberinya jasa akses dan jaringan pemberangkatan. Semua dilakukan dengan manual, dan saling percaya.

Pasca tahun 2000, ketika pintu perbatasan semakin diperketat, tenaga kerja illegal (yang kebanyakan dibawa *pengawal*) itu tidak bisa masuk; sehingga banyak kasus penangkapan, pemenjaraan, dan deportasi; akhirnya calon tenaga kerja memilih menggunakan jalur legal, di mana perusahaan tenaga kerja siap menyalurkannya. Sayangnya, pengawal di Bawean itu tidak segera mendirikan perusahaan tenaga kerja; sehingga kesempatan itu kemudian diambil orang Surabaya, dan orang Gresik hanya menjadi agen lapangan yang sifatnya hanya mendapatkan “ceperan berkat” saja.

Mereka bukan menjadi pemain besar sekelas pengawal di masa lalu. Perusahaan penyuplai tenaga kerja ini berhasil memainkan teknologi dalam usahanya; dan mereka pun merangkap menjadi agen travel perjalanan, sehingga orang seperti H. Mansyur dan H. Hambali di Surabaya bertambah kaya dan maju. Mereka telah mampu memanfaatkan jaringan teknologi dalam bisnis, sedangkan para pengawal di Bawean karena tidak mampu menguasainya, akhirnya tertelan oleh perubahan zaman.

Di satu sisi yang lain, bukaan sosial di tingkat masyarakat dengan rasionalisasi modern di atas juga bersifat berlebihan. Lihat saja misalnya: rumah-rumah yang dibangun secara mewah di Bawean,

kemudian ditinggalkan dan terbengkalai oleh pemilik dan keluarganya; merebaknya budaya konsumsi “rantauan” yang lebih menonjolkan gaya hidup ketimbang fungsi dari alatnya sendiri, misalnya: HP Blackberry dengan kualitas satu bertolakbelakang dengan minimnya fungsi pemanfaatannya, motor matic (Mio, Seon, Vario, Soul, Spin, dsb) yang bertolakbelakang dengan kualitas jalan di Bawean; dan “penampakan barang merah” di leher perempuan yang terlalu berlebihan, sehingga tidak menyiratkan bahwa nilai tabungannya, tetapi nilai gengsi yang ingin dilihat orang yang bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat; latah berbisnis dengan mengikuti trend usaha yang dilakukan orang lain, dan *leisure time* (waktu senggang) yang dimiliki masyarakat hanya untuk mengobrol, tidak dipergunakan sebagai strategi penjaga kebutuhan hidup di masa yang akan datang (misalnya dengan bertani, bercocok tanam, berkebun, dan beternak; walaupun semacam ternak *klangenan* saja tidak pernah dilakukan). Tidak jarang, di sana sini akan terjadi apa yang disebut dengan “manipulasi psikis” dalam praktik kebudayaan mereka di kemudian hari yang sama bahayanya dengan serangan fisik negara lain dalam sektor pertahanan keamanan.

5.6 Mencari Celah Ketahanan Pangan

Sumber Daya Alam

Menyebut pulau di tengah lautan, terbayang sebuah pulau sedikit pohon; di atas permukaannya hanya ditumbuhi beberapa pohon dan pasir yang hampir sebagian besar menyelubunginya. Tidak demikian dengan gugusan Pulau Bawean, dari pulau terkecil sampai pulau induk semuanya ditumbuhi berbagai jenis pohon. Dilihat dari jauh, pulau ini seperti sebuah habitat hutan lebat, di mana tidak akan ada permukiman di dalamnya. Penglihatan kasat mata ini membuktikan bahwa Pulau Bawean sejatinya adalah hutan di tengah lautan.

Dengan kapasitasnya sebagai hutan, maka tentulah dua pertiga pulau ini masih ditumbuhi pepohonan, baik alami ataupun produksi. BPS Kabupaten Gresik mensinyalir bahwa pada tahun 2008 luasan

hutan alami dan produksi mencapai 400 km persegi; selebihnya adalah sawah dan perkebunan milik masyarakat yang jumlahnya mencapai 150 km persegi; dan wilayah permukiman dan infrastruktur lain seluruhnya berjumlah 75-80 km persegi. Pembagian ini secara acak tersebar di 30 desa di dua kecamatan yang ada di pulau Bawean.

Bisa dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Bawean meliputi banyak sawah. Hampir di setiap sudut terlihat tanaman padi yang menghijau saat musim tanam dan menguning saat mendekati musim panen. Hak milik sawah di sekitar daerah pinggiran dekat pesisir lebih banyak dimiliki orang yang bermukim di daerah pegunungan. Saat musim tanam mereka akan datang serentak ke sawah untuk menanaminya, sebaliknya saat musim panen akan mengangkut hasilnya ke rumah asalnya di pegunungan Bawean.

Hasil panen padi sampai di rumah langsung dikeringkan, sebagian ada yang disimpan ke dalam *durung*, dan sebagian lagi *diselep* memakai mesin untuk menghasilkan beras. Dari hasil *selepan* itu, orang pegunungan akan menjual beras kepada orang-orang di daerah pinggiran, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki sawah. Penjualan beras hasil panen raya di Bawean memiliki pangsa pasar yang cukup baik, sebab rasanya lebih enak, terkadang harga beras ditawarkan lebih murah dibanding beras dari luar.

Desa-desa yang ada di wilayah pegunungan, rata-rata memiliki luasan hutan, kebun, dan sawah lebih luas dibandingkan desa-desa yang berada di wilayah pesisir. Sedangkan desa-desa yang berada di pesisir, luasan wilayahnya kebanyakan terdiri dari permukiman, seperti desa Tambak dan Tanjung Ori. Dua desa ini memiliki sawah relatif luas, namun tempatnya berada di wilayah perbatasan dengan desa-desa gunung. Cekukan atau lereng antara perbukitan dengan wilayah pesisir merupakan wilayah subur bagi persawahan padi.

Setelah persawahan itu umumnya adalah hutan-hutan produksi, sedangkan hutan alami terletak di gunung-gunung yang membentang dan menghubungkan wilayah Kecamatan Tambak dengan wilayah Sangkapura. Desa-desa seperti Paromaan: Candi, Langaor; Batu

Merah, Gandaria, Gunung Teguh, Kepuh, Daun, Palumpanggubug, Pudakit, dan seterusnya merupakan wilayah yang memiliki hutan alami dan sebagian lagi adalah hutan produksi.

Dari hutan-hutan di atas masyarakat dapat mengambil manfaatnya berupa kayu, getah, madu, pandan, rotan, dan lain sebagainya. Pada dekade 1980-an, masyarakat Bawean menjauhi sektor pengambilan kayu di hutan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonominya. Mereka lebih memilih menumpukan hidupnya di sektor perantauan, dan sebagian lagi bagi keluarga yang ditinggalkan di pulau Bawean lebih memilih mengurus dan mengolah sawah padinya. Mereka mengambil kayu dari hutan sebatas untuk memenuhi kebutuhan material kayu pembuatan rumah dan *durung*. Jumlah ini tentu relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan penebangan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Realitas inilah yang memungkinkan hutan di Bawean relatif terjaga, meskipun tahun-tahun terakhir ini, banyak para pembalak liar yang berasal dari luar pulau, seperti orang Jawa dan Madura mulai merambah kawasan hutan alami.

Beberapa kerusakan hutan yang berdampak bencana longsor mulai tampak. Peristiwa longsor di Dusun Candi Paromaan pada bulan Maret dan April 2009 menjadi bukti bahwa hutan alami di kawasan ini telah dirambah oleh para pembalak liar. Sebelum kejadian itu, ada dua kelompok pembalak yang rata-rata terdiri dari 12-15 orang melakukan aktivitas penebangan. Kelompok yang berasal dari Jawa mengadakan kegiatan penebangannya di wilayah Batu Merah; dan kelompok Madura merambah hutan di sekitaran Candi. Kayu-kayu tebangan yang sudah *disebit* (dibelah) itu kemudian dikapalkan melalui Pesinggahan dan Dwipongo. Dalam wawancara di lapangan, ada informasi bahwa kegiatan ini sebenarnya telah diketahui oleh aparat, tetapi mereka membiarkannya saja. Sikap diam ini menimbulkan banyak dugaan dari masyarakat, bahwa aparat juga terlibat atau menjadi *beking* dalam aktivitas ini.

Di wilayah hutan inilah berbagai spesies tanaman dan binatang hidup. Ratusan jenis burung mulai glatik, beo, bangau, elang, burung

hantu sampai elang termasuk binatang ternak, rusa dan binatang buas semua hidup sempurna. Selain itu, di tempat inilah jenis pangan masyarakat berada. Jamaluddin (2005) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Bawean memiliki ratusan jenis pisang yang hal ini tidak terjadi di kawasan lain pada luas lahan yang terbatas seperti Bawean. Biji-bijian dan umbi-umbian, jenis tanaman keras seperti *kaju bulu*, buah merah, binong, mahoni dan lainnya serta berbagai jenis tanaman dan tumbuhan obat sebagai apotek hidup raksasa, semuanya tumbuh subur. Sayangnya, selain kayu untuk rumah dan *durung*, manfaat hutan untuk kepentingan lain belum terkelola dengan baik.

Orientasi Hidup sebagai Basis Strategi

Berdasarkan realitas sumber daya alam di atas, masyarakat Bawean khususnya yang berada di desa-desa gunung tidak tergantung dengan hutan yang ada di sekelilingnya, baik sebagai sumber penghidupan ekonomi ataupun sebagai wahana sosialnya. Mereka lebih memilih menggantungkan hidupnya pada rantauan dan bercocok tanam dengan mengolah sawah dan kebun yang dimilikinya. Bagi masyarakat Bawean, kedua bidang usaha pokok itu terkait satu sama lain. Hasil rantauan, selain untuk memenuhi kebutuhan keseharian, perumahan dan pendidikan, masyarakat Bawean biasanya memanfaatkan sisa hasil rantauannya dengan membeli sawah dan kebun. Walaupun sawah itu akhirnya tidak dikelolanya sendiri, sawah bagi orang-orang Bawean merupakan bagian terpenting dalam sistem kehidupannya.

Sawah bagi mereka tidak sekadar investasi (tabungan), tetapi juga bagian dari orientasi hidup tentang “Bawean sebagai tanah lahir dan tanah hari tua”. Tanah lahir diartikan mereka sebagai tempat asal, dimana mereka akan bangga dilahirkan sebagai orang Bawean. Kebanggaan ini lebih disebabkan ikatan tradisi yang masih kuat, religiusitas masyarakat yang relatif masih terjaga, dan adanya jaringan tradisional yang menghubungkan mereka dengan Singapura, Malaysia, dan Australia. Aspek terakhir inilah yang akan menjamin mereka dalam beraktualisasi diri saat dewasa nanti, yaitu ketika mereka memiliki kewajiban mencari penghidupan di tanah rantau.

Sementara itu, orientasi hidup mengenai “tanah hari tua” adalah tanah di mana mereka telah mencukupkan kegiatan-kegiatan ekonomi di tanah rantainya, dengan aktivitas kehidupan normal kemasyarakatan dan keagamaan. Kebanyakan mereka lebih memanfaatkan *leisure time* dengan cara mengobrol, duduk bersama, dan tiduran di *durung* milik pribadi atau milik tetangganya. Dengan orientasi seperti ini tidak jarang dilihat oleh orang luar bahwa orang-orang Bawean adalah orang pemalas. Padahal “tanah hari tua” adalah tanah tujuan setelah masa dewasanya dihabiskan dengan bekerja keras di tanah rantauan. Orientasi inilah yang memungkinkan orang-orang muda Bawean kemudian menyebar dan bekerja di berbagai negara. Mereka menghabiskan masa mudanya dengan bekerja, dengan harapan di hari tuanya nanti mereka akan mendapatkan rumah dan tanah di Bawean.

Strategi Pemanfaatan

Bila sawah dihubungkan dengan orientasi terakhir di atas, sawah di Bawean dapat dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama, sawah murni produksi; yaitu sawah yang betul-betul diusahakan sebagai lahan produksi, di mana hasilnya digunakan sebagai pemenuh kebutuhan hidup keseharian sepanjang tahun. Jenis sawah ini akan dikelola oleh orang-orang yang memang bermata pencarian sebagai petani. Kecenderungan mata pencarian ini biasanya dianut oleh orang-orang yang berasal dari desa-desa gunung, seperti Paromaan dan Batu Merah.

Orang-orang yang tidak memiliki akses ke luar negeri akan memilih bekerja menjadi petani sawah, baik sawah miliknya sendiri ataupun sawah orang lain. Di Desa Paromaan Dusun Langaor dan Candi sedikitnya ada 38 orang yang bekerja sebagai petani murni. Mereka mengelola sawah seluas 74 hektar di Paromaan; sebagian lagi menggarap sawah miliknya yang berada di Desa Tanjung Ori dan Tambak sekitaran 12-an hektar, dan juga menjadi penggarap sawah orang lain di Tanjung Ori dan Tambak seluas 30 hektar an. Setiap sawah di sini umumnya menghasilkan panen dua kali, tergantung

tingkat curah hujan yang turun. Persawahan di Bawean seluruhnya tergantung pada hujan (tadah hujan), karena program irigasi sepertinya jarang dilakukan oleh pemerintah.

Sawah produksi yang betul-betul dikelola baik, pada setiap musim panennya dapat menghasilkan 2-3 ton per hektar. Jumlah ini memang selisih jauh bila dibandingkan dengan jumlah hasil panen yang diperoleh petani-petani di Pedesaan Jawa pada umumnya (petani Rembang misalnya dapat menghasilkan 5 ton per hektar meskipun sama-sama tadah hujan). Selain soal varietas bibit lokal yang menuntut waktu sedikit lama, teknik pengelolaan sawah di masyarakat Bawean masih jauh tertinggal. Walaupun demikian, produksi sawah dalam kategori pertama inilah yang dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di tiga desa lainnya, seperti Paromaan, Tanjung Ori, dan Tambak.

Menghadapi musim tanam padi tahun 2010 ini, sebagian petani di Pulau Bawean mulai melakukan penanaman padi di sawah yang digarapnya. Sebagian petani yang berada di wilayah bawah belum memulainya disebabkan sawah yang akan digarapnya belum berair, akibat rendahnya curah hujan di Pulau Bawean saat ini. Adapun kawasan Pulau Bawean yang sudah memulai penanaman seperti di Tambak, Tanjungori, Daun, Sangkapura, Bululanjang dan Lebak. Sedangkan sawah yang belum digarap, yaitu kawasan Pudakit Timur, Pudakit Barat, Suwari dan Komalasa. Sebagian petani di kawasan yang belum turun hujan, sudah melakukan pembibitan benih padi untuk ditanamnya. Terpaksa mereka harus mengganti bibit yang sudah ditanamnya dengan bibit yang baru lagi untuk persiapan menghadapi musim tanam akan datang. Padi simpanan yang ada di *durung* yang sebenarnya digunakan untuk konsumsi keluarga terpaksa digunakan untuk benih bibit kembali. Untuk memenuhi kebutuhan bibit itu mereka harus mengeluarkan padi sekitar 20-50 kg tergantung luasan tanah yang dimilikinya.

Varietas padi yang ditanam umumnya adalah varietas lokal, seperti *jajar legowo*. Dalam pengembangan varietas ini, penduduk

awalnya hanya melakukannya secara turun temurun. Dalam perkembangannya ada usaha dari pemerintah untuk membudidayakannya secara lebih luas. Hal seperti ini tampak dalam program Kantor Pertanian Kecamatan Tambak yang memiliki program uji coba penanaman padi *jajar legowo* di enam desa Kecamatan Tambak, yaitu Tambak, Paromaan, Sukalela, Tanjungori, Pekalongan dan Kelompanggubuk. Tujuan dari program penanaman padi *jajar legowo* ini adalah langkah awal mensosialisasikan sistem dan tata cara penanaman padi melalui proses yang benar kepada masyarakat. Harapannya adalah hasil panen akan lebih banyak dibanding dengan penanaman padi yang biasa dilakukan orang Bawean sebelumnya. Kepala Desa Paromaan, Kafil Kamsidi (wawancara 9 Juli 2010) menyatakan bahwa "Mulai proses awal penanaman, pengairan, pemupukan, dan sebagainya langsung dibina oleh Kantor Pertanian Tambak, aparat dan masyarakat desa hanya sebatas fasilitator saja."

Setiap musim panen tiba, penduduk Langaor dan Candi dapat menghasilkan 300-500 ton gabah kering atau sekitar 200-300 ton beras. Bila dikalkulasi dengan angka rupiah per kilo Rp.4.000, maka setiap enam bulan sekali desa ini menghasilkan guliran uang sebesar 800 juta sampai dengan 1.2 Milyar. Bila uang itu terbagi merata dengan 38 orang, maka setiap petani di Bawean dapat memperoleh uang per setiap musim panennya antara 21-30 juta. Sayangnya, uang itu tidak utuh sebagai hasil bersih. Mereka harus mengeluarkan biaya bibit, traktor, dan tenaga kerja pendukung yang relatif mahal. Tenaga kerja tambahan untuk mencangkul, menanam, membersihkan rumput, memanen, dan mengeringkan rata-rata diberi Rp.50.000 – 75.000 per hari. Padahal setiap satu musim tanam sampai musim panen, setiap hektar sedikitnya membutuhkan tenaga tambahan sebanyak 10 orang untuk 10-15 hari kerja. Pengeluaran ini belum ditambah dengan biaya traktor, sewa generator bila tidak hujan, dan biaya bibit.

Karena itu, bila padi hasil panen itu semuanya dijual, hasil bersih per petani di setiap musimnya rata-rata 5-7 juta saja atau sekitar 1 juta -1,5 juta per bulannya. Untuk menghindari perasaan sia-sia karena biaya tinggi itulah, mereka lebih memilih untuk tidak menjual

seluruh hasil panennya. Sebagian padinya akan disimpan terlebih dahulu di dalam *durung* untuk keperluan pangan sehari-hari, juga digunakan untuk keperluan kebutuhan sosial ekonomi yang mendesak di saat-saat kemudian. Karena itulah, *durung* tidak semata sebagai tempat penyimpanan padi atau lumbung saja; tetapi juga menjadi alat kontrol dari berlakunya sistem ketahanan pangan di masyarakat.

Kategori kedua, sawah setengah produksi, sawah jenis ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang merantau ke luar negeri dalam waktu yang relatif lama. Mereka menitipkan sawah kepada keluarganya atau orang yang dipercayai untuk mengelolanya. Pada umumnya, setiap satu keluarga di Paromaan, khususnya Langaor dan Candi, terbagi pada dua jenis mata pencarian; kepala keluarga inti (suami dan istri) akan pergi bekerja ke luar negeri (Malaysia, Singapura), sebagai tukang bangunan, perkebunan, supir, dan sebagainya. Sedangkan orang tua bersama anak-anak mereka akan ditinggalkan di Bawean.

Orang-orang terakhir ini yang akan mengurus sawah yang dimiliki oleh pasangan suami istri tadi. Kalau mereka tidak sanggup biasanya akan diserahkan pengelolaannya kepada orang yang dipercayainya. Penitipan ini umumnya bersifat sementara dan tidak pernah dikelola dengan baik, sehingga sawah seperti ini kadang digarap, tetapi kadang juga tidak digarap. Hal ini tergantung keadaan dan kemauan dari orang yang dititipin. Pemilik sawah atau keluarga yang ditinggalkan di Bawean biasanya hanya mendapatkan bagi hasil sedikit, tidak melebihi sepertiga hasil panen. Para penggarap sawah tersebut selalu beralasan bahwa biaya pengelolaan sawah padi di Bawean sangat mahal, jadi tidak mungkin hasilnya terbagi dengan hitung-hitungan yang umumnya seperti di pedesaan Jawa.

Di Jawa, bila sawah digarap orang lain secara mentahan, si pemilik sawah hanya memberikan sawah tanpa memberi modal apapun, maka pembagiannya sepertiga hasil panen; sedangkan bila si pemilik sawah ikut memberikan modal, hasil pembagiannya bisa setengah hasil panen. Sedangkan hal ini tidak berlaku di Bawean, seperti yang dialami oleh keluarga Hindun, sebagai pemilik sawah

seluas 1 hektar, paling banter ia hanya mendapatkan 5-8 karung gabah kering saja atau senilai 200 kg beras. Jumlah ini jauh dari pembagian yang sepatutnya diberikan dari luasan satu hektar yang bisa mencapai hasil panen minimal tiga ton gabah. Si pemilik sawah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka pun tidak begitu peduli sawah itu digarap dengan baik atau tidak. Istilahnya daripada sawah itu mengganggu, lebih baik dipegang orang.

Di Desa Paromaan sendiri, sawah setengah produksi ini sekitar 18 hektar, semuanya hampir dimiliki oleh mereka yang bekerja di luar negeri. Ada sekitar 12 keluarga rantauan yang menitipkan lahan seperti ini kepada 15 orang penggarap. Selain sawah setengah produksi yang ada di Paromaan, ada juga penggarap yang menggarap sawah-sawah yang berada di wilayah dan dimiliki oleh masyarakat Tanjung Ori dan Tambak. Jumlah sawah di dua desa yang terkenal banyak rantauan ke Malaysia dan kapal internasional itu hampir mencapai 40 hektar. Orang-orang Langaor lah yang kebanyakan menggarap sawah-sawah tersebut.

Bagi penggarap yang ulet dan bila diperbolehkan oleh pemiliknya, sawah jenis ini pun sebenarnya dapat dua kali musim panen. Tetapi, sawah jenis ini umumnya hanya menghasilkan satu kali panen saja. Hal ini disebabkan oleh kegamangan para pemilik sawah untuk menyerahkan betul-betul pengelolaannya kepada para penggarapnya. Mereka masih ragu bahwa sawah tersebut akan berkurang kesuburannya bila terus-menerus digarap. Sikap ini ada karena para pemilik lebih mengartikan bahwa sawahnya bukan sebagai media produksi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sawah hanya investasi tanah yang bisa dijual kapan pun, atau sekadar alat jaga dari kebutuhan mendadak, atau sebagai bagian dari keumuman masyarakat. Sawah tidak lebih dari *klangenan* saja; alat perindu bahwa ia memiliki tanah hari tua di Pulau Bawean. Kebutuhan hidup kesehariannya dirasa telah dicukupi bukan oleh sawah itu, melainkan oleh ikhtiar mereka di tanah rantauan. Dengan pandangan hidup seperti itulah, banyak sawah di Bawean yang terbengkalai, tidak digarap dengan baik, dan seolah tidak dimiliki oleh orang.

5.7 Tiga Desa Tiga Wajah Strategi Ketahanan Pangan

Secara umum, kecukupan pangan berupa beras di Bawean khususnya di tiga desa; Paromaan, Tanjung Ori, dan Tambak masih dapat terjaga. Dalam melihat kecukupan pangan di tiga desa itu dapat dipetakan sebagai berikut.

Paromaan

Dalam kapasitas kesediaan sawah dan petaninya, maka Desa Paromaan dapat disebut sebagai desa lumbung padi, sekaligus penyedia pangan jenis lain seperti umbi-umbian dan pisang. Selain sawah, desa ini memiliki kebun yang cukup luas, di mana dua jenis pangan itu dapat tumbuh subur di wilayah yang berkategori gunung ini. Setiap musim panen desa ini dapat menyediakan 1.200 ton gabah atau sekitar 600 ton beras dari sawah produksi yang dimiliki dan digarap oleh anggota masyarakatnya. Jumlah ini belum ditambah dengan sawah setengah produksi yang hasilnya bisa mencapai 500-800 ton gabah atau sekitar 250-500 ton beras.

Bila dibuat rata-rata, setiap satu musim panen desa ini bisa menghasilkan 1.000 ton beras. Jumlah ini tentu mencukupi kebutuhan harian dari seluruh anggota masyarakat yang ada di desa ini, di mana dalam monografi desa tahun 2009 disebutkan bahwa desa yang terdiri dari tiga wilayah dusun ini berpenduduk 1.023 jiwa. Bila rasio konsumsi 3 ons/orang/hari, maka setiap penduduk di desa ini mengkonsumsi beras sedikitnya 9 kg/bulan atau 54 kg beras/6 bulan (satu musim panen). Maka rasio rata-rata konsumsinya adalah 54 kg/orang/satu musim panen dikalikan 1.023 jiwa, maka serapan konsumsi beras desa ini hanya mencapai 55.242 kg atau hanya 55 ton saja. Karena itu, desa ini kemudian dapat menyediakan kecukupan beras bagi desa-desa yang ada di sekitarnya, seperti Tanjung Ori dan Tambak. Tentu saja, sisa beras itu tidak seluruhnya dijual.

Kebiasaan pasca panen masyarakat petani yang berlaku di desa ini adalah seseorang yang memperoleh hasil panen sekitar 3 ton gabah atau 1,5 ton beras, mereka akan membaginya sebagai berikut: 10%

hasil panen untuk zakat mal (150 kg beras) yang akan diberikan langsung kepada amil atau masjid yang ada di sekitarnya. Persentase zakat ini bagi masyarakat Bawean adalah kewajiban yang dilakukannya penuh dengan kesadaran keagamaan. Zakat mal dari pertanian telah mampu menggerakkan pembangunan infrastruktur masyarakat. Bangunan masjid yang mewah, madrasah hasil swadaya, jalan-jalan kampung yang sudah disemen, dan lainnya merupakan imbas dari pemanfaatan zakat ini. Melalui zakat ini pula kesejahteraan untuk para guru ngaji, kiai, orang jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya terjaga.

Di Tanjung Ori bahkan, satu orang miskin, pada musim panen dan bulan Ramadhan bisa mendapatkan uang perolehan zakat dan infak sedikitnya 2 juta lebih. Di desa-desa seperti ini, orang-orang kaya atau orang-orang yang sehabis panen akan kerepotan mencari orang yang masuk dalam delapan *ashnap* penerima zakat. Tidak jarang akhirnya orang-orang kaya yang sedang panen itu menumpukkan pembagian zakat dan infak kepada sekelompok kecil orang miskin yang ada di desanya saja. Anehnya, mereka tidak atau kurang mau bila membagikan zakat dan infaknya kepada orang miskin yang berasal dari luar desanya. Sepertinya ikatan sosial dan kekerabatan di satu desa itulah yang menjadi alasan utama dari berlangsungnya fenomena ini.

Sedangkan jumlah 30 % atau sekitar 450 kg (sekitar Rp.2 juta) akan dijual lepas untuk pengembalian modal dan menjadi modal berikutnya. Mereka akan menjualnya kepada orang-orang yang tidak memiliki sawah yang ada di Tambak atau di Tanjung Ori; baik dengan cara sedikit demi sedikit ataupun dalam jumlah yang banyak; dan jumlah selebihnya sebanyak 60 % atau sekitar 900 kg disimpan di dalam *durung* untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sosial ekonomi, seperti hantaran orang hajatan, hantaran bagi keluarga yang meninggal, tolong menolong, dan lainnya.

Hampir dapat dikatakan tidak pernah ada petani di desa ini yang menjual lepas seluruh hasil panennya. Di desa ini tidak dikenal sistem *tebasan* dan *ijon*, seperti yang ada di pedesaan Jawa pada umumnya. Semua hasil panen pastilah dibawa pulang terlebih dahulu

dan kemudian disimpan di dalam *durung*. Setelah itu beras kemudian diatur pengeluarannya dari *durung* secara pelan-pelan. Dengan pola seperti ini, masyarakat di tiga dusun di desa ini tidak pernah membeli beras yang berasal dari luar desa, apalagi luar pulau Bawean. Terlebih ada tambahan jenis pangan lain, yaitu pisang dan umbi-umbian yang tumbuh subur di wilayah ini. Kedua jenis pangan inilah yang seringkali dijual ke masyarakat Tanjung Ori atau ke pasar Tambak, di mana hasilnya dipergunakan untuk membeli lauk pauk makanan (*cuko*) dan biaya lainnya seperti listrik dan bensin motor.

Tanjung Ori

Di atas disebutkan bahwa banyak penduduk Desa Paromaan yang memiliki dan juga menjadi penggarap sawah-sawah yang ada di Tanjung Ori. Selain sawah yang dimiliki oleh orang Paromaan, dapat dipastikan sawah yang ada di wilayah Tanjung Ori kebanyakan berkategori sawah setengah produksi. Sawah jenis ini hampir seluruhnya dimiliki oleh orang Tanjung Ori yang dikenal sebagai wilayah yang 80% penduduknya merupakan orang yang bekerja di kapal-kapal internasional. Desa yang berpenduduk 1.207 jiwa ini atau sekitar 280 kepala rumah tangga memiliki tradisi pekerjaan merantau dan menjadi awak kapal internasional secara turun temurun. Tradisi ini telah ada sejak tahun 1900an, di mana generasi pertama orang kapal adalah orang lokal yang bekerja pada maskapai kapal KPM Belanda.

Setelah itu, generasi berikutnya memilih memasuki kapal tandu, offshore, dan kargo internasional dengan sistem perekrutan yang bersifat tradisional, yaitu *getok tular* dan membawa atau merekomendasikan sanak keluarga ke pemilik dan kapten kapal itu. Tradisi ini tetap berlangsung sampai sekarang walaupun syarat-syarat sertifikasi memasuki kapal-kapal internasional semakin diperketat. Desa ini akhirnya dikenal sebagai desa orang kaya yang memiliki gaji minimalnya 10 juta; bahkan ada yang bergaji sampai 75 juta.

Di desa inilah hawa modernitas amat kentara, rumah mewah tingkat dengan lantai marmer dan kramik kelas satu, perabotan mebel

mewah, dan alat elektronika canggih telah menjadi bagian hidup keseharian mereka. Satu-satunya desa yang harga tanahnya paling tinggi di Pulau Bawean. Hal ini terjadi karena banyak uang yang mengendap di rekening dan tabungan rumah, yang hendak dibelanjakan untuk membeli tanah dan sawah. Setelah tanah atau sawah di Tanjung Ori terbeli, keduanya kerap dibiarkan begitu saja.

Fenomenanya seperti yang digambarkan Harvey (1997:12) bahwa tanda-tanda kapitalisasi masuk ke dalam lokal geografi tertentu adalah ketika banyak tanah kosong yang dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik. Di Tanjung Ori sendiri, kalau pun ada yang mengelola, khususnya sawah diserahkan pengolahannya kepada orang lain dengan tidak serius penyerahannya, sehingga sawah tersebut menjadi sawah yang berkategori setengah produksi; sawah yang sekedar untuk senang-senang saja; atau sesuka-suka hati pemiliknya. Orang-orang Paromaanlah yang kebanyakan menjadi penggarap dari sawah-sawah itu dengan sistem pembagian hasil yang tidak jelas pula.

Realitas pertanian seperti inilah yang memungkinkan orang Tanjung Ori akhirnya membeli beras dari orang Paromaan, baik hasil panen dari sawahnya sendiri di Tanjung Ori maupun sawah milik orang Paromaan yang ada di Paromaan dan Tanjung Ori. Selain itu, sistem penyimpanan di *durung* tidak lagi dikenal, karena orang Tanjung Ori lebih senang menggunakan *in cash* dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Dengan ketiadaan atau sedikitnya beras hasil panen sawah sendiri, mereka tidak bisa menyimpan beras di *durung* dalam waktu yang lama. Bahkan setelah tahun 1990 sampai 2005, bangunan *durung* dibongkar; karena dianggap membuat kumuh pandangan rumah. Walaupun ada, biasanya *durung* dipindahkan dari depan ke belakang rumah, dan kemudian digunakan sebagai kandang ayam.

Kebutuhan beras masyarakat Tanjung Ori yang mencapai angka 60 ton per satu musim panen, hanya mampu dicukupi 10-20 persen saja oleh hasil panen sawah produksi dan setengah produksi baik yang dimiliki masyarakat Tanjung Ori maupun sawah yang digarap oleh orang Paromaan. Kurangan pasokan pangannya kemudian

dipenuhi oleh hasil panen sawah produksi orang Paromaan, terlebih yang ada di dusun Candi dan Langaor. Selain itu, mereka pun ikut memasok beras untuk kebutuhan hidup orang Desa Tambak yang padat itu.

Tambak

Desa Tambak merupakan ibukota kecamatan. Desa ini adalah desa terpadat di Bawean bila dibandingkan luasan wilayahnya yang hanya 2 Km persegi. Jumlah penduduknya mencapai angka 4.560 jiwa. Wilayahnya berbatasan langsung dengan laut lepas, dan sisi dalamnya berbatasan dengan Desa Palumpang Gubug. Penduduknya memiliki mata pencarian yang lebih beragam, seperti pegawai negeri, swasta, nelayan, pedagang, buruh, pelayaran internasional, jasa, dan lainnya. Bisa dikatakan profesi petani murni tidak ada yang menggelutinya, selain realitas tanah yang tidak memungkinkan; padat permukiman, rawa dan pinggiran laut, juga karena Tambak adalah desa pertemuan pendatang dari berbagai daerah di Jawa dan Luar Jawa.

Di desa inilah pasar terbesar yang menghubungkan secara ekonomi desa-desa di Kecamatan Tambak beraktivitas. Walaupun aktivitas pasarnya hanya sampai jam 10 siang, namun perputaran uang yang ada di pasar ini relatif besar. Hal ini dikarenakan Pasar Tambak menjadi pintu utama dari 12 desa yang ada di Tambak. Setiap pagi, orang yang berada di wilayah gunung akan turun dengan berjalan kaki, menggunakan motor, ataupun dengan *colt-colt pick up* untuk menjual beras, minyak goreng kelapa olahan sendiri, kelapa, umbi, pisang, buah-buahan, ayam, sayuran, dan sebagainya. Setelah terjual, mereka akan membelanjakan uangnya untuk keperluan membeli kebutuhan sehari-hari seperti *cuko* (ikan), lauk pauk, garam, mie, sabun, pakaian, sampai “barang merah” (emas).

Dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, orang Tambak lebih memilih *in cash* dari pasar. Beras orang Paromaan dapat dibeli langsung di pasar, demikian juga terhadap jenis pangan lain, seperti umbi dan pisang pun langsung dibeli di pasar. Pasar Tambak bagi

mereka adalah sumber pangan mereka, asalkan memiliki uang tunai, pastilah mereka mendapatkannya secara cepat. Pola perolehan pangannya telah menggunakan mekanisme pasar atau dalam sistem ekonominya disebut *disembedded* (Polanyi 1999). Sistem ekonomi ini semuanya tergantung pada mekanisme pasar, baik dalam soal distribusi, supply, harga, kualitas dan sebagainya.

Mereka tidak lagi peduli beras siapa yang dijual itu, apakah beras orang Paromaan atau beras yang berasal dari Gresik, tetapi yang terpenting adalah mereka dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara efektif dan cepat. Karena itulah, bila ada berita Bawean terancam kelaparan ketika terjadi gelombang dan angin besar, di mana kapal dari Gresik dan Surabaya tidak bisa melaut, dapat diasumsikan bahwa masyarakat Tambaklah yang menjadi pusat perhatian berita itu. Sedangkan masyarakat desa gunung seperti Paromaan, Gunung Teguh, Pudakit, dan termasuk Tanjung Ori karena ikatan ekonomi pertanian yang masih bersifat *embeddednya* dengan masyarakat Paromaan adalah pengecualian dari pemberitaan itu.

5.8 Fungsi Sosial Ekonomi *Durung*

Seperti disebutkan di atas, bahwa secara ekonomi, masyarakat Bawean tergantung pada pertanian dan penangkapan ikan, di samping perdagangan (Jasper, 1906:238). Di samping itu, banyak juga penduduk Bawean yang mengadakan perdagangan tekstil, tikar pandan, dan mencari nafkah keluar negeri seperti yang ditelusuri oleh Vredenberg (1976). Pada umumnya, selain merantau sebagai pekerjaan utama, penduduk Bawean yang masih tinggal di Bawean akan bertumpu pada sektor pertanian, walaupun secara geografis beberapa bagian wilayah kepulauan ini kekurangan air (tidak subur).

Sebagian besar sawah yang berada di sepanjang pantai dan sawah setengah produksi pengelolaannya hanya bisa panen sekali dalam setahun. Tetapi, bagi sawah produksi yang digarap dengan baik dapat menghasilkan panen sebanyak dua kali. Umumnya petani akan memilih untuk memakai sendiri beras yang dihasilkannya, sedikit demi

sedikit, dan tidak akan segera dijual ke pasar sebelum terjepit secara ekonomi. Beras yang ada kemudian disimpan di dalam *durung*, dan baru dilepas ke pasar bila ada kebutuhan mendesak atau ada kepentingan sosial lainnya.

Dengan pilihan hidup seperti itu, *durung* bagi masyarakat Bawean sepertinya mempunyai peranan strategis dalam menjaga ketahanan pangan. *Durung* dalam arti ini tidak sekadar diartikan sebagai sebuah bangunan penampung atau penyimpanan beras saja, tetapi juga telah memiliki makna sebagai sistem dan pola; di mana sistem *durung* ini telah dikembangkan masyarakat dalam mengatur pengeluaran beras dengan jumlah-jumlah tertentu demi kepentingan individu, keluarga dan sosial kemasyarakatan.

Penelitian tentang strategi bertahan hidup dalam bidang ketahanan pangan hendak menemukan jawaban dari pertanyaan “bagaimana *durung* sebagai lembaga tradisi informal masyarakat Bawean itu berfungsi dalam menjaga pangan masyarakat”? Bila jawaban ini dapat diperoleh, maka penelitian ini akan berhasil mengetahui dan menjelaskan peran *durung* sebagai lembaga tradisi masyarakat Bawean dalam mencapai ketahanan pangan; dan dapat memetakan dan merumuskan potensi kearifan masyarakat lokal dalam menjaga tradisi yang berhubungan dengan persoalan ketahanan pangan.

Karena itu, ada tiga hal pokok yang harus diamati dalam menjawab pertanyaan di atas. *Pertama*, paradigma mengenai fungsi *durung*, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terlebih ketika sistem *durung* di beberapa desa di Bawean sekarang ini sudah mengalami kemunduran. *Kedua*, langkah apa saja yang diambil oleh masyarakat Bawean dalam usaha memfungsikan secara maksimal *durung* sebagai lembaga tradisi informal masyarakat Bawean dalam mencapai ketahanan pangan. *Ketiga*, soal pengarusutamaan (*main streaming*) masyarakat Bawean dalam usaha mencapai ketahanan pangan itu sendiri, apakah mereka berhasil melakukan insentififikasi dan

diversifikasi pertanian atau masih cenderung bersifat tradisional dalam proses pra dan pasca produksi pertaniannya.⁷

Secara kasat mata, *durung* dalam fungsi sosial ekonominya bisa menjadi ilustrasi dari lembaga tradisi informal yang dikenal dan dijalankan oleh masyarakat Bawean. Dalam versi masyarakat yang berbeda, *durung* adalah lumbung padi (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; EM. Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja 2008). Meskipun bentuknya hanya bangunan lebih kecil dari rumah dan letaknya terpisah dari rumah, sebagai tempat penyimpanan persediaan makanan, gabah padi atau beras, tetapi sistemnya dapat menjadi penjaga ketersediaan pangan dan proses tanggungjawab dan kepatantasan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, dalam konsep penggunaan istilah, *durung* hanya ada di pulau Bawean.

Penelitian yang dilakukan di Desa Paromaan, dusun Candi dan Langaor Kecamatan Tambak Pulau Bawean Gresik Jawa Timur telah menemukan bahwa di dua dusun ini masih banyak penduduk yang menggunakan *durung*, jumlahnya bahkan mencapai 96 *durung*. Jumlah *durung* di wilayah ini berbeda dengan desa lain yang hanya sekitar 4-10 *durung*, itu pun hanya bersifat menjadi tempat bersantai saja, seperti pada kasus *durung* di Desa Tanjung Ori dan Tambak.

Durung pada umumnya berbentuk empat persegi panjang yang atapnya mengerucut ke atas mirip rumah adat Minang, dengan menggunakan empat tiang di mana pada setiap bagian tiang atas ada yang namanya *jhelepang* yang berbentuk persegi empat juga. *Jhelepang* ini berfungsi agar tikus tidak bisa naik ke bagian atas

⁷Poin utama tiga hal pokok di atas adalah upaya mendeskripsikan dan memetakan potensi lokal, sehingga secara langsung menjadi langkah efektif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat sebagai isu sentral pengembangan dan dinamika masyarakat. Secara tidak langsung, penelitian ini dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka secara sosial, sehingga potensi yang ada seperti *durung* itu dapat ditingkatkan fungsinya dalam menjaga eksistensi hidup mereka yang subsistens.

(lumbung padi). Adapun sistem kepemilikan dari *durung* biasanya bersifat pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan tetangganya, dan bukan seperti kepemilikan bersama yang ada pada masyarakat suku adat. Suku Tau Taa Wana di Sulawesi Tengah menyebutnya *konda* (lumbung padi).

Dalam sejarahnya, *durung* pada awalnya berfungsi sebagai *langgar* (terlebih sebelum adanya musholla), suatu tempat yang digunakan untuk mengaji Al-Qur'an, seperti yang ada pada sebagian masyarakat Jawa. Bagian atas *durung* kemudian dijadikan lumbung padi, guna menyimpan persediaan beras selama satu tahun. Tampungannya bisa mencapai kapasitas 20 ton, baik masih berupa gabah kering ataupun dalam bentuk beras. Dengan kapasitas sebesar inilah, *durung* yang dahulu dimiliki oleh setiap keluarga, sebenarnya memiliki peran besar dalam mempertahankan pangan masyarakat Bawean. Dengan asupan konsumsi keluarga yang hanya setengah ton per tahun, gabah atau padi sisa di atas kemudian dikelola dengan baik.

Mereka memanfaatkan sisa gabah atau beras itu sebagai biaya modal penanaman padi pada musim berikutnya. Satu bulan sebelum memasuki musim tanam berikutnya, 20 sampai 50 kilogram gabah kering diturunkan untuk dipilah sebagai bibit atau weni padi yang akan disemaikan di petak sawah secara khusus. Menunggu dewasa, para petani kemudian menyiapkan lahannya. Untuk membiayai aktivitas baru dari musim tanam itu, mereka akan menurunkan kembali gabah dari *durung* sekitar satu ton untuk dijual. Mereka menjualnya langsung ke pasar atau individu yang membutuhkan beras untuk konsumsi dan hajatan. Uangnya dimanfaatkan untuk membayar tenaga-tenaga tambahan pengelolaan sawah, seperti mencangkul, *traktor*, menanam, *ngrajek*, dan lainnya.

Setelah musim tanam selesai, mereka menghitung kembali berapa jumlah gabah yang masih tersisa. Jumlah sisa ini dipisah-pisah; untuk keperluan konsumsi keluarganya sampai musim panen berikutnya sebesar 50% dari sisa; 30% digunakan untuk cadangan bila terjadi keadaan darurat, seperti gagal panen atau terkena musibah,

seperti sakit dan sebagainya; dan 20% sisanya akan digunakan untuk jaminan diri dan keluarganya dalam beraktivitas sosial. Jumlah 20% ini bagi sebagian orang terlihat besar, tetapi bagi masyarakat Bawean yang memiliki *durung*, persentase ini, selain sebagai bentuk partisipasi sosial, juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang dapat berfungsi memperbaharui beras dan juga mengalihkan bentuk kepemilikan beras dengan bentuk tunai dan jasa pada masa berikutnya.

Bagi orang Bawean, terlebih orang Langaor, partisipasi sosial, seperti sumbangan pembangunan, sumbangan atau hantaran orang hajatan, hantaran untuk kematian, tolong menolong, keperluan masjid, dan lain sebagainya merupakan kewajiban sosial yang tidak hanya bermanfaat dalam arti ibadah, tetapi juga sebagai bentuk eksistensi diri dan keluarga di tengah hubungan sosial kemasyarakatannya. Bila ia ikut berpartisipasi sosial, ia pun akan dikenal sebagai orang baik yang tentu bermanfaat bagi kehidupan sosialnya.

Bila tetangganya sampai kehabisan beras atau tidak makan, padahal diri dan keluarganya memiliki beras atau gabah kering melimpah di *durung*, ia bisa saja dicap sebagai “orang tidak baik” yang harus dijauhi oleh masyarakat. Keadaan dijauhi itu, bagi sebagian besar orang Bawean ibarat siksa tiada henti. Karena itulah orang Bawean lebih memilih menjaga hubungan personal dan sosial secara baik. Hal ini biasanya dibuktikan dengan kesediaan atau kesukarelaan para tetangga untuk berkumpul dan mengobrol bareng di atas *durungnya*. Kepemilikan fisik dari beras di *durung*, akhirnya akan digantikan dengan kepuasan batiniah yang dirasakan para pemilik itu. Hubungan timbal balik itu adalah salah satu dari tanda menguatnya lembaga tradisi masyarakat, seperti yang ditulis oleh Winardi (2003:9).

Di atas disebutkan bahwa sistem partisipasi sosial *durung* bisa melahirkan bentuk alih investasi sosial ke bentuk ekonomi. Hal ini berlaku ketika *durung* mampu membentuk satu pemikiran atau cara pandang pemilik bahwa beras yang dikeluarkan untuk kepentingan sosial, dimana secara wujud sebenarnya telah beralih atau hilang, tetapi secara hakikat ia bertambah nilainya. Wujud fisik beras itu berubah

menjadi bentuk kalkulatif, bahkan sampai tingkat ekonomi, yaitu ketika orang lain mengartikan itu adalah sistem timbal balik nilai; yang secara tidak langsung sebenarnya ikut memperbaharui kualitas beras di dalam *durung*, sekaligus juga menambah nilai cadangan; bahwa beras itu berubah menjadi nilai uang di kemudian hari. Selain sebagai lembaga tradisi yang menguatkan hubungan antar masyarakat khususnya pada ketersediaan dan pengaturan pasokan pangan, dilihat dari realitas pertukaran jasa di dalamnya, maka *durung* bisa memiliki fungsi ekonomi. Apalagi bila pertukaran itu menggunakan sistem utang piutang, meskipun tanpa bunga, namun, pembaharuan fisik dan kualitas beras merupakan aspek tidak terpisahkan dari nilai kalkulasi ekonomis itu.

Seperti garis linear perkembangannya, secara fisik dan fungsi *durung* pun terus berubah. *Durung* pada awalnya berfungsi sebagai tempat mengaji. Pada waktu berikutnya fungsi ini ditambah sebagai tempat penyimpanan hasil panen; setelah itu hanya khusus sebagai tempat penyimpanan beras atau gabah kering; tempat mengaji diganti sebagai tempat aktivitas *leisure time* dan pertemuan sosial;⁸ sekarang di beberapa desa, *durung* hanya menjadi tempat aktivitas *leisure time* itu. Fungsi penyimpanan beras ditiadakan, seiring melemahnya ikatan sosial sebagai syarat berlakunya lembaga tradisi dalam bidang ketahanan pangan.

Masyarakat Bawean sekarang umumnya lebih menggantungkan kecukupan pangannya pada mekanisme pasar. Fungsi *durung* sebagai lumbung padi sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan seiring banyaknya anggota masyarakat yang meninggalkan lahan

⁸ Menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk membicarakan masalah keluarga dan sosial, sekaligus mencari pemecahan masalahnya secara bersama. Selain digunakan sebagai tempat untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan, *durung* digunakan sebagai tempat melepaskan lelah setelah pulang dari kebun, sawah atau setelah perjalanan. *Durung* juga digunakan oleh tuan rumah dalam menemani tamunya saat menunggu hidangan yang sedang disiapkan oleh istri si tuan rumah.

pertanian dan identitas profesinya sebagai petani. Mereka lebih memilih merantau ke luar negeri dengan alasan bahwa menjadi petani ternyata tidak memberikan nilai lebih dalam kesejahteraan ekonomi.

Tumbuh suburnya paradigma rantau dalam masyarakat Bawean walaupun telah ada sejak dahulu, dan melemahnya orientasi hidup tentang sawah karena pengaruh modernitas telah menyebabkan *durung* yang semula merupakan sarana vital bagi sistem ketahanan pangan bagi masyarakat Bawean mulai terkikis, bahkan mengalami kepunahan. Keberadaan *durung* akhirnya mengalami penurunan drastis, baik dari segi fungsi maupun dari jumlah. *Durung* sekarang sepertinya tidak lagi menjadi lembaga tradisi informal yang strategis untuk menciptakan ketahanan pangan di desa-desa pulau Bawean.

Akhirnya, ketika musim angin barat dan ombak besar, di mana nelayan tidak ada yang pergi melaut bahkan kapal yang menjadi satu-satunya pemasok sembako dari Pulau Jawa tidak berani berangkat satu sampai dua minggu, maka masyarakat Bawean terancam dengan bencana kelaparan. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki padi yang bisa disimpan di dalam *durung*, karena mereka lebih menyukai membeli beras dari Jawa secara tunai.

Ketika musim angin barat inilah, *durung* dengan segala fungsinya, terlebih dalam fungsi tempat penyimpanan padi, terasa vital. Dari fungsinya, masyarakat sebenarnya bisa berbagi dan meminjamkan beras dari satu kepada yang lainnya, seperti kebiasaan orang tua dahulu saat memfungsikan *durung*. Atau bisa saja, masyarakat kemudian menjual beras itu sedikit demi sedikit ke pasar ketika mereka memerlukan uang untuk kebutuhan primer lainnya. Semua pilihan ini tergantung kepada masyarakat Bawean. Apakah mereka tetap pada prinsip kecukupan pangan berasal dari hasil usahanya sendiri dan didukung dengan *durung* sebagai satu sistem yang mampu mengatur pengeluaran dan pemanfaatan hasil pasca produksi; ataukah kecukupan pangannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, di mana secara kondisi geografis sebagai pulau kecil dan terpencil, mekanisme pasar ini kerap kali terganggu.

5.9 Penutup: Etos Kreatif dalam Budaya Ketahanan Pangan

Masyarakat pulau, seperti Bawean bisa dipastikan memiliki ketergantungan dengan wilayah atau pulau lain. Ketergantungan yang sifatnya sosial ekonomi merupakan sesuatu yang layak dipertimbangkan dalam melihat kehidupan masyarakat. Ketergantungan ini berjalan bersama dengan potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat sendiri. Hal ini terlihat nyata dalam aspek kecukupan pangan. Penelitian telah menemukan realitas bahwa masyarakat Bawean dalam menjalani kehidupannya tidak semata tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Pertanian yang ada tidak dimanfaatkan untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan hidup yang ada. Pertanian dan perikanan laut sebagai bagian terpenting dari ketahanan pangan hanya dianggap sebagai “pekerjaan selingan, pekerjaan kesenangan atau pekerjaan sambilan”. Hal ini terjadi karena biaya tenaga kerja bidang pertanian dan perikanan lebih besar dari biaya produksi sawahnya.

Mereka terpaksa membayar orang yang berasal dari pulau Jawa (khususnya Jawa Timur), karena sebagian besar orang Bawean lebih memilih untuk tidak terlibat langsung dalam pengolahan sawah itu. Mereka sendiri lebih memusatkan diri kepada pekerjaan yang berorientasi ke luar negeri, baik sebagai TKI legal, awak kapal internasional, maupun TKI ilegal di perkebunan. Karena itu, hampir semua penduduk Bawean memiliki hubungan dengan dunia luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Amerika, dan lainnya, baik melalui jaringan ketenagakerjaan ataupun jaringan keluarga yang berada di sana. Hubungan ini semakin memperkuat hadirnya pengaruh dan gaya hidup luar negeri dalam kehidupan masyarakat, walaupun pengaruh ini masih kalah kuat dengan nilai-nilai tradisi dan religiusitas masyarakat yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Bagi masyarakat di pulau terpencil seperti Bawean, pasokan pangan hanya ada dua pilihan; bersumberkan dari kemampuan produksi sendiri atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi dan dampak. Sayangnya,

pilihan pertama dari hari ke hari semakin ditinggalkan masyarakat Bawean, sebagai buah pemikiran praktis yang berasal dari tradisi rantau; dan kegamangan mereka memasuki modernitas yang kerap kali bersifat sebagai satu proses penipuan diri di mana yang tradisional dianggapnya hanya akan mengganggu gaya hidupnya saja.

Walaupun pilihan produksi sendiri dalam kecukupan pangan sebenarnya tidak memiliki dampak negatif apapun bagi masyarakat, terlebih ketika pilihan itu diikuti dengan kebiasaan sosial pengaturan dan pemanfaatan hasil pasca produksi yang ditumpukan pada fungsi sosial dan ekonomi *durung*. Memang *durung* tidak sepenuhnya hilang dari Pulau Bawean, tetapi sifatnya sangat terbatas baik dalam arti jumlah sebaran ataupun fungsinya. *Durung* sekarang sekadar gudang beras, tidak lagi diaktifkan sebagai lembaga tradisi yang mampu menjaga eksistensi hidup dan kecukupan pangan anggota masyarakat lain. Bila fungsi dan keberadaan *durung* tidak segera direvitalisasi, *durung* hanya akan menjadi kenangan kolektif masyarakat Bawean. Lebih merana lagi, yaitu ketika banyak masyarakat meninggalkan profesi petani dan memilih rantau sebagai basis utama dan aktivitas ekonomi terpentingnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak fatal terhadap kecukupan pangan, karena semuanya tergantung pada pasokan beras dari pulau Jawa.

Pustaka Acuan

- Anderson, Benedict. 2000. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Bourdieu, Pierre. 2003. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* Pierre Bourdieu, Columbia: Columbia of University.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Glenceo: The Free Press
- Giddens, Anthony. 1983. *A Contemporary Criticique of Historical Materialism*. Barkeley: University of California Press.

- Harvey, David W. 1998. *Social Justice in the City*. London: Edward.
- Iqbal, Achmad, 2010, “Karakteristik dan Interaksi Masyarakat Yang Tinggal Disekitar Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Bawean”, *Makalah*, Purwokerto: Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman.
- Kartono, Drajat Tri. 2004. *Orang Boyan Bawean: Perubahan Lokal dalam Transformasi Global*. Surakarta: Pustaka Caraka.
- Koordinator Statistik Kecamatan Sangkapura. 2008. *Kecamatan Sangkapura dalam Angka*. Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
- Koordinator Statistik Kecamatan Tambak, 2008. *Kecamatan Tambak dalam Angka*. Gresik: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik
- Latif, Abdul, HS dkk. 2003. *Mencipta Bawean: Antologi Gagasa Orang-orang Boyan*. Bawean: Boyan Publishing.
- Luhung, Mardi. 2009. “Pulau yang Bergandul Potongan Kuping” dalam <http://www.sastra-indonesia.com/>
- Mohamad, Goenawan. 2005. “Sebuah Ruang, 17 Ribu Pulau”. *Majalah Tempo*, Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan, 15-21 Agustus 2005.
- Moore, Barrington. 1978. *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*. New York: ME Sharpe.
- Sayogyo. 1993. “Pemikiran tentang Kemiskinan di Indonesia; dari Masa Penjajahan sampai Masa Pembangunan”. Dalam *Prisma* no.3, Tahun XII
- Simanjuntak. 1984. *Ungkapan Tradisional sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Depdikbud.
- Sinaga, Anicetus. 1996. *Imam Trinitar*. Jakarta: Obor.

- Singarimbun, Masri dan D.H. Penny. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Usman, Zulfa. 1996. *Petodhu Bhesa Bhebien*. Bawean: Next Generation Foundation.
- Vredembregt, Jacob. 1990. *Bawean dan Islam*. Jakarta: INIS.
- Wirahadikusumah, Miftah. 1991. "Sektor Informal sebagai Bumper pada Masyarakat Kapitalis. Dalam *Prisma*, 5 Mei 1991. Jakarta: LP3ES.

